

**POLA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 DI  
KABUPATEN PEMALANG  
(STUDI KASUS DI DESA BANJARDAWA)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Muhammad Ahlan Kalasuba

(1906016078)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu 'alailaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i :

Nama : Muhammad Ahlan Kalasuba

NIM : 1906016078

Jurusan : Ilmu Politik

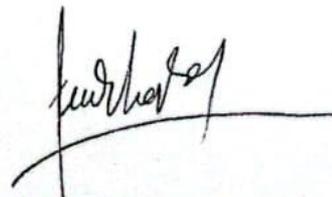
Judul Skripsi : Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus di Desa Banjardawa)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 September 2023

Pembimbing I



Muhammad Mahsun, M.A

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**POLA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN**  
**PEMALANG**  
**(STUDI KASUS DI DESA BANJARDAWA)**

Disusun Oleh:

**Muhammad Ahlan Kalasuba**

(1906016078)

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 27 September 2023 dan  
dinyatakan LULUS

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua



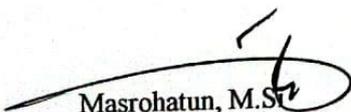
M. Syamsudin, M.A  
NIP. 190805051995031002

Sekretaris



Muhammad Mahsun, M.A  
NIP. 198511182016011901

Penguji I



Masrohatun, M.Si  
NIP 198806212018012001

Pembimbing I



Muhammad Mahsun, M.A  
NIP. 198511182016011901

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya dengan penuh kejujuran dan memberikan tanggungjawab didalamnya. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan dari pihak manapun untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi ataupun Lembaga Pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 8 September 2023



---

Muhammad Ahlan Kalasuba

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Desa Banjardawa). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jahiliyyah ke zaman terang benderang ini sehingga ilmunya dapat diperoleh dengan mudah.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana pada program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dalam penelitian. Meskipun, demikian atas usaha dan kerja keras serta pihak-pihak yang memberikan arahan, dukungan, dan dorongan maka skripsi ini selesai dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih tiada batasnya kepada ;

1. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Muhammad Mahsun, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu pada penulis selama proses menuntut ilmu di UIN Walisongo.
6. Bapak, Ibu, dan Mba selaku keluarga penulis. Terimakasih atas dukungan moral dan material yang membuat penulis terus semangat menyusun skripsi.
7. Mas Muhtam dan Mas Ilham selaku pimpinan LKPB Indonesia yang telah membantu dukungan dana dengan terus memberikan pekerjaan dan kesempatan untuk terus berkarier selama penyusunan skripsi.
8. Intan Hidayat selaku pimred Sinar Jateng yang juga telah memberikan dukungan menulis dengan memberikan kelonggaran penulis untuk lebih fokus menyusun skripsi.
9. Teman-teman kontrakan kuning yang telah memberikan tempat tinggal selama penulis menyusun skripsi di Semarang.
10. Bapak Sukandar selaku Kepala Desa Banjardawa.
11. Bapak Rambat selaku Sekertaris Desa.
12. Bapak Vidi Kurniawan selaku Ketua Ranting PDIP.
13. Bapak Ustadz Toni selaku Ketua Ranting PKB.
14. Kawan-kawan PPS Desa Banjardawa.
15. Mas Bagus selaku PKD Desa Banjardawa.
16. Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang.
17. Kawan-kawan KKN Misi Khusus KPI yang telah menjadi bagian hidup penulis selama menempuh kuliah di UIN Walisongo.

18. Teman-teman penulis yaitu Bayu Trijaya, Bayu Firmansyah, Sholihah, Ivan Afik, Silfi, Salsa, dan Azis yang telah mendukung penulis dan selalu menghibur penulis dalam penyusunan skripsi.
19. Sahabat-sahabati PMII rayon Fisip yang telah menjadi bagian hidup penulis selama menempuh kuliah di UIN Walisongo.
20. Kawan-kawan satu angkatan prodi ilmu politik yang telah memberikan pembelajaran selama berproses dan memberikan dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Semoga segala amal, bantuan, dan kebaikan dari berbagai pihak diatas dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal dan melimpah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sleuruh pihak. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Semarang, 8 September 2023



Muhammad Ahlan Kalasuba

NIM. 1906016078

## PERSEMBAHAN

Segenap usaha dan beriringan ucapan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, atas karunia-Nya ini penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi. Penulis mendedikasikan skripsi ini teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta dan terkasih dari penulis yang selama ini telah mendidik penulis dan memberikan nasihat, dukungan, motivasi, serta tak luput dengan doa yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada hentinya hingga saat ini.
2. Kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara material atau moral serta memberikan arahan pada penulis.
3. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doany sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat perjuangan kontrakan kuning yang telah membersamai berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas motivasi Kita semua untuk lulus bersama.
5. Kawan-kawan penulis yaitu Bayu Trijaya Pratama, Bayu Firmansyah, Sholikhah, Ivan Afik Zein, Silfi Auliya Annisa, Salsabila Firdausiyyah, dan Abdul Aziz yang telah membersamai penulis selama kuliah di UIN Walisongo.
6. Saudari Yulinita Sabilla yang telah menjadi *partner* penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas motivasi-motivasinya sehingga penulis terus semangat dalam menyusun skripsi.

## **MOTTO**

*Man Saara Ala Darbi Washala*

Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)

*Man Shabara Zhafira*

Barang siapa yg bersabar maka ia akan beruntung

Terbentur, Terbentur, Terbentur, dan Terbentuk

## ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan bagian penting dari sebuah pesta demokrasi karena keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan di momentum pemilihan umum atau pilkada. Pada tahun 2020 Kabupaten Pemalang menyelenggarakan pilkada ditengah pandemi covid-19. Meski demikian partisipasi pemilih di Desa Banjardawa tergolong tinggi yaitu sebesar 75%. Dalam penelitian ini terdiri atas dua rumusan masalah atau fokus kajian yaitu pertama terkait apa preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa pada pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang? Dan fokus kajian berikutnya yaitu terkait bagaimana pola masyarakat Desa Banjardawa dalam memperjuangkan preferensi tersebut pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Pemalang,tahun 2020?

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti menggunakan teori pendekatan pilihan rasional dan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Penelitian ini didukung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebanyak 75% masyarakat Desa Banjardawa memilih untuk berpartisipasi aktif memilih saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Adapun alasan atau preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa yang memilih untuk datang ke tps yaitu keberadaan tempat hiburan, pembangunan infrastruktur jalan, kenaikan upah minimum regional dan peningkatan lapangan kerja, adanya keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah, dan uang dan partai politik. Pada preferensi tempat hiburan banyak dimiliki oleh pemilih pemuda yang memiliki keinginan agar Kabupaten Pemalang memiliki tempat hiburan bioskop dan tempat wisata yang bagus. Preferensi politik infrastruktur jalan dimiliki oleh pemilih pemuda yang memang lebih sering melakukan aktivitas diluar. Preferensi umr dan lapangan kerja merupakan preferensi yang dimiliki oleh seluruh golongan pemilih baik pemilih muda atau generasi X. Hal tersebut karena umr dan lapangan kerja merupakan hal urgensi yang diinginkan seluruh golongan masyarakat. Selanjutnya preferensi pilihan keterlibat pemuda dalam pembangunan daerah dimiliki oleh para kaum pemuda. Selanjutnya preferensi pilihan uang dan partai politik dimiliki oleh para generasi X yang sudah lama memiliki pengalaman memilih. Sementara itu, pola partisipasi masyarakat Desa Banjardawa terdiri atas kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi. Kegiatan pemilihan yang terdiri atas partisipasi aktif masyarakat yang memilih dan anggota penyelenggara pemilu. Sementara itu untu kegiatan organisasi dalam bentuk tim sukses dan anggota partai politik. Adapun *lobbying* dilakukan oleh tim sukses kepada pemerintah desa da tokoh agama.

**Kata Kunci :** Partisipasi Politik, Preferensi Politik, Pilihan Rasional, Pilkada

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka .....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II KERANGKA TEORI .....	20
A. Teori Pilihan Rasional atau Rational Choice .....	21
B. Partisipasi Politik.....	24
BAB III PROFIL DESA BANJARDAWA.....	29

A. Profil Landscape Desa Banjardawa.....	30
B. Dinamika Politik Pilkada Kabupaten Pemalang Tingkat Kabupaten.....	48
<b>BAB IV PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DESA BANJARDAWA PADA PILAKADA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 .....</b>	<b>58</b>
A. Keberadaan Tempat Hiburan. ....	59
B. Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	63
C. Kenaikan UMR dan Peningkatan Lapangan Kerja .....	66
D. Adanya Keterliban Pemuda dalam Pembangunan Daerah .....	69
E. Uang dan Partai Politik.....	71
<b>BAB V PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA BANJARDAWA SAAT PILKADA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 .....</b>	<b>75</b>
A. Masyarakat Pemilih .....	75
B. Masyarakat sebagai Penyelenggara Pemilu .....	83
C. Masyarakat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon .....	87
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Banjardawa 2023 .....	33
Tabel 2 Jumlah Pekerjaan Masyarakat Banjardawa 2023.....	34
Tabel 3 Jumlah Pileg Kabupaten Pemalang 2023 .....	42
Tabel 4 Hasil Suara Pilkada Kabupaten Pemalang 2020 .....	44
Tabel 5 Jumlah Suara Pileg Kabupaten Pemalang 2019.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Banjardawa.....	30
Gambar 2 APBDes Desa Banjardawa 2019 .....	36
Gambar 3 Struktur Pemerintahan Desa Banjardawa .....	47
Gambar 4 Struktur Organisasi BPD Desa Banjardawa .....	48
Gambar 5 Jalan Rusak yang Ada di Kabupaten Pemalang .....	62
Gambar 6 Wawancara dengan Sukandar selaku Kepala Desa Banjardawa .....	95
Gambar 7 Wawancara dengan Rambat selaku Sekertaris Desa .....	95
Gambar 8 Wawancara dengan Muhammad Bagus selaku PKD Desa Banjardawa .....	96
Gambar 9 Wawancara dengan Fatoni Firman selaku Tim Sukses dan Ketua Ranting PKB Desa Banjardawa .....	96
Gambar 10 Wawancara dengan Puput Nur Maulidya .....	97
Gambar 11 Wawancara dengan Tania Putri Novitasari.....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Dokumentasi Penelitian .....	95
Lampiran 2 Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Pemerinta Desa Banjardawa .....	98
Lanpiran 3 Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara .....	98

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sebuah mekanisme transformasi aspirasi politik partai yang nantinya dapat menjadi kebijakan negara. Pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang menghubungkan infrastruktur politik dan suprastruktur politik (Asshiddiqie, 2006). Pemilihan Umum atau pemilu berkaitan erat dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari hal tersebut adalah dimana orang yang paling tahu dengan baik atau buruknya dirinya adalah orang itu sendiri. Hal itu yang membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik yang dibuat pemerintah agar keputusan politik yang diputuskan pemerintah berdampak baik pada diri orang tersebut. Hal tersebutlah yang membuat partisipasi politik salah satu elemen penting dalam demokrasi (Ram10). Partisipasi politik juga merupakan sebuah ciri khas dari modernisasi politik. Hal tersebut karena pada masyarakat tradisional pemerintahan dan politik hanya urusan dari satu golongan elit yang kecil saja sedangkan masyarakat seperti petani dan pedagang mereka tidak terlalu berpikir untuk berusaha memengaruhi pemerintah dan politik (Samuel P. Huntington, 1994).

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti dan makna. Ada beberapa perbedaan dan pertanyaan terkait arti dari partisipasi politik, pertama apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau partisipasi politik itu hanya kegiatan yang bertujuan untuk pengaruhi pejabat publik dalam mengambil keputusan. Namun, rangkuman dari pertanyaan arti inti atau sebenarnya partisipasi politik maka dapat ditemukan bahwa arti inti dari partisipasi politik merupakan sesuatu hal yang cangkupannya tidak hanya kegiatan yang dilakukan pelakunya sendiri untuk memengaruhi keputusan pemerintah tetapi partisipasi politik juga kegiatan oleh orang lain diluar si pelaku yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Istilah tersebut dinamakan pertama partisipasi *otonom* dan yang kedua disebut partisipasi *dimobilisasikan* (Samuel P. Huntington, 1994).

Partisipasi sebagai sesuatu kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi kepada proses *input* dan output politik sementara partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*

saja. Selain itu ada juga sebuah kelompok masyarakat yang tidak menjadi partisipasi aktif ataupun partisipasi pasif karena mereka beranggapan bahwa sistem politik yang ada telah menyimpang dari yang diinginkan. Kelompok masyarakat seperti itu disebut dengan kelompok apatis atau golongan putih (golput) (Subakti, 2010).

Studi tentang partisipasi politik masyarakat telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana terdahulu. Studi yang mengkaji terkait partisipasi memiliki keragaman objek penelitian seperti halnya ada yang meneliti terkait partisipasi pemilih pemula dan ada juga yang mengkaji terkait partisipasi pemilih berdasarkan ras dan suku serta partisipasi masyarakat dalam menentukan sebuah kebijakan publik. Pada studi sebelumnya yang dilakukan Primandha Sukma Nur Wardhani (2018), Eta Yuni Lestari dan Nugraheni Arumsari (2018), Ni Ketut Arniti (2020), Heri Kusmanto (2014), Regina Singestecia, Eko Handoyp, dan Noorocmat Indaryanto (2018) menemukan sebuah hasil penelitian yang fokus kajian partisipasi politik pada pemilihan umum atau pemilu dan partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya dalam peyusunan kebijakan publik yang disahkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi pastinya sangat diwajibkan. Dalam demokrasi politik masyarakat harus mendapatkan kebebasan untuk terlibat menyusun kebijakan publik dalam bentuk aspirasi masyarakat (Kusmanto, 2014). Secara garis besar partisipasi politik masyarakat khususnya bagi pemilih pemula saat pemilu terjadi karena adanya rangsangan atau pendorong untuk berpartisipasi (Khalehar, 2017). Faktor perangsang yang membuat partisipasi masyarakat aktif yaitu mobilitas para praktisi politik atau politisi, lalu relasi para aktor politik yang memegang jabatan di pemerintahan baik di tingkat provinsi atau Kabupaten/kota, dan juga adanya sebuah reward atau punishment (Arniti, 2020).

Secara garis umum terdapat beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yang telah diulas sebelumnya dengan penulis yaitu tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Namun, dalam penelitian ini yang akan menjadi arah kajian penulis ialah partisipasi masyarakat pada pemilu dalam sudut pandang preferensi masyarakat saat pemilihan umum dan seperti apa cara masyarakat Desa Banjardawa berpartisipasi pada saat proses pemilihan umum Kepala Daetah tahun 2020. Hal tersebut karena penulis ingin mendalami dari sudut pandang penulis lainnya yaitu terkait bagaimana preferensi politik masyarakat saat pemilu tahun 2020 dan seperti apa cara masyarakat dalam berpartisipasi politik di Pilkada tahun 2020. Dimana pada penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji partisipasi politik masyarakat dilihat dari sisi perangsang atau pendorong masyarakat ikut berpartisipasi saat pemilu.

Studi ini akan membahas terkait pola partisipasi masyarakat saat pilkada di Kabupaten Pemalang di tahun 2020. Pada pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon bupati. Pasangan calon bupati yang pertama yaitu pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono. Pasangan pertama tersebut diusung oleh partai PDIP dan Golkar. Pasangan calon bupati yang kedua yaitu Mukti Agung Wibowo dan Mansyur Hidayat. Pasangan calon bupati tersebut diusung oleh partai Gerindra dan PPP. Pasangan calon bupati yang ketiga yaitu pasangan Iskandar Ali Syabana dan Akhmad Agus Wardhana yang diusung oleh PKB dan PKS. Pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan calon Mukti Agung Wibowo dan Mansyur Hidayat dengan memperoleh suara sebanyak 338,905 atau 45,36% (Pemalang, 2020).

Kajian tersebut akan dilaksanakan di Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Desa Banjardawa merupakan desa yang menjadi pusat ekonomi di Kecamatan Taman. Hal tersebut karena banyak sekali masyarakat desa sekitar yang berniaga atau berdagang di pasar Desa Banjardawa dan di sepanjang jalan Banjardawa. Hal tersebut pula yang membuat masyarakat Desa Banjardawa sebagian besar berprofesi sebagai pedagang (Banjardawa, 2023). Selain itu, keunikan lainnya pada pilkada di tahun 2020 yaitu adanya krisis kesehatan dunia yaitu penyebaran virus covid-19. Keputusan pilkada serentak di sebagian daerah Indonesia sempat menjadi pro kontra karena saat itu Indonesia masih dilanda wabah Covid-19. Namun, partisipasi memilih masyarakat Desa Banjardawa cukup tinggi saat pilkada 2020. Daftar pemilih tetap di Desa Banjardawa ada 3.691 tetapi yang berpartisipasi hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya 2.800 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa partisipasi memilih masyarakat Desa Banjardawa sebesar 75%.

Selain mengkaji persoalan preferensi politik partisipasi pemilih, pada kajian penelitian ini juga akan mengkaji bentuk pola partisipasi politik apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjardawa. Partisipasi politik sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi politik aktif sendiri tidak hanya berbentuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi juga mereka yang aktif terlibat dalam aktivitas politik seperti menjadi tim sukses atau bahkan menjadi penyelenggara pemilu seperti menjadi ikut bagian kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) atau pengawas pemilu. Pada kajian ini lah akan mengkaji seperti apa preferensi atau alasan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pilkada tahun 2020 dan akan mengkaji bagaimana pola partisipasi masyarakat desa banjardawa saat pilkada 2020.

Kajian terkait partisipasi politik masyarakat desa saat pilkada menjadi sebuah kajian menarik bagi penulis. Studi yang dikaji penulis berjudul “Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Pematang Jaya : Studi Kasus Di Desa Banjardawa”. Kajian tersebut dinilai sangat perlu dikaji karena memiliki arti penting dalam bidang politik baik dalam teoritis atau dalam hak praktik. Urgensi kajian topik ini pada bidang akademik ilmu politik yaitu menjadi sebuah referensi atau rujukan penelitian yang serupa agar bisa mengembangkan ilmu politik yang termasuk dalam ilmu yang dinamis. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk praktisi politik. Praktisi politik baik itu politisi atau para lembaga atau *stakeholder* pemilu. Praktisi politik bisa mengetahui bagaimana pola partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa yang pastinya akan bermanfaat untuk para praktisi dalam menyusun aturan baru terkait pemilu misalnya untuk lembaga penyelenggara pemilu dan untuk politisi bisa untuk menjadi bahan strategi saat tahun pemilu yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Apa preferensi politik masyarakat di Desa Banjardawa pada pilkada 2020 di Kabupaten Pematang Jaya?
2. Bagaimana pola masyarakat Desa Banjardawa dalam memperjuangkan preferensi politik tersebut pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa apa aspirasi atau preferensi masyarakat di Desa Banjardawa saat pilkada di Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020
2. Untuk menganalisa bagaimana cara masyarakat Desa Banjardawa berpartisipasi dalam proses pelaksanaan di pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini manfaat yang akan diperoleh yaitu sebagai berikut ;

1. Memberikan sumbangan dalam pengembangan konseptual dan teori pada kajian ilmu politik.
2. Menambah dan memperkaya literatur pada bidang partisipasi politik masyarakat desa.

Selain itu, manfaat secara praktis yang didapat atas penelitian ini yaitu sebagai berikut ;

1. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau rekomendasi atas permasalahan partisipasi politik pada masyarakat desa.
2. Bagi Masyarakat, dapat membantu memecahkan permasalahan terkait permasalahan partisipasi politik pada masyarakat di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.
3. Bagi peneliti lain, dapat menjadikan rujukan atau referensi penelitian yang akan datang serta dapat menjadi penyempurnaan sebelumnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian skripsi ini, sebelum penulis melakukan studi penelitian penulis menggali informasi dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis atau disebut *literatur review*. Adapun tujuan dari mengkaji penelitian terdahulu adalah agar dapat melihat sudut pandang kajian yang berbeda sehingga penulis dapat memposisikan hasil penelitiannya. Topik terkait partisipasi politik telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Topik tersebut akan dikaji dalam dua tema yaitu preferensi politik dan partisipasi politik.

##### **1. Preferensi Politik**

Topik preferensi politik masyarakat sudah banyak dikaji oleh para sarjana yang berfokus pada perspektif sosiologis. Kajiannya berupa apa preferensi atau alasan atau bahkan kepentingan masyarakat saat berpartisipasi di pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari studi yang berjudul "*Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun*" oleh Agus Prasetya (2018). Preferensi politik berkaitannya dengan perilaku politik. Perilaku politik merupakan keputusan pilihan dalam aktivitas politik yang meliputi keseluruhan tingkah laku para aktor politik. Selanjutnya dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa preferensi masyarakat dalam Pilkada di Madiun dipengaruhi oleh adanya imbalan atau dapat disebut bahwa "ada suara harus ada imbalannya". Imbalan yang dimaksud yaitu pemilih dapat mendapatkan sesuatu dari dirinya yang telah memberikan suara untuk calon. Bentuk imbalan dapat berupa imbalan langsung seperti money politic atau janji-janji yang besok akan dibayar oleh calon walikota atau dalam arti lain tidak ada yang gratis dalam Pilkada (Prasetya, 2018).

Preferensi politik diatas merupakan secara umum masyarakat umum tetapi mungkin berbeda dengan preferensi politik untuk genre perempuan. Studi preferensi politik

perempuan dilakukan oleh Yoserizal dan Asrinaldi (2009) dengan judul “*Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum*”. Preferensi politik perempuan Minang kota dipengaruhi oleh pilihan masa lalunya. Perempuan di Minang Kota secara konsisten tetap mendukung partai politik yang didukungnya saat pemilihan sebelumnya. Selain itu mereka juga berpegang teguh oleh figur tokoh yang ada dalam di parta politik tersebut. Oleh sebab itu mereka sebenarnya kesulitan dengan pilihan harus memilih partai politik atau kandidat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan intinya preferensi politik perempuan Minang di Kota memiliki karakteristik preferensi politik asimetrical. Preferensi politik asimetrical memiliki arti bahwa preferensi politik para perempuan minang di kota tidak mengacu pada tujuan yang sesungguhnya. Mereka berharap kepada partai politik yang juga sebagai mitra dari Pemerintah Daerah agar dapat mengendalikan program-program Pemerintah Daerah dan Mereka peroleh keuntungan atas hal tersebut (Asrinaldi, 2009).

Selain itu, preferensi politik pemilih pemula juga menjadi topik yang unik untuk dibahas. Dalam studi yang dilakukan oleh Nurul Fitriana Harsyaf (2022) dengan judul “*Preferensi Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba*”. Preferensi pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba memiliki tiga pendekatan indikator yaitu sosiologis, psikologis, dan rasional. Secara pendekatan sosiologis pemilih pemula Kabupaten Bulukumba menentukan pilihan cenderung mengikuti lingkungan terdekat yaitu keluarga. Mereka akan memilih calon yang dipilih oleh keluarga atau orang tua. Selanjutnya jika dilihat dari indikator psikologis para pemilih pemula memilih calon Kepala Daerah akan memilih calon kepala daerah berdasarkan identitas dan visi misi dari kandidat. Selanjutnya jika dilihat dari indikator rasional para pemilih pemula ialah saat kandidat berkampanye. Para pemilih pemula melihat visi misi dan program pasti yang akan kandidat lakukan seperti memberikan bantuan pendidikan, sarana dan prasarana olahraga saat kampanye kandidat. Pemaparan atau janji kampanye yang dirasa rasional untuk direalisasikan tersebutlah yang dapat mempengaruhi preferensi politik (Harsyaf, 2022).

Selain itu preferensi masyarakat desa pada pemilihan umum kepala desa juga menjadi hal yang sudah banyak dikaji oleh para sarjana terdahulu. Salah satunya yaitu studi yang dilakukan oleh Ihwan Sormin, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution (2020) dengan judul *Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa*. Preferensi politik masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator. Indikator yang paling mempengaruhi yaitu adanya perangsang berupa uang atau lainnya yang diberikan oleh calon kepala desa.

Selain indikator perangsang ada juga indikator yang mempengaruhi preferensi politik masyarakat Desa Huta Baru ialah adanya karakteristik dari calon kepala desa sendiri. Hal tersebut karena masyarakat menilai bahwa karakter seorang pemimpin yang baik dapat menciptakan kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Indikator preferensi politik masyarakat yang lain yaitu sifat kepedulian sosial yang dimiliki oleh calon kepala desa. Hal tersebut karena masyarakat menilai sifat kepedulian sosial yang dimiliki calon kepala desa dapat menciptakan ketentraman dan mementingkan kepentingan masyarakat (Sormin, Siregar, & Nasution, 2020).

Selanjutnya penelitian dilakukan terkait preferensi politik masyarakat yang mengikuti sebuah aliran atau golongan. Salah satunya yaitu studi yang dilakukan oleh Muhammad Armin Arzyad dan M. Basyir Syam (2014) dengan judul "*Preferensi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah di Majene Dalam Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011*". Pengikut Tarekat Qadiriyyah mendukung salah satu pasangan calon Bupati. Pada Pilkada di Kabupaten Majene di tahun 2011 diikuti oleh empat pasangan calon kepala daerah. Namun, diantara empat pasangan calon kepala daerah jamaah atau pengikut tarekat qadiriyyah mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Pasangan yang didukung oleh pengikut tarekat qadiriyyah adalah pasangan calon Kalma Katta dan Fahmi Massiara. Sikap mendukung pengikut tarekat qadiriyyah untuk mendukung pasangan calon tersebut diambil oleh guru tarekat yang menjadi pemimpin tarekat tersebut yaitu H. Ilham Shaleh. Faktor yang menjadi alasan mengapa pengikut tarekat qadiriyyah mendukung pasangan calon Kalma Katta dan Fahmi Massiara adalah karena kedekatan interpersonal dengan pemimpin mereka yaitu H. Ilham Shaleh. Oleh karena itu para pengikutnya mengikuti pimpinan tarekat untuk mendukung pasangan Kalma Katta dan Fahmi Massiara (Syam, 2014).

## 2. Partisipasi Politik

Topik studi terkait partisipasi politik sudah banyak dikaji oleh para sarjana terdahulu yang berfokus pada perspektif sosiologis. Kajiannya berupa bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat saat pemilihan umum atau partisipasi masyarakat dalam memutuskan sebuah kebijakan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai studi terdahulu. Salah satunya studi yang dilakukan oleh Primandha Sukma Nur Wardhani (2018) dengan judul "*Partisipasi Politik Pemilihan Pemula dalam Pemilihan Umum*". Hasil studi tersebut bahwa bentuk partisipasi politik pemilih pemula itu seperti pemberian suara, kampanye, dan berbicara persoalan politik. Adapun faktor pendorong partisipasi politik bagi pemilih

pemula yaitu adanya perangsang politik. Namun, ada juga faktor penghambat partisipasi politik bagi pemilih pemula seperti kesibukan, perasaan tidak mampu, bahkan larangan dari pihak keluarga (Khalehar, 2017).

Studi penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Eta Yuni Lestari dan Nugraheni Arumsari (2018) dengan judul "*Partisipasi Politik Pemilih pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang*". Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula saat pemilihan walikota Semarang masih banyak yang belum memiliki kesiapan yang maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya sebagian pemilih pemula yang melakukan sebuah persiapan seperti menentukan pilihan dengan mencari tahu visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan calon walikota Semarang. Adapun faktor yang memengaruhi pilihan pemilih pemula di Kota Semarang yaitu kejelasan dan aktualisasi calon terhadap visi dan misi, latar belakang calon, faktor sosial atau faktor kedekatan calon dengan masyarakat, faktor kinerja bagi calon walikota *incumben*, kinerja calon pada pekerjaannya (track record), dan faktor karakter calon (Lestari & Arumsari, 2018).

Studi selanjutnya terkait partisipasi politik masyarakat saat pemilihan umum yaitu studi yang dilakukan oleh Ni Ketut Arniti (2020) dengan judul "*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar*". Hasil studi tersebut menghasilkan bahwa partisipasi politik masyarakat Denpasar saat pemilihan legislatif di tahun 2014 memiliki partisipasi atau antusias yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor mobilisasi yang dilakukan oleh calon anggota legislatif membuat masyarakat Kota Denpasar berpartisipasi politik tinggi. Selain itu, relasi aktor politik yang memiliki jabatan pemerintahan juga menjadi faktor tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Denpasar. Faktor lainnya yaitu adanya *punishment* atau *reward* untuk masyarakat (Arniti, 2020).

Partisipasi politik yang aktif juga ditunjukkan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tegal. Hal tersebut dikaji oleh Regina Singestecia, Eko Handoyp, dan Noorocmat Indaryanto (2018) dengan judul "*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*". Hasil dari studi tersebut ialah partisipasi politik masyarakat tionghoa dalam pilkada di Kabupaten Tegal cukup aktif. Bentuk partisipasi politik yang banyak yaitu pemberian suara saat hari pemilihan. Pencapaian pemberian suara masyarakat Tionghoa di

Kelurahan Slawi Wetan saat Pilkada Kabupaten Tegal mencapai 95,58%. Partisipasi politik masyarakat Tionghoa Kelurahan Slawi Wetan memiliki tingkat partisipasi *delegate power* yang artinya kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara negara dalam pengambilan sebuah keputusan. Faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan karena mereka memiliki kesadaran bahwa menggunakan hak pilih adalah kewajiban sebagai warga Indonesia (Singestecia, Handoyo, & Isdaryanto, 2018).

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terkait pemilihan umum saja tetapi juga terkait partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan publik. Salah satunya studi yang dilakukan oleh Syakwan Lubis (2007) dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*". Hasil studi tersebut ialah bahwa untuk mewujudkan kebijakan publik yang representatif maka partisipasi masyarakat yang aktif sangat diperlukan mengingat perilaku eksekutif dan legislatif sering meninggalkan aspirasi masyarakat (Lubis, 2007).

Berbagai penemuan studi penelitian terdahulu oleh para sarjana yang telah direview oleh penulis dapat diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan dengan topik penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dari beberapa artikel diatas dapat ditarik kesimpulan bawa para sarjana terdahulu lebih banyak mengkaji partisipasi politik masyarakat dari sisi faktor atau alasan masyarakat berpartisipasi dalam aktivis politik baik aktivitas politik seperti aktif di pemilu atau berpartisipasi dalam memutuskan sebuah kebijakan publik.

Studi penelitian diatas memiliki persamaan dengan kajian yang akan penulis kaji yaitu terkait partisipasi politik masyarakat. Namun, hal yang membedakan ialah penulis akan mengkaji terkait pola partisipasi politik masyarakat di Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Pilkada yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 membuat partisipasi memilih masyarakat Desa Banjardawa lebih sedikit dari daftar pemilih tetap. Hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian studi ini terkait alasan apa yang membuat masyarakat Desa Banjardawa semangat dalam memberikan hak suaranya. Selain itu, dalam kajian studi ini juga akan mengkaji terkait seperti apa pola dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2020.

## **F. Kerangka Teori**

Pada bagian ini akan dipaparkan teori secara singkat terkait topik studi penelitian yang akan penulis kaji. Teori ini nantinya akan digunakan untuk memahami dan menganalisa hasil penelitian dan jawaban atas topik masalah yang akan dikaji. Berikut teorinya :

### **A. Definisi Konseptual**

#### **1. Preferensi Pemilih**

Preferensi merupakan sebuah kata diambil dari kata *prefer* yang memiliki arti paling disukai atau dapat dimaknai ketetapan individu dalam memutuskan sebuah pilihan terhadap suatu obyek. Preferensi secara umum diartikan sebagai sebuah pilihan seseorang apakah dirinya suka atau tidak terhadap sesuatu baik barang ataupun jasa. Preferensi sebagai suatu kesukaan seseorang terhadap barang atau jasa tersebut (Harsyaf, 2022).

Pada topik studi ini preferensi didefinisikan sebuah pilihan para pemilih dalam menentukan pilihan ke salah satu calon kepala daerah. Para pemilih akan memilih satu calon dari tiga calon yang berlaga di pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020. Pasangan calon bupati yang menjadi disukai atau diprioritas dari pasangan calon lainnya itu menjadikan sebuah preferensi pemilih.

Preferensi pemilih seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor atau pendekatan. Menurut Paul F. Lazarsfeld faktor atau pendekatan yang memengaruhi preferensi pemilih ialah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasionalis (Harsyaf, 2022). Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti keluarga, desa, kota, dan lain sebagainya. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan atau faktor yang dipengaruhi oleh identifikasi diri sendiri atas obyek yang akan dipilih seperti hasil identifikasi diri kita terhadap pasangan calon kepala daerah yang bertarung. Pendekatan rasional yaitu pendekatan yang melihat kegiatan memilih sesuatu berdasarkan kalkulasi untung atau rugi.

#### **2. Partisipasi Politik**

Pada sebuah analisis studi politik modern topik partisipasi politik menjadi sebuah topik masalah yang penting dan belakangan ini banyak dikaji oleh sarjana khususnya dalam hubungannya dengan negara berkembang. Partisipasi politik secara umum

didefinisikan sebuah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih calon pimpinan negara dalam pemilihan umum atau pemilu, ikut rapat umum, menjalin hubungan atau melakukan *lobbying* kepada anggota legislatif serta aktifitas politik lainnya. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau bahkan kekerasan, dan legal atau ilegal (Budiardjo, 2008).

Konsep partisipasi politik pada negara demokrasi bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui sebuah kegiatan bersama untuk menetapkan sebuah tujuan dan masa depan masyarakat. Penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik setiap individu. Partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi politik aktif merupakan kategori bentuk partisipasi dimana individu aktif dalam melakukan kegiatan politik seperti ikut berpartisipasi dalam kampanye, aktif mengusulkan kritik dan saran ke pemerintah. Sementara itu, partisipasi politik pasif sebaliknya dari partisipasi aktif dimana setiap individu hanya melaksanakan semua keputusan pemerintah (Ram10).

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pilihan Rasional (*Rational Choice*)**

Dalam ilmu politik pilihan rasional atau *rational choice* merupakan sebuah pendekatan yang sering dilakukan untuk menganalisis perkembangan ilmu politik. Pendekatan pilihan rasional ini menilai bahwa politik dan ekonomi saling berkaitan khususnya dalam memutuskan kebijakan publik. Dalam pendekatan pilihan rasional ini juga menilai individu sebagai aktor politik yang memiliki peran sangat penting. Manusia sebagai makhluk rasional yang pastinya selalu memiliki tujuan atau kepentingan untuk diri sendiri. Oleh karena itu manusia akan membuat sebuah pilihan rasional yang dinilai pilihan tersebut menguntungkan kepentingan dirinya.

Adapun substansi dasar dari doktrin pendekatan pilihan rasional ini dirumuskan oleh James B. Rule sebagai berikut (Budiardjo, 2008).

- a. Tindakan manusia pada dasarnya ialah sebuah “instrumen” agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang sedikit banyak.

Tujuan tersebut tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan setiap individu.

- b. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungan.
- c. Proses-proses sosial berskala besar merupakan hasil dari sebuah kalkulasi seperti itu.

Aplikasi penerapan teori ini sangatlah kompleks dimana model-model dan metode ekonomi pastinya diaplikasi terutama dalam penelitian mengenai pola-pola voting dalam pemilihan umum atau pemilu, pembentukan kabinet, sistem pemerintahan parlementer, badan-badan legislatif, dan pendirian partai politik dan kelompok kepentingan. Teori *Rational Choice* tersebut telah mendorong usaha kuantifikasi pada ilmu politik dan mengembangkan sifar empiris yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya.

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson ialah sebuah kegiatan masyarakat yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa dilakukan individu atau kelompok, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2008).

Partisipasi politik dibedakan menjadi dua kategori yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Selain itu partisipasi politik juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah pelaku yaitu partisipasi politik individu dan partisipasi politik kolektif. Partisipasi politik kolektif juga dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi kolektif konvensional seperti halnya pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif tidak konvensional (agresif) seperti halnya huru hara (Ram10). Dalam sifatnya partisipasi politik juga dibedakan menjadi partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan. Perbedaan partisipasi yang dimobilisasikan dan partisipasi otonom adalah lebih tajam dalam prinsip daripada realitas. Dalam hal perbedaan secara kriteria kategori-kategori antara partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan agak bersifat arbitrer (Samuel P. Huntington, 1994).

Adapun untuk pola partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dibedakan menjadi lima bentuk pola partisipasi yaitu kegiatan pemilihan,

*lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan. Berikut ini penjelasan terkait pola partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.

### 1. Kegiatan Pemilihan

Pada kegiatan pemilihan ini tidak hanya mencakup suara saja tetapi juga sumbangan-sumbangan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah hal yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Oleh karena itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian tersebut seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lainnya.

### 2. *Lobbying*

Kegiatan *lobbying* tersebut merupakan upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pemimpin-pemimpin politik dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka terkait persoalan yang menyangkut banyak orang. Adapun untuk contoh *lobbying* adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

### 3. Kegiatan Organisasi

Pada partisipasi politik berupa kegiatan organisasi merupakan partisipasi yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi yang tujuan utamanya adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi tersebut dapat memusatkan usaha-usahnya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada sebuah persoalan-persoalan umum yang sangat beragam. Menjadi, anggota sebuah organisasi yang seperti itu merupakan satu bentuk partisipasi politik yang tidak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya-upaya organisasi untuk memengaruhi pemerintahan. Keanggotaan yang tidak aktif dapat dikatakan sebagai partisipasi melalui orang lain.

#### 4. Mencari Koneksi (*contacting*)

Kegiatan mencari koneksi merupakan sebuah tindakan perorangan yang ditunjukkan untuk pejabat pemerintah dan biasanya memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

#### 5. Tindakan Kekerasan (*violence*)

Tindakan kekerasan dapat juga disebut sebagai bentuk partisipasi politik karena tindakan kekerasan ialah kegiatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan atau proses yang menimbulkan kerugian fisik terhadap orang dan harta benda disekitar. Tindakan tersebut dinilai menjadi sebuah tindakan ilegal dimata masyarakat. Oleh sebab itu pengguna kekerasan biasanya mencerminkan motivasi-motivasi yang kuat. Tindakan kekerasan dapat digunakan untuk mengubah pimpinan politik dengan cara kudeta dan pembunuhan, memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara seperti huru hara dan pemberontakan, dan mengubah seluruh sistem politik dengan cara melakukan sebuah revolusi.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berarti bahwa data yang akan diuraikan berbentuk kata-kata atau penjelasan dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendasar dan natural serta dilakukan langsung di lapangan (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami sebuah fenomena terkait hal apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti tindakan, perilaku, persepsi, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang dilakukan secara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa yang alamiah dan dengan metode ilmiah (Moleong, 2007).

Pada penelitian yang akan ditulis ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang artinya bahwa peneliti akan melakukan studinya dengan turun langsung ke lapangan pada objek yang akan diteliti. Peneliti akan berpartisipasi dan berinteraksi langsung dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami serta mendalami sebuah fenomenal yang akan dikaji. Penelitian lapangan ini akan menghasilkan sebuah data yang lebih akurat dan jelas karena memperoleh data langsung dari sumber selaku objek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi studi kasus. Pendekatan tersebut didefinisikan sebagai sebagai sebuah pendekatan dimana penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Sebagai sebuah metode studi kasus ini kajian penelitian ini akan fokus pada sebuah kasus yang spesifik dimana seperti halnya yang menjadi ciri khas dari pendekatan studi kasus ialah sebuah penelitian yang mengidentifikasi kasus yang spesifik (Creswell, 2023).

Pada studi ini penulis mengambil jenis penelitian kualitatif yang berbasis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Penulis akan mengkaji fokus terkait pola partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Alasan kasus ini dikaji ialah karena partisipasi politik masyarakat desa menjadi hal yang unik karena umumnya partisipasi masyarakat desa sangat minim. Namun, masyarakat Desa Banjardawa memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi saat Pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 yaitu sebesar 75%. Selain itu, di tahun yang sama 2020 Indonesia juga sedang dilanda krisis kesehatan yaitu adanya pandemi covid -19 tetapi hal tersebut tidak menurunkan partisipasi masyarakat Desa Banjardawa.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Dalam sebuah penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata atau tindakan sedangkan untuk data tambahannya yaitu berupa dokumen dan sebagainya (Moleong, 2007). Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi tempat diperolehnya data. Sumber dan jenis data secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan rinciannya:

### **a. Data Primer**

Dara Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan teknik pengambilan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya. Pada studi penelitian penulis akan peroleh data dengan cari wawancara dari informan atau narasumber serta observasi yang dilakukan di Desa Banjardawa.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumentasi dan arsip resmi. Pada studi ini penulis akan menggunakan data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, website desa, dan dokumen lainnya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menunjang hasil penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang relevan didapatkan dalam penelitian tentu diuji keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi data agar data tersebut valid. Triangulasi dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **a. Observasi**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipasi. Observasi partisipasi yaitu teknik pengamatan secara langsung di lapangan dengan melibatkan dirinya pada masyarakat yang akan dikaji. Hal tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh dan mendalam tentang topik penelitian yang akan dikaji. Peneliti akan mengkaji perilaku individu dalam kehidupan sosial. Penelitian akan turun langsung di Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang sebagai objek observasi terkait pola partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung bersama sumber data primer melalui dialog secara lisan baik langsung atau tidak langsung. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan masyarakat Desa Banjardawa secara umum. Masyarakat yang menjadi narasumber yaitu mereka yang aktif berpartisipasi baik aktif memilih, aktif menjadi penyelenggara pemilu, dan sebagai tim sukses. Para narasumber akan diberi pertanyaan terkait alasan dirinya turut berpartisipasi politik saat pilkada dan dalam bentuk apa dirinya berpartisipasi dan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa. Pada penelitian ini terdapat 22 narasumber yang menjadi data lapangan peneliti dalam menyusun penelitian ini.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara dalam mengumpulkan data dari dokumen dan arsip penting sesuai kebutuhan penelitian untuk selanjutnya ditelaah informasi guna mendukung penelitian. Jadi dokumentasi tidak hanya berupa foto tetapi juga dalam bentuk dokumen atau arsip guna untuk dianalisa. Pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan dokumen dari Desa Banjardawa yaitu dari website pemerintah desa untuk mendapat data tentang kependudukan desa Banjardawa. Selain itu, penulis juga akan peroleh informasi dari website dari penyelenggara pemilu yaitu KPU guna memperoleh data pemilihan pilkada 2020 Kabupaten Pematang Jaya.

## **4. Teknik Analisa Data**

Setelah mendapatkan sumber data yang diperlukan maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang ada. Dalam teknik analisis data ada beberapa langkah. Data yang sudah terkumpul maka akan ditelaah dan diteliti untuk diperiksa kebenarannya dan setelah itu data tersebut diteruskan ke reduksi data. Reduksi data memiliki tujuan untuk memproses sistematisasi untuk menemukan data pokok yang sangat berguna untuk penulisan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu dalam melanjutkan data yang sudah diterima dan terkumpul akan dianalisa dengan cara metode deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara diproses segala fokus penemuan yang terjadi lalu dianalisa dan disajikan segala data yang didapat dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan. Berikut langkah-langkah peneliti menganalisa data yang didapat;

### **a.) Reduksi Data**

Reduksi Data memiliki fungsi atau tujuan agar peneliti dapat mendapatkan hal pokok serta merangkum segala hal penting sehingga dapat digambarkan dengan jelas yang nantinya memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menulis data selanjutnya.

### **b.) Penyajian Data**

Analisa data selanjutnya ialah menyajikan data dalam bentuk penyajian data yang dilihat dari berbagai bentuk seperti uraian singkat, grafik, atau bentuk narasi. Proses penyajian data ini memiliki tujuan untuk merencanakan segala sesuatu pekerjaan yang disusun dan direncanakan selanjutnya. Setelah data diproses dan di reduksi data maka langkah selanjutnya peneliti menyajikan data. Dalam menyajikan data dilakukan dalam

berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dilakukannya penyajian data diharapkan dapat memahami apa yang terjadi dalam fokus pencarian data penelitian dan dapat membuat rencana kerja berdasarkan apa yang telah didapat dan dipahami dalam analisis data tersebut (Sugiyono, 2010).

### **c.) Penarikan Kesimpulan**

Langkah selanjutnya dalam menganalisa data yaitu membuat kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan penelitian disertai dengan verifikasi data keseluruhan ditambah dengan proses pengumpulan keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan sebuah penelitian yang juga menjadi tugas akhir atau skripsi ini penulis membagi skripsi menjadi lima bab yang akan disusun secara sistematis seperti berikut :

Bab 1 adalah bab yang berisi tentang pemaparan atau penjelasan latar belakang pola partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah atau pilkada. Fokus penelitian ini yaitu kepada masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya masyarakat Desa Banjardawa terkait tentang seperti apa pola partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat Pilkada Kabupaten Pemalang 2020 yang lalu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan atau rumusan masalah bagaimana aspirasi atau preferensi partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa Kecamatan Taman pada Pilkada 2020 dan bagaimana cara menyalurkan aspirasi masyarakat menyalurkan aspirasinya. Bab 1 ini membahas partisipasi politik setiap individu berdasarkan teori pilihan rasional dan partisipasi politik. Pada bab ini pula akan menjelaskan terkait harapan peneliti yang tertuang dalam tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga disertakan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini serta disertakannya penelitian sebelumnya yang tema atau objek penelitiannya serupa dan itu menjadi dasar lahirnya penelitian ini.

Bab II akan berisi sebuah landasan teoritis dimana pada bab ini kerangka teoritis sebagai dasar untuk skripsi terkait partisipasi politik masyarakat. Pada penelitian preferensi politik masyarakat menggunakan teori pilihan rasional dan partisipasi politik. Penulis merujuk teori pilihan rasional dan partisipasi politik pada buku Miriam Budiardjo (2008) dan buku Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) serta buku penunjang lainnya yang terkait partisipasi politik.

Bab III nantinya akan membahas gambaran umum terkait objek penelitian yaitu terkait Kabupaten Pemalang khususnya Desa Banjardawa. Gambaran umum yang nantinya akan di gambarkan secara umum seperti hal sejarah desa Banjardawa, karakteristik Desa Banjardawa, demografi, geografis dan visi misi Pemerintah Desa Banjardawa. Selanjutnya dalam gambaran umum ini mencoba menggambarkan karakteristik masyarakat Desa Banjardawa.

Bab IV akan dilanjutkan dengan menganalisa dan memaparkan hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menjawab pertanyaan pokok terkait politik yaitu preferensi Politik Masyarakat Kabupaten Pemalang saat pilkada 2020 khususnya masyarakat desa Banjardawa. Pemaparan hasil penelitian terkait apa saja yang menjadi sebuah preferensi politik saat Pilkada 2020 atau alasan masyarakat memilih salah satu pasangan. Faktor apa saja yang memengaruhi pilihan masyarakat Kabupaten Pemalang ketika pilkada tahun 2020 lalu. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori perilaku dan partisipasi politik milik Ramlan Subakti, Dalam teori perilaku politik Ramlan Subakti menyebut ada empat faktor yang memengaruhi perilaku politik. Empat faktor tersebut yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian, dan lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Selanjutnya ada beberapa pendekatan yang dijadikan sebuah alasan preferensi politik yaitu pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional.

Bab V akan berisi lanjutan pembahasan terkait preferensi politik masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya masyarakat desa Banjardawa saat pilkada tahun 2020. Dalam bab ini akan memaparkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen pendukung lainnya terkait penelitian ini. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti.

Bab VI akan berisi tentang penutup beserta kesimpulan dari beberapa pembahasan bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan preferensi politik masyarakat Kabupaten Pemalang (Studi partisipasi masyarakat desa banjardawa Kecamatan Taman saat Pilkada 2020) sesuai dengan teori dan hasil penelitian berupa wawancara dengan berbagai pihak yang beesangkutan.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

Pada bab 2 ini akan menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan untuk membantu peneliti menggali dan menganalisis data untuk menjawab persoalan penelitian atau menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan dua teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kedua teori tersebut ialah pertama teori pilihan rasional atau *rational choice* dan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.

Pada teori pertama yaitu teori pilihan rasional atau *rational choice* digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang pertama yaitu terkait preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pematang Jaya. Adapun alasan peneliti menggunakan teori tersebut untuk membantu menjawab dan menganalisa rumusan masalah pertama karena masyarakat dalam menentukan pilihannya di Pilkada tahun 2020 lalu pastinya ada sebuah alasan yang rasional. Setiap manusia pastinya dalam menentukan pilihannya ada sebuah alasan yang kuat mengapa dirinya harus memilih atau melakukan itu dan alasan tersebut pastinya memiliki sebuah alasan rasional. Hal tersebutlah yang membuat peneliti menggunakan teori pendekatan pilihan rasional tersebut. Peneliti ingin menganalisa apakah preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa saat Pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 sudah menjadi sebuah pilihan rasional atau belum.

Pada teori kedua untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait pola partisipasi masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020, peneliti menggunakan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Adapun alasan peneliti menggunakan teori partisipasi politik tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana pola partisipasi politik masyarakat dengan melihat bentuk pola partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Apakah partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada di Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 seperti bentuk pola partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.

Dalam menjelaskan BAB II ini nantinya akan dibagi menjadi dua subbab yaitu pertama terkait subbab pilihan rasional atau *rational choice* dan sub bab kedua akan membahas terkait partisipasi politik. Penjelasan pada BAB II ini diharapkan bisa membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan penelitian yang ada dan membuat peneliti dapat menyimpulkan

hasil penelitian yang telah ditemukan. Berikut ini penjelasan secara rinci terkait dua teori yang digunakan peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

#### **A. Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice***

Pendekatan ini telah muncul dan berkembang belakangan setelah pendekatan-pendekatan sebelumnya yang telah mencapai konsesus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam berbagai macam pandangan. Pendekatan pilihan rasional ini lahir dalam dunia yang bebas dari peperangan besar yang telah berlangsung selama empat dekade. Pada era tersebut seluruh dunia berlomba-lomba membangun ekonomi untuk negaranya. Banyak negara baru yang menyusun rencana-rencana pembangunan sedangkan negara-negara kaya turut ikut membantu melalui berbagai macam organisasi internasional dan kerja sama bilateral.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari teori pilihan rasional berasal dari sebuah ekonomi neoklasik. Debra Friedman dan Michael Hecter telah mengumpulkan dan menyimpulkan yang menjadi sebuah kerangka teori pilihan rasional. Fokus dari teori pilihan rasional ini adalah para aktor. Para aktor dinilai memiliki tujuan atau mempunyai intensionalitas yaitu dimana para aktor mempunyai tujuan-tujuan yang dituju dalam tindakan-tindakan mereka. Teori pilihan rasional tidak berkenaan dengan apa-apa pilihan itu atau sumbernya tetapi yang penting adalah fakta bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan hierarki pilihan seorang aktor (Ritzer, 2012).

Pada akhir tahun 1980-an ekonomi sangatlah penting dan juga sangat memengaruhi ilmu sosial lainnya. Oleh beberapa para ekonom dunia menyebutnya ini merupakan ekspansi imperialistik ekonomi kedalam berbagai ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan hukum serta biologi sosial (Dogan, 1996). Pada ilmu politik pada umumnya pendekatan ini disebut dengan Pendekatan Pilihan Rasional dan beberapa nama lain seperti pilihan publik dan pilihan kolektif. Selain itu, akhir-akhir ini ada beberapa variasi analisis yang telah mengembangkan satu bidang ilmu politik tersendiri yaitu ekonomi politik. Ada beberapa tokoh yang menganalisis dengan menggunakan pendekatan tersebut. Tokoh tersebut ialah James Buchan an Anthony Downs, Gordon Tullock, dan Machur Olsen.

Para pengikut dari pendekatan ini membun at sebuah kejutan karena Mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi sebuah ilmu yang benar-benar science. Mereka mengatakan bahwa Manusia Politik (*Homo Politicus*) sudah menuju Manusia Ekonomi (*Homo Economicus*) karena melihat adanya keterkaitan erat antara faktor politik dan faktor ekonomi terutama dalam menentukan sebuah kebijakan publik. Mereka percaya bahwa Kita dapat

meramalkan sebuah perilaku manusia dengan cara mengetahui kepentingan-kepentingan dari aktor yang bersangkutan. Para penganut pendekatan ini membuat sebuah simplifikasi yang radikal dan memakai model matematika untuk menjelaskan dan menafsirkan sebuah gejala-gejala politik. Teknik formal yang dilakukan dan dipakai oleh para ahli ekonomi diaplikasikan dalam sebuah penelitian gejala-gejala politik. Metode induktif akan menghasilkan sebuah model-model untuk berbagai tindakan politik.

Politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Manusia sebagai makhluk rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya sebuah kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal tersebut dengan situasi terbatasnya sumber daya dan oleh karena itu ia membuat sebuah pilihan. Dalam menetapkan sebuah sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih dari beberapa alternatif mana yang akan memberikan keuntungan dan kegunaan yang maksimal untuk dirinya. Oleh karena itu banyak dari setiap individu yang menyusun ranking preferensi kepentingannya. Seperti halnya ada pilihan preferensi alternatif A, B, dan C, selanjutnya individu akan meranking pilihan alternatif mana yang lebih baik. Jika sudah menentukan maka individu akan memilih pilihan tersebut dan ia tidak akan terpengaruh oleh hasutan pilihan dari orang lain yang alasannya tidak rasional.

Para pelaku *Rational Action* terutama para politisi, birokrat, dan pemilih, serta aktor ekonomi pada dasarnya memiliki rasa egois dan segala tindakannya berdasarkan pada kecenderungan tersebut. Mereka akan selalu mencari cara yang efisien untuk dapat mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisien tersebut merupakan inti dari *Rational Choice*.

Adapun substansi dasar dari doktrin pendekatan pilihan rasional ini dirumuskan oleh James B. Rule sebagai berikut (Budiardjo, 2008).

- a. Tindakan manusia pada dasarnya ialah sebuah “instrumen” agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang sedikit banyak. Tujuan tersebut tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan setiap individu.
- b. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungan. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor memengaruhi hasil dari perhitungannya.

- c. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal seperti *ratings*, institusi, dan praktik-praktik merupakan sebuah hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin saja akibat dari pilihan yang kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N.

Aplikasi penerapan teori ini sangatlah kompleks dimana model-model dan metode ekonomi pastinya diaplikasi terutama dalam penelitian mengenai pola-pola voting dalam pemilihan umum atau pemilu, pembentukan kabinet, sistem pemerintahan parlementer, badan-badan legislatif, dan pendirian partai politik dan kelompok kepentingan. Namun, ternyata dalam perkembangannya analisis berdasarkan matematika ini menjadi semakin kompleks sehingga membuat ahli matematika sendiri memerlukan sebuah keahlian sendiri untuk memahaminya. Sementara itu, justru beberapa diantaranya tidak lagi menemukan unsur-unsur politiknya.

Pendekatan ini sebenarnya mendapatkan penolakan dari para penganut *structural functionalism* karena pendekatan ini dianggap tidak memerhatikan kenyataan bahwa manusia dalam perilaku politiknya sering kali tidak rasional. Manusia sering kali tidak mempunyai skala preferensi yang tegas dan adil. Manusia dalam menentukan pilihan atau sikapnya ada pengaruh atau pertimbangan lain seperti faktor budaya, agama, sejarah, dan moralitas. Adapun tindakan manusia sering kali terinspirasi oleh apa yang baik dan apa yang mungkin.

Kritik lain untuk pendekatan ini ialah bahwa memaksimalkan kepentingan individu akan cenderung secara tidak langsung telah mengabaikan kesejahteraan orang lain dan seolah-olah juga mengabaikan unsur etika. Lagi pula preferensi manusia bisa saja berubah tiap waktunya. Pendekatan ini dinilai sangat individualistik dan materialistik serta menunjukkan manusia tidak memiliki sifat altruisme (peduli terhadap sesama manusia). Para sarjana lain juga menilai bahwa pendekatan ini sebaiknya menjadi sebuah teori khusus bukan teori yang berlaku untuk umum.

Meski demikian teori pilihan rasional atau *rational choice* tersebut telah berjasa untuk mendorong usaha kuantifikasi pada ilmu politik dan mengembangkan sifar empiris yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Ini merupakan sebuah studi empiris bukan studi abstrak dan spekulatif.

## **B. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik yang meluas merupakan sebuah ciri khas dari modernisasi politik. Dalam masyarakat tradisional pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan sebuah urusan satu golongan elit yang kecil saja. Partisipasi politik di negara-negara berkembang telah memperoleh relevansi yang jauh melampaui lingkup perhatian ahli-ahli ilmu politik akademis.

Partisipasi politik memiliki arti atau makna yang beragam. Apakah partisipasi politik itu hanya sebuah perilaku atau partisipasi politik juga mencakup sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang menjadi syarat mutlak bagi perilaku partisipasi seperti halnya informasi politik, persepsi orang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat memengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah. Jika partisipasi politik itu sebuah perilaku, apakah ia mencakup segala kegiatan yang mempunyai relevansi politisi seperti huru-hara rasial dan pemogokan buruh atau partisipasi hanya kegiatan yang bertujuan memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dan pengambil keputusan oleh pemerintah? Apakah kegiatan-kegiatan yang legal dan yang tidak legal keduanya dapat dianggap sebagai partisipasi politik? Apakah setiap tindakan yang ditunjukkan terhadap pengambilan keputusan pemerintah harus dianggap sebagai partisipasi atau hanya tindakan-tindakan yang efektif saja yang disebut partisipasi politik?

Beberapa tokoh mendefinisikan atau mengartikan partisipasi politik cukup beragam. Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai politik, aktif pada gerakan sosial, dan pergerakan lainnya (Budiardjo, 2008). Sementara itu, definisi partisipasi politik beberapa tokoh antara lain sebagai berikut. Pertama, definisi partisipasi politik menurut Herbert McClosky yang mendefinisikan partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (McClosky, 1972). Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh Pemerintah. Berikut ini aspek

penjelasan definisi partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Samuel P. Huntington, 1994).

Pertama, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan bahwa partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan tetapi tidak dengan sikap-sikap. Ada beberapa kontras dari para sarjana yang menilai partisipasi politik juga mencakup orientasi-orientasi masyarakat terhadap politik serta perilaku politik Mereka yang nyata. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson tidak memasukan komponen subyektif tersebut kedalam definisi partisipasi politik karena pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, dan sikap-sikap politik lainnya terkadang berkaitan dengan tindakan politik tetapi seringkali juga tidak berkaitan. Penelaahan dan pengukurannya sangat memerlukan teknik-teknik yang sangat berbeda dengan yang diperlukan dalam menelaah teknik perilaku saja. Dalam hal ini Samuel P. Huntington dan Joan Nelson ingin mengetahui bagaimana sikap dan perasaan yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik. Hal tersebut, mereka ingin memperlakukan kegiatan politik yang obyektif dan sikap-sikap politik yang subyektif sebagai variabel yang terpisah.

Kedua, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson ingin memperhatikan kegiatan politik warga preman atau lebih tepatnya lagi perorangan-perorangan dalam peranan warga negara preman. Dengan demikian mereka menarik sebuah garis antara partisipasi-partisipasi politik dan orang-orang profesional dibidang politik. Seorang yang tergolong profesional politik ialah Mereka yang pekerjaan utamanya adalah berpolitik atau pemerintahan. Sementara itu, kegiatan politik para partisipasi politik itu terputus-putus atau hanya sebagai sambilan saja yang dikerjakan hanya sewaktu-waktu saja atau sifatnya hanya sekunder.

Ketiga, hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu berkaitan dengan kegiatan yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan tersebut difokuskan kepada pejabat-pejabat umum yang memiliki wewenang untuk mengambil sebuah keputusan dan final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa besarnya partisipasi politik dalam suatu masyarakat sampai tingkat tertentu tergantung pada lingkup kegiatan pemerintah di dalam masyarakat tersebut.

Usaha-usaha untuk memengaruhi sebuah pengambilan keputusan pemerintah yang melibatkan usaha seperti membujuk atau menekan pejabat umum untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara-cara tertentu atau para partisipan dapat berusaha dengan

menggantikan pengambil-pengambil keputusan melalui orang lain yang mereka harapkan akan lebih tanggap terhadap preferensi dan kebutuhan mereka atau masyarakat. Bahkan para partisipasi politik dapat berusaha untuk mengubah aspek-aspek sistem politik dengan tujuan agar pemerintah melalui sistem politik yang baru yang mereka ubah bisa menjadi lebih tanggap terhadap keinginan partisipan. Oleh karena itu, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah sebuah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan permainan politiknya. Hal tersebut merupakan cara-cara untuk memengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Keempat, Mereka mendefinisikan partisipasi politik ialah semua kegiatan untuk memengaruhi pemerintah dengan tidak peduli apakah kegiatan tersebut memiliki sebuah efek atau tidak. Hal tersebut tentunya kontras atau bertolak belakang dengan para sarjana yang hanya memasukan usaha-usaha yang berhasil saja kedalam definisi partisipasi politik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa partisipasi politik tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah tetapi juga melalui kegiatan orang lain diluar si pelaku untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Dalam hal tersebut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menyebut untuk pelaku yang pertama sebagai partisipasi otonom sementara pelaku yang kedua atau yang melalui orang lain disebut partisipasi yang dimobilisasikan.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk diantaranya bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yaitu Partisipasi Politik Di Negara Berkembang membagikan bentuk partisipasi politik seperti berikut.

#### 1. Kegiatan Pemilihan

Pada kegiatan pemilihan ini tidak hanya mencakup suara saja tetapi juga sumbangan-sumbangan kampanye, bekerja dalam suatau pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah hal yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Oleh karena itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian tersebut seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lainnya.

## 2. *Lobbying*

Kegiatan *lobbying* tersebut merupakan upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pemimpin-pemimpin politik dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka terkait persoalan yang menyangkut banyak orang. Adapun untuk contoh *lobbying* adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

## 3. Kegiatan Organisasi

Pada partisipasi politik berupa kegiatan organisasi merupakan partisipasi yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi yang tujuan utamanya adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi tersebut dapat memusatkan usaha-usuhnya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada sebuah persoalan-persoalan umum yang sangat beragam. Menjadi, anggota sebuah organisasi yang seperti itu merupakan satu bentuk partisipasi politik yang tidak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya-upaya organisasi untuk memengaruhi pemerintah. Keanggotaan yang tidak aktif dapat dikatakan sebagai partisipasi melalui orang lain.

## 4. Mencari Koneksi (*contacting*)

Kegiatan mencari koneksi merupakan sebuah tindakan perorangan yang ditunjukkan untuk pejabat pemerintah dan biasanya memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

## 5. Tindakan Kekerasan (*violence*)

Tindakan kekerasan dapat juga disebut sebagai bentuk partisipasi politik karena tindakan kekerasan ialah kegiatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan atau proses yang menimbulkan kerugian fisik terhadap orang dan harta benda di sekitar. Tindakan tersebut dinilai menjadi sebuah tindakan ilegal dimata masyarakat. Oleh sebab itu pengguna kekerasan biasanya mencerminkan motivasi-motivasi yang kuat. Tindakan kekerasan dapat digunakan untuk mengubah pimpinan politik dengan cara kudeta dan pembunuhan, memengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah dengan cara seperti huru-hara dan pemberontakan, dan mengubah seluruh sistem politik dengan cara melakukan sebuah revolusi.

Bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi semuanya dapat berbentuk kegiatan partisipasi legal atau ilegal. Kegiatan penyuapan, intimidasi, dan pemalsuan hasil dari pemilihan umum yang dilakukan oleh orang-orang preman atau bukan orang-orang profesional itu jelas termasuk sebuah partisipasi politik. Hal tersebut sama seperti kegiatan partisipasi dengan cara memberikan suara, menghadiri rapat umum atau rapat partai, dan menempelkan poster-poster kampanye. Selanjutnya, kegiatan *lobbying* seperti pemogokan yang tertib, melakukan demonstrasi, dan *picketing* merupakan sebuah kegiatan yang legal di beberapa negara tetapi juga dilarang di beberapa negara.

## **BAB III**

### **PROFIL DESA BANJARDAWA**

Pada Bab III pada penelitian ini akan berisi terkait gambaran umum Desa Banjardawa yang menjadi tempat fokus kajian penelitian. Pada bab ini nantinya akan membahas dua sub tema yaitu terkait landscape desa banjardawa dan dinamika pilkada di Kabupaten Pemalang. Pada sub bab tersebut juga akan berisi beberapa poin penjelasan yang akan menggambarkan lebih jelas dan detail terkait penjelasan Desa Banjardawa.

Pada Sub bab yang pertama yaitu akan berisi tentang landscape Desa Banjardawa. Hal tersebut berarti bahwa pada sub bab pertama akan berisi terkait gambaran umum Desa Banjardawa yang nantinya akan berisi poin-poin pembahasan seperti pembahasan kondisi geografis dan demografis, struktur sosial ekonomi, dan struktur politik dan pemerintahan. Pada pembahasan sub bab pertama lebih menjelaskan terkait gambaran bagaimana Desa Banjardawa dari berbagai sudut pandang mulai dari sudut geografis dan demografis, sosial ekonomi, dan pemerintahan.

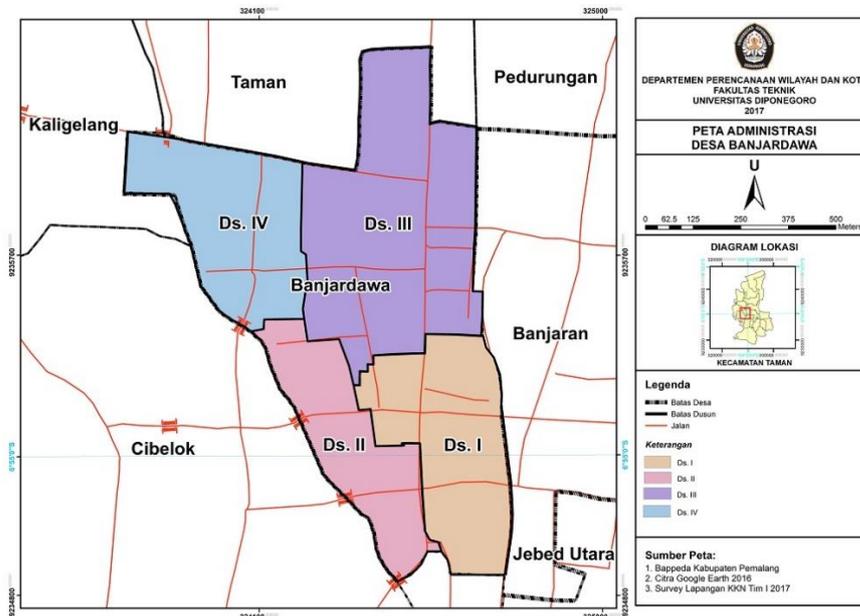
Pada sub bab yang kedua berisi terkait dinamika pilkada di Kabupaten Pemalang. Pada sub bab yang kedua akan berisi dua poin pembahasan yaitu pertama terkait dinamika politik di level Kabupaten. Sementara pada poin kedua akan berisi terkait pembahasan dinamika pilkada di level Desa Banjardawa. Pada pembahasan sub bab kedua akan lebih fokus terkait dinamika pilkada di Kabupaten Pemalang dari level Kabupaten hingga level desa. Hal tersebut akan membantu pembaca untuk mengerti bagaimana dinamika pilkada saat itu di Kabupaten Pemalang.

Berikut ini rincian atau penjelasan terkait gambaran Desa Banjardawa yang menjadi tempat fokus kajian penelitian skripsi. Adapun tujuannya agar pembaca lebih mengerti dan mengetahui bagaimana kondisi Desa Banjardawa saat pilkada tahun 2020 yang lalu.

## A. Landscape Desa Banjardawa

### 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Gambar 1 Peta Desa Banjardawa



Sumber : Website Desa Banjardawa

Desa Banjardawa merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Desa Banjardawa merupakan ibu kota dari Kecamatan Taman. Jika dilihat dari letak astronomisnya Desa Banjardawa terletak di  $109^{\circ} 23' 15''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 55' 35''$  Lintang Selatan. Jika melihat letak geografisnya Desa Banjardawa berdempetan dengan beberapa desa yang ada di sekitarnya. Berikut ini letak perbatasan Desa Banjardawa.

Utara : Desa Taman dan Pedurangan

Selatan : Desa Jebed Utara

Barat : Desa Cibelok

Timur : Desa Banjaran

Kondisi geografis Desa Banjardawa terdiri atas dataran rendah yang memiliki ketinggian rata-rata 6 meter di atas permukaan air laut. Desa Banjardawa memiliki curah hujan dengan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun dan memiliki suhu udara berkisar 25 hingga 30 derajat celsius. Wilayah Desa Banjardawa merupakan daerah dataran rendah yang memiliki jenis tanah alluvial. Jenis tanah tersebut

dimanfaatkan sebagian besar masyarakat Desa Banjardawa untuk lahan pertanian. Luas wilayah Desa Banjardawa sendiri adalah 120.69 Ha. Selanjutnya tanah yang menjadi lahan pertanian masyarakat Desa Banjardawa total seluas kurang lebih 69.935 Ha atau sebesar 58% dari luas tanah keseluruhan Desa Banjardawa. Sementara itu ada sekitar 50.759 Ha tanah digunakan untuk pemukiman, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Penduduk Desa Banjardawa sendiri ada sekitar 5.215 jiwa dengan rincian 2.579 jiwa berkelamin laki-laki dan 2.636 berkelamin perempuan. Adapun untuk jumlah Kepala Keluarga atau KK ada sekitar 1.488 KK yang ada di Desa Banjardawa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statiska bahwa laju pertumbuhan masyarakat Desa Banjardawa sebesar 2,62%. Selanjutnya jumlah rumah yang ada di Desa Banjardawa ada berjumlah 1.056 rumah. Secara administratif wilayah Desa Banjardawa terdiri atas empat dusun yaitu Dusun I yang di kepalai oleh Adi Susanti, Dusun II yang dikepalai Subejo. Dusun III yang dikepalai Dwi Asmino, dan Dusun IV yang dikepalai oleh Iin Nurina Putri. Selanjutnya Desa Banjardawa memiliki delapan Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT).

Desa Banjardawa sendiri memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh warga Desa Banjardawa bahkan warga diluar Desa Banjardawa. Fasilitas umum yang tersedia di Desa Banjardawa yaitu pertama adan dua Sekolah Dasar (SD). Desa Banjardawa memiliki dua SD Negeri yaitu SD Negeri 01 Banjardawa dan SD Negeri 02 Banjardawa. Selain itu, Desa Banjardawa juga terdapat empat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP N 1 Taman, SMP N 2 Taman, SMP PGRI 3 Taman, dan MTS Al Munawaroh. Desa Banjardawa juga memiliki fasilitas umum untuk kegiatan olahraga yaitu sebuah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola yang ada di Desa Banjardawa sendiri sering dijadikan tempat turnamen sepak bola tingkat Kecamatan bahkan Kabupaten (BPS, 2022).

Desa Banjardawa juga memiliki satu faslitis umum di bidang kesehatan yaitu satu puskesmas. Puskesmas Desa Banjardawa sendiri sering dimanfaatkan berobat tidak hanya oleh Masyarakat Desa Banjardawa saja melainkan banyak warga di sekitar Desa Banjardawa yang berobat disitu. Hal tersebut karena di lingkungan Desa Banjardawa tidak semua desa memiliki fasilitas umum berupa puskesmas.

Selain puskesmas ada fasilitas umum yang juga dimanfaatkan oleh warga selain warga Desa Banjardawa yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional di Desa Banjardawa sendiri tergolong pasar tradisional yang cukup besar dan cukup lengkap. Hal tersebut karena memang pasar tradisional Desa Banjardawa menjadi pusat perbelanjaan masyarakat selain Desa Banjardawa. Banyak sekali masyarakat luar Desa Banjardawa yang melakukan jual beli di pasar tradisional Desa Banjardawa.

Desa Banjardawa sendiri dalam melakukan pembangunan baik pembangunan fisik atau pembangunan non fisik pastinya berdasarkan atas visi dan misi Desa Banjardawa. Berikut visi dan misi Desa Banjardawa.

### **VISI DESA BANJARDAWA**

“Terwujudnya Banjardawa Desa Mesra Berkat Si Mawar Biru (Banjardawa Desa Menuju Sejahtera Bersama Masyarakat Sing Bisa Mangan Wareg Lan Bisa Turu)”

### **MISI DESA BANJARDAWA**

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, bermartabat, tidak korupsi dan mempermudah layanan
2. Mewujudkan prasarana dasar yang merata dengan mengedepankan azas pembangunan partisipatif dan gotong royong
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
4. Memberikan solusi lapangan pekerjaan melalui program pendidikan dan pelatihan
5. Menumbuhkan kembali budaya masyarakat Banjardawa sebagai pembentukan jati diri untuk memperkuat kepribadian bangsa
6. Menciptakan rasa aman pada masyarakat dan memperkuat kebhinekaan dengan mengembangkan toleransi normal, kehidupan beragama harmonis, dan saling menghormati dengan berlandaskan pada prinsip Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat Desa Banjardawa jika dilihat dari kondisi pendidikan menurut Sekertaris Desa, Rambat ungkap bahwa masyarakat Banjardawa kini lebih peduli terhadap pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat banyak masyarakat Desa Banjardawa yang saat ini menyekolahkan putera dan puterinya di perguruan tinggi. Meskipun orang tua hanya

lulusan SD, SMP, dan SMK tetapi kebanyakan orang tua di Desa Banjardawa ingin anaknya melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi (Rambat, 2023). Berdasarkan data dari website resmi Pemerintah Desa Banjardawa ternyata masih banyak masyarakat desa yang berpendidikan hanya tamat Sekolah Dasar atau SD yaitu sebanyak 1.706 jiwa.

Berikut ini rincian data terkait jumlah penduduk Desa Banjardawa berdasarkan pendidikan terakhir yang dikutip dari website resmi Pemerintah Desa Banjardawa (Banjardawa, 2023).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Banjardawa 2023

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum Sekolah	523 orang
2	Tidak Tamat SD	432 orang
3	Tamat SD/Sederajat	1706 orang
4	Tamat SMP/Sederajat	877 orang
5	Tamat SMA/Sederajat	1137 orang
6	Tamat Akademi/Sederajat	213 orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	313 orang

Sumber: Website Desa Banjardawa

Masyarakat Desa Banjardawa memang masih banyak yang hanya tamat pendidikan ditingkat Sekolah Dasar atau SD. Namun, saat ini banyak orang tua yang mendukung anaknya untuk berpendidikan lebih tinggi hingga sampai perguruan tinggi. Hal tersebut memang karena masyarakat Banjardawa memiliki fasilitas pendidikan yang komplit dari jenjang taman kanak-kanak atau TK hingga SMA/K ada di Desa Banjardawa. Hal tersebut yang tidak bisa menjadi alasan orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Selain itu, bagi masyarakat Desa Banjardawa yang terhalang ekonomi sepertinya saat ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Masyarakat Desa Banjardawa yang mendapatkan KIP ada 70 nama anak.

Berdasarkan data tingkat pendidikan diatas maka masyarakat Desa Banjardawa dapat dikatakan memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat masyarakat yang tamat pendidikan tingkat SMA atau wajib belajar 12 tahun tinggi dan banyak pula orang tua di Desa Banjardawa yang sedang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi.

Orang tua di Desa Banjardawa sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anaknya dan hal tersebut yang membuat orang tua sudah mulai menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi.

## 2. Struktur Sosial Ekonomi

Desa Banjardawa merupakan desa yang menjadi pusat ekonomi di Kecamatan Taman. Hal tersebut karena Desa Banjardawa memiliki pasar tradisional yang menjadi pusat perbelanjaan di Kecamatan Taman. Letak geografis yang strategis dimana di tengah-tengah Desa di Kecamatan membuat hampir semua masyarakat Kecamatan Taman jika berbelanja di Pasar Tradisional Desa Banjardawa. Selain memiliki pasar tradisional terbesar di Kecamatan Taman, Desa Banjardawa dikenal dengan pusat pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Setiap hari di jalan utama Desa Banjardawa banyak pedagang yang berjualan. Berbagai macam pedagang berjualan di jalan desa banjardawa mulai dari jajanan hingga makanan berat serta berbagai barang.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Banjardawa cukup banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Namun, selain masyarakat Desa Banjardawa banyak juga masyarakat luar Desa Banjardawa seperti masyarakat Desa tetangga yang berdagang di Desa Banjardawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Banjardawa bisa dikatakan sebagai pusat ekonomi Kecamatan Taman. Berdasarkan data dari website Pemerintah Desa Banjardawa bahwa profesi atau pekerjaan masyarakat Desa Banjardawa cukup beragam tetapi memang lebih banyak menjadi pelaku usaha dan pegawai negeri sipil atau PNS.

Berikut ini data lengkap rincian terkait pekerjaan masyarakat Desa Banjardawa yang dikutip dari laman resmi Pemerintah Desa Banjardawa (Banjardawa, 2023).

Tabel 2 Jumlah Pekerjaan Masyarakat Banjardawa 2023

No	Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani Pemilik Tanah	15 orang
2.	Petani Penggarap Tanah	23 orang
3.	Buruh Tani	10 orang
4.	Nelayan	0 Orang
5.	Pengusaha Sedang/Besar	5 orang
6.	Pengrajin/Industri Kecil	67 orang

7.	Buruh Industri	303 orang
8.	Buruh Bangunan	207 orang
9.	Pedagang	463 orang
10.	Pengangkutan	4 orang
11.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	235 orang
12.	Anggota TNI/Polri	21 orang
13.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	71 orang
14.	Peternak Kerbau	2 orang
15.	Peternak Kambing	9 orang
16.	Peternak Domba	1 orang
17.	Peternak Ayam	102 orang
18.	Peternak Itik/Bebek	24 orang
19.	Peternak Lele	2 orang

Sumber: Website Desa Banjardawa

Sementara itu jika kita melihat struktur ekonomi Desa Banjardawa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) tahun 2019 Desa Banjardawa memiliki Pendapatan Asli Desa atau PAD sebesar Rp 2.154.964.600. Selain dari PAD, Desa Banjardawa juga memiliki pendapatan dari pendapatan transfer senilai Rp. 1.681.179.148, Dana Desa atau DD sebesar Rp 944.174.000, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Rp 58. 210.148, dan Alokasi Dana Desa atau ADD senilai Rp. 523.895.000.

Gambar 2 APBDes Desa Banjardawa 2019



Sumber: Website Desa Banjardawa

Pada umumnya struktur ekonomi Desa Banjardawa dinilai cukup baik karena Kita bisa melihat dimana pendapatan asli desa yang cukup tinggi menunjukkan bahwa Desa Banjardawa memiliki sumber pendapatan yang cukup menjanjikan. Desa Banjardawa yang menjadi pusat ekonomi di Kecamatan Taman yang membuat pendapatan Desa tinggi. Selain itu, Desa Banjardawa juga memiliki Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes. Bumdes Desa Banjardawa memiliki usaha berupa mini market yang berjualan hasil produk home industri masyarakat Desa Banjardawa mulai dari makanan dan minuman, kerajinan, pakaian, dan home industri lainnya. Bumdes Desa Banjardawa juga menjual sebuah jaringan wifi untuk masyarakat Desa Banjardawa.

Selain itu, pendapatan terbesar Desa Banjardawa adalah penarikan retribusi pedagang umkm yang ada di sepanjang jalan Desa Banjardawa. Desa Banjardawa memang dikenal sebagai pusat perdagangan di Kecamatan Taman yang membuat banyak masyarakat baik masyarakat asli Desa Banjaradwa atau masyarakat\ desa lain yang mencari nafkah dengan berjualan di Desa Banjardawa. Hal tersebut yang membuat penarikan pajak retribusi dinilai menjadi sumber pendapatan Desa Banjardawa yang cukup tinggi.

### 3. Struktur Politik dan Pemerintahan

#### - Dinamika Politik

Desa Banjardawa secara keseluruhan masyarakatnya masih menjunjung tinggi kebersamaan antara tetangga. Meskipun masyarakat Desa Banjardawa termasuk masyarakat majemuk yang berarti memiliki banyak keragaman seperti keberagaman agama yang dipeluk masyarakat Desa Banjardawa hingga keberagaman pilihan politik masyarakat Desa Banjardawa. Pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang masyarakat Desa Banjardawa termasuk menjadi partisipasi pemilih yang tinggi di tingkat kecamatan Taman yaitu sebesar 75% pemilih.

Meskipun saat itu sedang terjadi sebuah krisis kesehatan yaitu adanya pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat Indonesia menolak adanya pemilihan kepala daerah atau pilkada. Masyarakat yang menolak adanya pilkada tersebut menilai bahwa saat sedang terjadi sebuah krisis seperti saat itu seharusnya Pemerintah fokus terhadap penanganannya. Namun, hasil keputusan Pemerintah melalui penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Pilkada tetap berjalan dengan standar protokol kesehatan yang ketat.

Dinamika politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang cukup interaktif dan komplit. Desa Banjardawa yang menjadi pusat perekonomian di Kecamatan Taman membuat banyak tim sukses yang melakukan kampanye seperti menempelkan alat peraga kampanye atau apk. Pada saat itu seluruh pasangan calon bupati pemalang memiliki posko kemenangan di Desa Banjardawa. Namun, meski demikian kondisi keamanan dan ketertiban saat masa pilkada baik masa kampanye, masa hari pemilihan, dan pasca pemilihan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung sangat kondusif dan tidak adanya perpecahan serius di tengah masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan sekertaris desa atau sekdes dan Panwaslu desa/kelurahan atau PKD. Sekertaris Desa yaitu Bapak Rambat menyatakan bahwa selama pilkada Kabupaten Pemalang di tahun 2020 lalu kondisi Desa Banjardawa aman dan tertib tidak ada permasalahan yang serius. Rambat menilai masyarakat Desa Banjardawa sudah mulai sadar akan demokrasi. Hal tersebut yang membuat kondisi di Desa Banjardawa tetap aman dan kondusif selama pilkada tahun 2020 yang lalu.

“Selama masa pilkada 2020 lalu saya nilai masyarakat Desa Banjardawa cukup sadar akan demokrasi nya tinggi karena tidak ada laporan pertikaian atau kegaduhan masyarakat karena pilkada tahun 2020 kepada saya. Jadi ya meski berbeda pilihan masyarakat tetap berinteraksi seperti biasanya,” ujar Rambat.

Selain itu, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat Desa Banjardawa dinilai baik oleh Panwaslu Desa atau PKD, Muhammad Bagus. Muhammad Bagus sebut selama proses pilkada 2020 berlangsung masyarakat Desa Banjaradwa khususnya yang menjadi tim sukses sangat tertib dalam berkampanye. Bagus menyebut bahwa setiap tim sukses masing-masing pasangan calon di Desa Banjardawa cukup tertib. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya tim sukses yang melakukan pelanggaran berat saat masa pilkada baik masa kampanye atau sesudah pemilihan. Hal tersebut juga yang menunjukkan bahwa tim sukses yang berasal dari masyarakat Desa Banjardawa tertib dengan aturan yang ada.

Kesadaran politik dan demokrasi masyarakat Desa Banjardawa mungkin terjadi karena faktor pendidikan yang bagus. Masyarakat Desa Banjardawa yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan menjadi dasar masyarakat Banjardawa sadar pula akan demokrasi. Oleh karena masyarakat memiliki kesadaran politik dan demokrasi maka masyarakat memiliki semangat berpartisipasi memilih saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020.

#### - **Aktor Politik Berpengaruh**

Aktor politik berperan penting dalam dunia politik. Aktor politik bisa disebut juga dengan kekuatan politik. Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal berbagai kelompok yang mampu melakukan proses tawar menawar, mengarahkan sumber-sumber kekuasaan secara maksimal dengan memilih saluran yang tepat untuk menyalurkan sebuah aspirasi. Kelompok tersebut dikenal dengan kelompok yang memiliki kekuatan politik. Salah satu yang menjadi aktor politik yaitu komunikator politik. Komunikator politik yaitu orang-orang yang bercita-cita atau memegang jabatan pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik. Menurut Maswadi Rauf (1991), seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dan kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik (Gantiano, 2018). Biasanya orang-orang seperti ini biasa disebut dengan politisi. Mereka bisa dipilih, diangkat atau pejabat karier. Dari lembaga

eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Adapun pola komunikasi politik adalah sebagai berikut (Nurudin, 2010).

1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
2. Pola komunikasi horizontal (antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)
3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur organisasi formal)
4. Pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur).

Pada pilkada 2020 di Kabupaten Pematang Jaya pastinya melibatkan banyak aktor politik didalamnya. Keterlibatan aktor politik juga sangat memengaruhi hasil dari pemilihan. Hal tersebut yang membuat banyak pasangan calon bupati melibatkan tokoh masyarakat desa menjadi aktor politik. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memang memiliki pengaruh yang cukup banyak dalam memengaruhi pemilihan masyarakat desa. Hal tersebut karena tokoh masyarakat ataupun tokoh agama memiliki *power* atau kekuasaan yang tinggi di Desa. Apalagi tokoh agama yang memiliki massa berupa jamaah yang bisa dimanfaatkan saat pasangan calon bupati untuk berkampanye.

Saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 lalu juga tokoh masyarakat atau tokoh agama menjadi aktor politik yang berpengaruh khususnya di Desa Banjardawa. Salah satu tim sukses pasangan calon bupati yang juga menjabat sebagai ketua ranting partai kebangkitan bangsa atau PKB yaitu Fatoni Firman menyebut bahwa aktor politik yang sangat berpengaruh di Desa Banjardawa yaitu tokoh masyarakat atau tokoh agama Desa Banjardawa. Fatoni yang juga menjadi tokoh agama juga menyadari bahwa dirinya tetap didekati beberapa tim sukses pasangan calon lainnya padahal dirinya adalah juga ketua ranting partai pengusung calon bupati.

Fatoni menyebut bahwa banyak tim sukses yang meminta bantuannya untuk berkampanye karena dirinya memiliki masa yaitu ibu-ibu jamaah pengajiannya. Namun, ustadz Toni juga menyebut bahwa masyarakat Desa Banjardawa saat ini juga memilih pasangan calon bupati atau pun presiden serta calon anggota legislatif melihat sosok tokoh yang mendukung. Selain sosok tokoh yang mendukung masyarakat juga melihat sosok calon. Jadi saat ini masyarakat jauh lebih cerdas saat akan menentukan pilihan akan memilih siapa. Kemudahan teknologi informasi yang membuat masyarakat mudah mengakses informasi terkait politik khususnya informasi setiap pasangan calon bupati yang ada. Oleh karena itu, masyarakat Desa

Banjardawa mendapatkan informasi detail terkait profil setiap pasangan calon bupati yang ada dan membuat masyarakat semakin mudah dalam menentukan pasangan calon bupati yang pantas untuk dimenangkan.

#### - **Partai Politik Dominasi**

Partai politik memang seringkali kita bicarakan apalagi jika kita sedang berbicara terkait dunia politik. Partai politik memiliki berbagai definisi dari beberapa tokoh politik. Salah satunya yaitu yang mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil secara materil (Budiardjo, 2008).

Sementara itu, Sigmund Neuman dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Parties* mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Neumann, 1963). Neuman mendefinisikan partai politik sebagai perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi.

Partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi dalam sebuah negara demokrasi. Adapun fungsi dari partai politik di negara politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Berikut ini penjelasan terkait fungsi partai politik di negara berkembang.

#### - **Sebagai Sarana Komunikasi Politik**

Pada masyarakat modern yang luas dan sangat kompleks atau beragam pendapat dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Pendapat atau aspirasi masyarakat yang sangat beragam tersebut pastinya akan hilang ketika tidak ada tempat untuk menampung pendapat tersebut. Pendapat atau aspirasi yang beragam harus ditampung dengan pendapat yang selaras atau senada. Hal tersebut disebut dengan penggabungan kepentingan. Setelah melakukan penggabungan pendapat atau aspirasi yang selaras maka selanjutnya melakukan sebuah perumusan.

Seandainya jika tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi pendapat dan aspirasi tersebut maka mungkin pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling

berbenturan. Agregasi dan artikulasi tersebutlah disebut sebagai salah satu fungsi komunikasi partai politik.

- Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai sebuah proses yang melalui seseorang untuk peroleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku di lingkungan masyarakat ia berada. Ia adalah bagian dari sebuah proses yang menentukan sikap politik seseorang seperti nasionalisme, kelas sosial, dan ideologi. Pada proses sosialisasi akan terus berlangsung seumur hidup terutama dalam masa kanak-kanak. Ia akan berkembang melalui keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman sebagai dewasa, organisasi, dan partai politik. Dalam hal ini psrtsi politik memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media massa, ceramah-ceramah, kursus kader, penataran, dan cara lainnya.

Adapun sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah membangun atau menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Hal tersebutlah yang dapat membuat partai politik mendapat dukungan yang luas oleh masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik partai politik dapat mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan sendiri.

- Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Dalam fungsi partai politik ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai atau kepemimpinan nasional yang lebih luas. Partai politik butuh kader-kader baru yang memiliki kualitas baik agar partai politik tidak sulit dalam menentukan pemimpin internal bahkan mengajukan bursa pemimpin nasional.

Selain itu, fungsi dari rekrutmen politik memiliki manfaat untuk memperluas dan memperbanyak anggota partai politik. Dalam rekrutmen politik banyak partai politik yang mendirikan organisasi massa yang melibatkan golongan seperti buruh, petani, pemuda, dan mahasiswa serta wanita agar penjangkaran semakin luas.

- Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di tengah lingkungan masyarakat apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Masyarakat yang bersifat heterogen adalah masyarakat yang memiliki

keberagaman seperti keberagaman suku, agama, dan budaya. Setiap perbedaan yang ada pastinya memiliki potensi konflik yang besar. Hal tersebut lah yang membuat fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik bisa dilakukan. Para elit politik dapat menumbuhkan atau memberikan sebuah pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya untuk berhenti berkonflik.

Secara singkat bahwa fungsi dari partai politik sendiri adalah sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam dan berkembang di berbagai kelompok dalam masyarakat. Partai politik juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontensasi pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki sebuah posisi eksekutif. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik dapat dijadikan sebuah instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di sebuah negara demokrasi.

Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pemalanhg terdapat tiga pasangan calon bupati dimana masing-masing mendapat dukungan dari koalisi partai politik. Partai politik yang menjadi dominasi di Kabupaten Pemalang adalah Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pada pilkada sebelumnya yaitu pilkada tahun 2015 dan pilkada 2010 di Kabupaten Pemalang dimenangkan oleh pasangan calon bupati yang diusung oleh PDIP. Sementara itu, pada pemilihan umum atau pemilu 2019 pada pilihan legislatif atau pileg baik pileg DPRD Kabupaten, pileg DPRD Provinsi, dan DPR RI unruk daerah pilihan Pemalang dimenangkan oleh partai PDIP.

Pada hasil pileg Kabupaten Pemalang tahun 2019 di daerah pilihan atau dapil II yaitu Kecamatan Taman menghasilkan PDIP menjadi partai politik yang berhasil raup suara tertinggi yaitu sebanyak 24. 329 suara. Adapun hasil lengkap dari pileg Kabupaten Pemalang 2019 dapil II yaitu Kecamatan Taman sebagai berikut (Pemalang, 2020).

Tabel 3 Jumlah Pileg Kabupaten Pemalang 2023

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	12. 524
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.103
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24. 329
4.	Partai Golongan Karya	14.528

5.	Partai Nasdem	1.829
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	158
7.	Partai Berkarya	1.243
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.821
9.	Partai Persatuan Indonesia	2.693
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.492
11.	Partai Solidaritas Indonesia	153
12.	Partai Amanat Nasional	5.343
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	186
14.	Partai Demokrat	4.267
15.	Partai Bulan Bintang	0
16.	PKPI	0

Sumber: Website KPU

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sendiri memang menjadi partai yang paling didominasi di Kabupaten Pemalang selama hampir 15 tahun belakangan. Pada pilkada tahun 2010 pasangan calon bupati yang diusung oleh PDIP berhasil memenangkan kursi bupati. Pasangan yang saat itu menjadi yaitu pasangan Junaedi dan Mukti Agung Wibowo. Keberhasilan pasangan Junaedi dan Mukti Agung Wibowo membuat dominasi partai PDIP terus berkelanjutan hingga pemilu 2024. Kabupaten Pemalang pun hampir seluruh dapil dimenangkan PDIP. Begitu pula dengan Desa Banjardawa yang termasuk dalam dapil Pemalang 2 yaitu wilayah Kecamatan Taman. Desa Banjardawa yang juga disebut sebagai ibu kota dari Kecamatan Taman menjadi tempat yang serimh dijadikan kampanye oleh para politisi. Partai PDIP sendiri memang partai yang dominan di Desa Banjardawa karena adanya anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari fraksi PDIP yang bertempat tinggal di Desa Banjardawa. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu efek mengapa PDIP dominan di Desa Banjardawa. Mengingat anggota DPRD tersebut juga merupakan putera dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Pemalang.

Dominasi partai PDIP di Desa Banjardawa saat pilkada tahun 2020 sepertinya sudah tidak lagi kuat seperti dua kali pilkada sebelumnya. Pada pilkada tahun 2020 lalu pasangan calon bupati yang diusung oleh PDIP harus mengakui keunggulan pasangan calon bupati yang diusung oleh PPP. Berikut data hasil perolehan suara saat Pilkada Kabupaten Pemalang 2020 di Desa Banjardawa.

Tabel 4 Hasil Suara Pilkada Kabupaten Pemalang 2020

No	Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Suara
1	H.M Agus Sukoco S.I.P., M.Si dan H. Eko Priyono	1.118
2	Mukti Agung Wibowo ST.,M.Si dan Mansur Hidayat ST	1.323
3	Iskandar Ali Syahbana, ST dan Akhmad Aguswardana	271

Sumber : Website KPU Kabupaten Pemalang

Kemenangan pasangan calon bupati Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat yang diusung oleh partai PPP dan Partai Gerindra telah memberikan sebuah sinyal bahwa kekuatan PDIP tidak sekuat pemilu sebelumnya. Pada tingkat Desa Banjardawa pun sama dimana dominasi kemenangan partai PDIP tidak begitu kuat lagi seperti pilkada sebelumnya. Hal tersebut menurut ketua ranting PDIP Desa Banjardawa menyebut bahwa banyak sekali simpatisan yang sebelumnya menjadi simpatisan PDIP saat itu berbelok menjad simpatisan pasangan calon bupati yang lainnya khususnya pasangan calon bupati nomor urut 2 Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat.

Hal tersebut karena memang sebelumnya Mukti Agung Wibowo adalah Wakil Bupati dari Junaedi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Pemalang. Namun, saat Mukti Agung Wibowo tidak dimajukan oleh DPC PDIP Kabupaten Pemalang karena PDIP lebih memilih Sekjen partai yang menjadi calon bupati maka banyak simpatisan partai politik yang berbelok. Banyak simpatisan yang melihat sosok Mukti Agung Wibowo sangat cocok menjadi Bupati. Selain itu, pasangan calon bupato Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat yang diusung oleh partai PPP dimana ideologi partai tersebut adalah partai islam maka cukup banyak tokoh agama Banjardawa yang mendukung pasangan calon bupati tersebut.

Selain PDIP memang partai yang cukup dominan di Banjardawa yaitu partai PPP dan PKB. Kedua partai politik tersebut memiliki ideologi yang sama yaitu partai islam memiliki cukup banyak simpatisan di Desa Banjardawa. Selain itu, banyak juga masyarakat Desa Banjardawa yang menjadi pengurus partai PPP dan PKB baik pengurus ranting atau pengurus PAC hingga DPC.

#### - **Struktur Pemerintahan**

Pemerintah Desa Banjardawa sejak tahun 1930 hingga saat ini sudah dipimpin oleh 13 kepala desa. Dari 13 kepala desa yang pernah memimpin pemerintahan Desa Banjardawa

hanya ada satu kepala desa yang menjabat sebanyak dua periode. Berikut ini daftar lengkap kepala desa yang menjabat di Desa Banjardawa.

Tahun 1930 dipimpin oleh Klowor Joyo Winoto.

Tahun 1931 – 1933 dipimpin oleh Arpat Joyo Wisastro.

Tahun 1933 – 1943 dipimpin oleh Sireng Sastro Wijoyo

Tahun 1943 – 1947 dipimpin oleh Kenges Hadimulyo

Tahun 1948 dipimpin oleh Kasmari

Tahun 1949 – 1955 dipimpin oleh Kenges Hadimulyo

Tahun 1955 – 1958 dipimpin oleh Rasid Kasiwan

Tahun 1958 – 1965 dipimpin oleh Suharto

Tahun 1966 – 1987 dipimpin oleh Kastani

Tahun 1988 – 2006 dipimpin oleh Harnoso Eko Saputro ( dua Periode )

Tahun 2006 – 2012 dipimpin oleh Herlambang Susilo Aji.SH.

Tahun 2012-2018 dipimpin oleh Kasmai

Tahun 2018 sampai sekarang Desa Banjardawa dipimpin oleh Sukandar, S.Pd.

Kepemimpinan para Kepala Desa Banjardawa sangat berpengaruh terhadap kemajuan Desa Banjardawa. Setiap tahun di masa setiap periode Kepala Desa pastinya memiliki inovasi untuk perkembangan Desa Banjardawa. Pemerintah Desa Banjarawa saat ini yang sedang dipimpin oleh Sukandar memiliki sebuah fokus pembangunan ekonomi masyarakat Desa Banjardawa. Hal tersebut didukung dengan pedulinya Pemerintah Desa Banjardawa terhadap UMKM masyarakat Desa Banjardawa dimana Pemerintah Desa menggandeng para pelaku UMKM untuk berjualan di Bumdes. Bumdes Banjardawa sendiri berupa mini market yang menjual produk UMKM lokal Desa Banjardawa baik berupa makanan, pakaian, atau kerajinan.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa pastinya tidak menjalankan amanah tersebut sendirian. Akan tetapi Kepala Desa akan menjalankan fungsi eksekutif di Pemerintah Desa bersama para perangkat desa yang ada. Desa Banjardawa sendiri memiliki beberapa perangkat desa seperti Seekrtaris Desa, Kepala Urusan atau Kaur, Kepala Dusun, dan

Kepala seksi atau Kasi. Berikut ini struktur lengkap Pemerintahan Desa Banjardawa periode 2018-2024.

#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANJARDAWA

Kepala Desa Banjardawa	: Sukandar, S. Pd.
Sekretaris Desa	: Rambat
Kepala Urusan Keuangan	: Dugiyati
Kepala Urusan Perencanaan	: Wachyono
Kepala Urusan Tata Usaha	: Machrus Imron
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Cipto Budiono
Kepala Seksi Pemerintahan	: Ahmad Juhaedi
Kepala Seksi Pelayanan	: Eko Saputro
Kepala Dusun I	: Adi Susanto
Kepala Dusun II	: Subejo
Kepala Dusun III	: Dwi Asmono
Kepala Dusun IV	: Iin Nurina Putri, ST.

Gambar 3 Stuktur Pemerintah Desa Banjardawa



Sumber: Website Desa Banjardawa

Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Desa Banjardawa juga membutuhkan lembaga legislatif tingkat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Keberadaan lembaga BPD memegang sebuah peran yang sangat penting yaitu bersama Pemerintah Desa, BPD merancang sebuah program yang diterapkan di desa tersebut. BPD diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum (Yuliananingsih, 2019). Selain itu, Jamaludin mendefinisikan BPD sebagai lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa, keberadaan BPD memegang peran yang sangat penting bersama pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa (Jamaludin, 2015).

Mekanisme kerja BPD hampir sama dengan kinerja dari DPRD pada tingkat Kabupaten atau Provinsi. Namun, yang menjadi hal pembeda yaitu cakupannya yang lebih kecil. BPD juga dituntut lebih sensitif terhadap gejala fenomena yang terjadi di masyarakat desa yang nantinya diinformasikan ke kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa. Adapun anggota BPD telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 Permendagri No. 110 tahun 2016. Masa jabatan anggota BPD

adalah 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali di satu kali periodenya. Pimpinan dan anggota BPD dilarang merangkap jabatan menjadi Kepala Desa atau perangkat desa.

Dalam menyukseskan pembangunan Desa Banjardawa pastinya Pemerintah Desa melakukan kolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Badan Permusyawaratan Desa Banjardawa memiliki anggota sebanyak 6 anggota BPD. Keenam anggota BPD tersebut terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Berikut ini susunan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjardawa.

- Ketua = H. Suwono, S.Pd., M.Pd.
- Sekretaris = Junaedi
- Bendahara = Derih Irmayanti
- Anggota = Widi Priyono, SST dan Arjanto

Gambar 4 Struktur Organisasi BPD Desa Banjardawa



Sumber: Website Desa Banjardawa

## B. Dinamika Politik Pilkada Kabupaten Pemalang Tingkat Kabupaten

Pada Pilkada tahun 2020 yang lalu, Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pesta demokrasi yaitu pilkada serentak di sebagian daerah Indonesia. Pada tahun 2020 lalu ada 270 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan

pesta demokrasi berupa pilkada serentak. Daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak yaitu diantaranya ada sekitar 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 lalu (Kominfo, 2019). Pilkada tahun 2020 menjadi sebuah pilkada yang bersejarah karena diselenggarakan ditengah krisis kesehatan global yaitu adanya pandemi Covid-19. Komisi Penyelenggara Pemilu atau KPU yang menjadi badan penyelenggara pemilu pun meluncurkan peraturan baru terkait pilkada tahun 2020 tersebut.

Namun, meski demikian pilkada yang berjalan di Kabupaten Pematang Jaya terlihat berjalan lancar meski ada sedikit perbedaan pada pilkada sebelumnya. Sebelumnya, dalam aturan KPU telah diatur terkait kampanye yang dibatasi dalam jumlah massanya. Hal tersebut yang menjadi pembeda dari pemilu atau pilkada di tahun sebelumnya. Pada umumnya massa kampanye diikuti oleh banyak sekali massa atau simpatisan partai politik atau pasangan calon. Hal tersebut pastinya berbeda saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 lalu. KPU hanya membolehkan kehadiran massa kampanye kurang dari 50 peserta.

Namun, meski demikian hal tersebut tidak menyurutkan animo masyarakat dalam memeriahkan pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 lalu. Masyarakat masih bisa merasakan animo pemilu melalui sosial media. Selain itu, para tim sukses juga tetap melakukan sebuah kampanye secara offline atau langsung bertatap muka dengan masyarakat. Adapun cara para tim sukses atau relawan melakukan kampanye secara offline atau langsung secara tatap muka yaitu dengan cara *dor to dor* atau berkunjung langsung ke rumah warga. Selain itu, para relawan dan tim sukses tetap menggelar pertemuan dengan masyarakat tetapi dengan jumlah yang terbatas. Biasanya masyarakat yang hadir adalah masyarakat yang mendapatkan undangan dari tim sukses.

Selain itu, para tim sukses dan relawan juga berkampanye melalui para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka para tim sukses meminta bantuan para tokoh agama yang memiliki jamaah atau pertemuan mengaji. Para tokoh agama tersebut dimintai untuk memperkenalkan para pasangan calon bupati yang didukung oleh relawan tersebut agar para jamaahnya ikut berpengaruh untuk memilihnya saat hari pemilihan tiba.

Pada Pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 lalu diisi oleh tiga kontestan pasangan calon bupati. Ketiga pasangan calon bupati yaitu Pasangan H.M. Agus

Sukoco, S.I.P., M.Si dan H. Eko Priyono, Pasangan Mukti Agung Wibowo, ST., M.Si dan Mansur Hidayat, ST, Pasangan Iskandar Ali Syahbana, ST dan Akhmad Aguswardana. Berikut ini akan berisi profil dari masing-masing pasangan calon bupati Kabupaten Pemalang tahun 2020.

## **1. Profil Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2020**

### **a. Profil H.M Agus Sukoco dan H. Eko Priyono**

H.M Agus Sukoco adalah salah satu calon bupati pemalang yang berpasangan dengan H. Eko Priyono. Agus Sukoco memang bukan lah orang baru dalam dunia politik Kabupaten Pemalang. Agus Sukoco sudah lama berkarier dalam dunia politik di Kabupaten Pemalang. Agus Sukoco sebelum diusulkan menjadi calon bupati Agus Sukoco merupakan anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Agus Sukoco juga menjabat sebagai Ketua DPRD periode 2019-2024. Karier politik Agus Sukoco cukup cemerlang dimana saat ini Agus Sukoco menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pemalang. Agus Sukoco merupakan politisi senior di Kabupaten Pemalang yang sudah lama berlalu lalang di perpolitikan Kabupaten Pemalang. Selain menjadi politisi ia juga sebagai pengusaha. Agus Sukoco memiliki usaha dibidang peternakan yaitu peternakan ayam.

Agus Sukoco maju sebagai calon bupati Pemalang saat pilkada tahun 2020 karena mendapatkan surat rekomendasi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDIP. DPP PDIP merekomendasi Agus Sukoco untuk maju menjadi calon bupati berpasangan dengan Eko Priyono. Surat rekomendasi DPP PDIP turun pada Rabu 19 Februari 2020 yang merekomendasi pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pemalang.

Eko Priyono yang menjadi pendamping Agus Sukoco memang bukanlah politisi ulung di Kabupaten Pemalang. Eko Priyono merupakan seorang pengusaha pom bensin. Ia memiliki 18 stasiun bahan bakar atau pom bensin pertamina (Uripto, 2020). Eko Priyono yang juga menjadi keturunan tokoh masyarakat Kabupaten Pemalang yaitu cucu Sampun menurut salah satu tim suksesnya. Kesuksesan Eko Priyono dalam dunia bisnis dan kepeduliannya terhadap kemajuan desa itulah yang membuat Eko Priyono mantab maju mendaftar bakal calon wakil bupati Kabupaten Pemalang.

Pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono mendapat nomor urut 1 dengan diusung atau didukung oleh Partai PDIP, Golkar, Nasdem, dan PAN. Pasangan Agus Sukoco dan Eko

Priyono tersebut mengambil visi dan misi yaitu membangun desa. Pasangan calon bupati tersebut selalu menggaung tagline visi misi yaitu membangun desa di setiap ralat peraga kampanyenya seperti banner.

b. Profil Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat

Mukti Agung Wibowo merupakan politisi yang sudah terkenal dengan masyarakat Kabupaten Pemalang. Sebelum Pilkada tahun 2020 ia sudah mengikuti pertarungan pilkada selama dua kali. Pada pertarungan pilkada yang pertama yaitu pilkada tahun 2010 dimana ia saat itu menjadi calon wakil bupati dan berpasangan dengan Junaedi. Pada pilkada tahun 2010 pasangan calon bupati Junaedi dan Mukti Agung Wibowo berhasil menangkan pemilu. Mukti Agung Wibowo pun menjabat menjadi wakil bupati pemalang periode 2011-2016.

Selanjutnya pada pilkada tahun 2015 Mukti Agung Wibowo memutuskan untuk kembali maju menyalonkan diri tetapi kali ini ia maju sebagai calon bupati pemalang berpasangan dengan Afifudin. Namun, pada pilkada tahun 2015 Mukti Agung Wibowo harus rela kalah dengan pasangannya terdahulu yaitu Junaedi yang kembali menang dalam pilkada tahun 2015 tersebut. Berikut profil Mukti Agung Wibowo politisi yang sudah lama berkiprah di Kabupaten Pemalang.

Nama : Mukti Agung Wibowo

Tempat Lahir : Tegal

Tanggal Lahir : 2 Oktober 2023

Orang Tua : H. Ismail (Ayah) dan Hj. Rokhayah (Ibu)

Riwayat Pendidikan

- SD Iksaniyah 02 Kota Tegal (1983-1989)
- SMP Negeri 2 Tegal (1989-1992)
- SMA PPMI Assalam Surakarta (1992-1996)
- S1 Universitas Trisakti Jakarta (1996-2002)
- S2 Undip Semarang (2013-2015)

Riwayat Pekerjaan

- Swamitra Dewi Sri ( 2006 – 2010 )

- PO Dewi Sri ( 2002 – Sekarang )
- Wakil Bupati Pemalang ( 2011 – 2016 )
- Bupati Pemalang (2021 – sekarang)

Mukti Agung Wibowo memang sebelumnya dikenal sebagai seorang pengusaha. Bisnis yang sudah didirikan oleh orang tuanya yaitu H. Ismail (Ayah) dan Hj. Rokhayah (Ibu) membuat dirinya yang melanjutkan mengembangkan bisnis tersebut. Bisnis yang dibangun adalah bisnis transportasi umum yaitu bis PO Dewi Sri. PO Dewi Sri adalah perusahaan transportasi umum yang sangat populer bagi masyarakat pantura karena banyak masyarakat pantura yang menggunakan bis tersebut. Hal tersebut karena jurusan bis tersebut adalah daerah kabupaten atau kota di pantura menuju ke daerah jabotabek.

Sementara itu, Mansur Hidayat yang menjadi pasangan calon bupati dari Mukti Agung Wibowo merupakan politisi baru yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal tersebut karena pada pemilu sebelumnya baik pilkada atau pun pileg Mansur Hidayat tidak pernah mencalonkan diri sebagai kontestan. Ia adalah seorang profesional yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN yaitu Utama Karya. Berikut ini profil dari Mansur Hidayat,

Nama : Mansur Hidayat  
 Tempat lahir : Pemalang  
 Tanggal Lahir : 30 Desember 1975  
 Alamat : Jalan Krakatau RT 001 RW 002, Kelurahan Wanarejan Selatan

#### Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 02 Moga (1982-1988)
- SMP Negeri 01 Moga (1988-1991)
- SMA Negeri 01 Pemalang (1991-1994)
- S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994-2000)

#### Riwayat Pekerjaan

PT. Utama Karya (2001)

Mansur Hidayat memang bukanlah politisi yang berkiprah lama di Kabupaten Pemalang tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya membuat Mansur Hidayat dipilih menjadi pasangan Mukti Agung Wibowo. Pasangan calon Mukti Agung Wibowo dan

Mansur Hidayat sebenarnya sangat membuat cukup kaget masyarakat Kabupaten Pemalang. Hal tersebut karena pembentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati seolah-olah dibentuk tergesa-gesa dan mendadak. Ada berbagai isu bahwa koalisi partai yang mengusung dan mendukung pasangan Agung dan Mansur ialah pecahan dari partai besar di Pemalang. Pasangan Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat atau biasa dikenal dengan *tagline* atau slogan AMAN.

c. Profil Iskandar Ali Syahbana dan Ahmad Agus Wardana

Iskandar Ali Syahbana adalah sosok politisi yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Iskandar Ali Syahbana adalah politisi yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PKB Kabupaten Pemalang. Selain itu, Iskandar Ali Syahbana juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Oleh karena itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Pemalang. Ia telah menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Pemalang sudah selama 2 periode.

Kepemimpinan Iskandar Ali Syahbana yang dinilai baik membuat dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB untuk maju menjadi calon bupati Kabupaten Pemalang. Iskandar Ali Syahbana yang juga dinilai sangat mampu dalam mengendalikan perekonomian dan usianya yang masih tergolong muda dinilai sangat pantas untuk memimpin Kabupaten Pemalang.

Sementara itu, pasangan dari Iskandar Ali Syahbana yaitu Ahmad Agus Wardana. Ahmad Agus Wardana mungkin adalah nama yang asing bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Hal tersebut karena memang Ahmad Agus Wardana bukanlah politisi yang sudah berkiprah di Kabupaten Pemalang. Ahmad Agus Wardana adalah seorang pengusaha dimana ia menjabat sebagai direktur utama PT Berlian Nusantara Lestari. Ahmad Agus Wardana sebelumnya mengabdikan kepada negara dengan menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan bagian perpajakan.

Ahmad Agus Wardana atau biasa dipanggil Aw merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Kabupaten Tegal. Awe tinggal di Jalan Raya Utara No 02 RT 003 RW 004 Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Pada waktu kecil Awe pernah tinggal di Lampung Selatan. Hal tersebut karena ia pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Sumberejo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan Ahmad Agus Wardana.

- SD Negeri Sumberejo, Kabupaten Lampung Selatan
- SD Negeri Trayeman III Kabupaten Tegal
- SMP Negeri 1 Slawi Kabupaten Tegal
- SMA Negeri 1 Slawi
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Kota Bekasi.

Meskipun Ahmad Agus Wardana bukanlah orang yang bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang atau bahkan disebut bukan putera asli daerah dirinya tidak memperlakukan karena dirinya hanya fokus dalam membangun Kabupaten Pemalang. Ahmad Agus Wardana menilai dalam berbangsa dan bernegara tentunya kesempatan untuk mengabdikan dan berkontribusi tidak ada yang membedakan antara putera daerah atau bukan. Ahmad Agus Wardana yang juga menjabat sebagai Ketua International Council For Small Business (ICSB) Kabupaten Tegal dan sebagai dewan pembina di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal (G-News, 2020).

## **2. Partai Politik di Kabupaten Pemalang**

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang memiliki julukan ‘kandang banteng’. Hal tersebut karena partai politik di Kabupaten Pemalang yang menang adalah partai PDIP. Pada Pilkada sebelumnya selama dua periode pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menang ialah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai PDIP. Sementara itu, pada hasil pemilihan umum legislatif atau pileg tahun 2019 partai yang berhasil menang banyak kursi juga adalah partai PDIP. PDIP Kabupaten Pemalang berhasil menang pada pileg 2019 dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Pemalang sebanyak 15 kursi dari total 6 daerah pilihan atau dapil di Kabupaten Pemalang.

Perolehan kursi legislatif yang banyak lah membuat Kabupaten Pemalang disebut salah satu kandang banteng di Jawa Tengah. Selain PDIP, ada beberapa partai politik yang perolehan kursi DPRD kabupaten Pemalang. Berikut ini hasil perolehan suara saat pileg tahun 2019 di Kabupaten Pemalang (Pemalang, 2020).

Tabel 5 Jumlah Suara Pileg Kabupaten Pemalang 2019

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9 kursi
2.	Partai Gerindra	6 kursi
3.	PDI Perjuangan	15 kursi
4.	Partai Golkar	6 kursi
5.	Partai Nasdem	1 kursi
6.	Partai Garuda	0 kursi
7.	Partai Berkarya	0 kursi
8.	Partai Keadilam Sejahtera	6 kursi
9.	Partai Perindo	0 kursi
10.	PPP	7 kursi
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0 kursi
12.	Partai Amanat Nasional	0 kursi
13.	Partai Hanura	0 kursi
14.	Partai Demokrat	0 kursi
15.	Partai Bulan Bintang	0 kursi
16.	PK[I	0 kursi

Sumber: Website KPU Kabupaten Pemalang

Pada Pilkada tahun 2020 aturan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU ialah dimana partai politik yang boleh mengusung calon bupati dan wakil bupati ialah partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau pencalonan dapat dilakukan dengan 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Dalam hal ini saat pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang hanya partai PDIP lah yang memenuhi syarat sebagai partai pengusung tunggal calon bupati dan wakil bupati.

Pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang PDIP memutuskan untuk berkoalisi dengan partai Golkar dan mengusung Agus Sukoco dan Eko Priyono. Namun, pada awalnya sebenarnya pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono diusung oleh tiga partai politik yaitu PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Namun, menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati partai Gerindra justru keluar dari koalisi yang mengusung Agus Sukoco dan Eko Priyono.

Pada Pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 terdapat tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada tiga pasangan calon tersebut juga terbentuk sebuah tiga koalisi partai politik. Pada pasangan pertama yaitu koalisi antara partai PDIP, Golkar, dan Demokrat. Pada koalisi tersebut telah memenuhi syarat yaitu perolehan 25% dari akumulasi total kursi DPRD. Partai PDIP yang peroleh kursi sebanyak 15 dan Partai Golkar sebanyak 6 kursi sementara Demokrat tidak memiliki kursi. Jadi total kursi dari koalisi pasangan calon bupati dan wakil bupati pertama adalah 21 kursi. Jumlah tersebut sudah memenuhi 25% dari jumlah keseluruhan kursi di DPRD Kabupaten Pemalang.

Pada pasangan nomor urut dua yaitu pasangan Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat diusung oleh partai Gerindra dan partai PPP. Pada koalisi tersebut telah memenuhi syarat yaitu perolehan minimal 25% dari akumulasi total kursi DPRD. Partai Gerindra memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Pemalang sementara PPP memiliki 7 kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Akumulasi kursi dari koalisi tersebut telah memenuhi persyaratan yaitu 25% dari total kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Jumlah kursi dari koalisi partai Gerindra dan Partai PPP tersebut adalah 13 kursi.

Sementara itu, pada pasangan calon nomor urut tiga yaitu pasangan Iskandar Ali Syahbana dan Ahmad Agus Wardana diusung oleh dua partai yaitu partai PKB dan partai PKS. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memiliki jumlah kursi sebanyak 9 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memiliki kursi sebanyak 6 kursi. Jadi total kursi koalisi tersebut ada sebanyak 15 kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Hal tersebut lah membuat koalisi partai yang mengusung Iskandar Ali Syahbana dan Ahmad Agus Wardana memenuhi syarat 25% dari jumlah kursi DPRD di Kabupaten Pemalang.

Pada pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 yang lalu terjadi sebuah dinamika politik yang sangat dinamis. Hal tersebut karena terjadi sebuah perubahan koalisi saat akan mendaftar calon bupati dan wakil bupati. Perubahan koalisi terjadi pada pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu Agus Sukoco dan Eko Priyono. Pada mulanya yaitu tanggal 29 Agustus 2020 Partai Gerindra secara resmi mendukung pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono. Partai Gerindra melakukan deklarasi tersebut karena Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang belum menerima SK rekomendasi dari DPP Partai Gerindra.

Namun, politik yang sangat dinamis di Kabupaten Pemalang khususnya saat pilkada Kabupaten Pealang maka secara tiba-tiba partai Gerindra memutuskan keluar dari koalisi yang mengusung pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono. Pada tanggal 3 September 2020

partai Gerindra Kabupaten Pemalang secara resmi membelok mendukung dan mengusung pasangan calon Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat (Sumitro, 2020). Dengan demikian maka kontestasi pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 berjumlah tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah sedikit pembelokan para simpatisan.

Berdasarkan keterangan ketua ranting PDIP Desa Banjardawa menyebut bahwa cukup banyak simpatisan PDIP Desa Banjardawa yang membelok dukungan ke pasangan calon bupati dan wakil bupati yang baru yaitu Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat. Adapun untuk alasan mereka berbelok tidak ada alasan yang pasti tetapi Ketua ranting PDIP Desa Banjardawa menyebut rumor yang beredar bahwa simpatisan yang membelok tersebut lebih melihat sosok Mukti Agung Wibowo yang lebih cocok menjadi Bupati Kabupaten Pemalang.

Dinamika politik yang dinamis di Kabupaten Pemalang juga disampaikan oleh Ketua Ranting PKB Desa Banjardawa yang menyebut bahwa pilkada tahun 2020 yang lalu banyak masyarakat yang melihat sosok tokoh. Tokoh yang dimaksud ialah para kandidat calon bupati atau wakil bupati. Namun, selain itu juga banyak masyarakat yang melihat tokoh dibalik para kandidat seperti halnya pasangan nomor urut 1 didukung oleh tokoh siapa maka masyarakat yang memiliki suka atau bahkan merasa segolongan dengan tokoh tersebut maka masyarakat akan memilih pasangan yang didukung tokoh tersebut.

## **BAB IV**

### **PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DESA BANJARDAWA PADA PILAKADA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020**

Pada bab IV ini membahas terkait preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Preferensi merupakan sebuah pilihan seseorang apakah dirinya suka atau tidak terhadap sesuatu baik barang ataupun jasa. Pada pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 lalu pastinya setiap individu masyarakat memiliki sebuah preferensi atau alasan dirinya ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Namun, sebelum adanya preferensi pastinya setiap individu memiliki sebuah aspirasi atau hal yang diinginkan terhadap para calon pasangan bupati. Aspirasi yang dimiliki oleh setiap individu biasanya berawal dari sebuah isu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti isu perekonomian, isu kesehatan, isu keamanan, ataupun isu ketahanan pangan. Masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya saat menjelang pilkada dihadapkan sebuah isu permasalahan yang sama yaitu bagaimana kondisi krisis kesehatan yaitu pandemi covid-19. Masyarakat ingin melihat calon kepala daerah yang baru mengatasi masalah tersebut. Pandemi covid-19 yang pastinya memiliki dampak besar kehidupan masyarakat khususnya dampak ekonomi masyarakat. Hal tersebut yang sebagian besar masyarakat aspirasikan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh calon bupati pemalang yang baru.

Masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya masyarakat Desa Banjardawa pastinya setiap individu memiliki aspirasi yang berbeda. Namun, meski demikian ada beberapa yang menjadi sebuah aspirasi yang sama antar individu tersebut karena isu atau permasalahan tersebut dirasakan hampir semua individu. Momentum pilkada inilah biasanya dijadikan ruang penyampaian aspirasi masyarakat kepada calon kepala daerah. Hal tersebut karena saat menjelang pilkada para calon bupati turun langsung ke masyarakat untuk berkampanye mengambil hati masyarakat. Saat itu lah masyarakat bisa menyampaikan sebuah aspirasinya. Masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada calon bupati memiliki harapan agar para calon bupati bisa mengerti bagaimana masalah yang terjadi di desa-desa agar saat terpilih nantinya bisa mengatasi persoalan tersebut.

Setelah menyampaikan sebuah aspirasinya masyarakat akan melihat bagaimana tanggapan dari calon bupati terkait masalah yang diaspirasikannya. Setelah itu masyarakat akan memiliki sebuah preferensi atau akan menemukan sebuah pilihan apakah dirinya akan

memilih pasangan tersebut atau tidak. Pilihan akan memilih pasangan tersebut atau tidak dilihat dari bagaimana jawaban langkah apa yang akan dilakukan calon bupati dalam mengatasi masalah tersebut. Masyarakat saat ini pastinya sudah mengerti mana sebuah janji yang rasional atau janji yang tidak rasional atau janji manis saja para calon.

Pada bab ini peneliti akan menulis hasil penelitian terkait preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Pada isinya nanti akan berisi beberapa poin yaitu terkait preferensi masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Preferensi politik diartikan sebuah alasan memilih masyarakat terhadap para pasangan calon bupati yang berkompetisi. Preferensi politik pemilih sendiri pastinya memiliki sebuah peran penting bagi setiap individu pemilih karena hal tersebut yang membuat masyarakat bisa menentukan pilihannya.

Pada saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 menurut data dari website Komisi Pemilihan Umum atau KPU bahwa partisipasi aktif memilih masyarakat Desa Banjardawa dinilai tinggi yaitu sebesar 75%. Partisipasi memilih masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 dinilai tinggi karena pada saat itu pilkada tahun serentak tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 dan banyak juga masyarakat Indonesia secara umum yang menolak pilkada serentak karena masih adanya krisis kesehatan. Namun, meski demikian masyarakat Desa Banjardawa yang memutuskan untuk memilih saat hari pemilihan dirasa tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa alasan atau faktor pendorong yang membuat masyarakat memilih untuk aktif memilih saat pilkada dari pada menjadi masyarakat dengan golongan putih atau golput. Faktor pendorong atau alasan masyarakat Desa yang memilih berdasarkan penelitian yaitu keberadaan tempat hiburan, pembangunan infrastruktur jalan, kenaikan umr dan peningkatan lapangan kerja, adanya keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah, serta uang dan partai politik. Berikut penjelasan rinci terkait harapan atau faktor pendorong masyarakat Desa Banjardawa yang memutuskan untuk memilih menjadi pemilih aktif saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020.

#### **A. Keberadaan Tempat Hiburan**

Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Tengah yang dinilai oleh masyarakatnya kurang memiliki tempat hiburan untuk masyarakatnya. Banyak masyarakat yang menilai bahwa Kabupaten Pemalang memang kurang memiliki tempat hiburan hal tersebut hampir dikeluhkan khususnya bagi masyarakat Desa Banjardawa yang

tergolong sebagai pemilih pemula atau pemilih muda. Pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam sebuah pemilihan umum atau pemilu (Khalehar, 2017). Masyarakat yang tergolong pemilih pemula adalah mereka yang berusia masih muda dan masih menjadi seorang pelajar atau mahasiswa. Mereka pemilih pemula lah yang banyak memiliki preferensi politik berupa hiburan. Tempat hiburan yang di inginkan mereka pun beragam mulai dari tempat hiburan wisata alam hingga hiburan modern. Mereka yang masih ingin mengeksplere tempat-tempat wisata hiburan pastinya ingin Kabupaten Pematang Naning nantinya memiliki tempat hiburan yang bagus dan keren.

Preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa terkait tempat hiburan yang cukup banyak disampaikan oleh para pemilih karena pada kenyataan Kabupaten Pematang Naning sedikit memiliki tempat hiburan atau wisata. Apa lagi tempat hiburan modern seperti wahana bermain, bioskop, dan pusat perbelanjaan seperti mall. Para pemilih pemula dan pemilih milenial yang paling banyak memiliki preferensi politik tempat hiburan. Mereka banyak yang menginginkan Kabupaten Pematang Naning memiliki hiburan seperti bioskop dan mall di Kabupaten Pematang Naning. Salah satu pemilih yang memiliki preferensi politik tempat hiburan saat pilkada Kabupaten Pematang Naning tahun 2020 adalah Siti Hajar. Siti Hajar merupakan pemilih pemula saat pilkada Kabupaten Pematang Naning tahun 2020. Ia mengaku momentum pilkada menjadi momentum pertama kalinya untuk memilih dalam pemilihan umum. Ia mengaku sangat antusias pada kesempatan pertama kalinya karena Ia membayangkan bahwa pilihannya dapat merubah Kabupaten Pematang Naning lebih baik lagi. Ia pun menginginkan Bupati yang terpilih nanti dapat membuat perubahan khususnya membuat tempat hiburan untuk para anak muda. Ia memiliki keinginan Kabupaten Pematang Naning memiliki tempat hiburan bioskop dan pusat perbelanjaan modern yaitu mall. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu narasumber yaitu Siti Hajar sebagai berikut :

“Pilkada kemarin Saya sangat antusias karena itu menjadi sebuah momentum pertama kali saya memilih. Saya merasa suara Saya dapat merubah Kabupaten Pematang Naning lebih baik lagi. Saya memiliki keinginan agar Kabupaten Pematang Naning memiliki tempat hiburan untuk pemuda seperti Saya. Kabupaten Pematang Naning itu kan tidak ada bioskop jadi Saya ingin Kabupaten Pematang Naning memiliki bioskop. Jadi harapan Saya pilihan saya dapat mewujudkan ini” (Wawancara, Siti Hajar, Pemilih Pemula, 31 Mei 2023).

Keinginan Siti Hajar dengan adanya bioskop di Kabupaten Pematang Naning karena perkembangan industri film yang semakin maju dan banyaknya film baru yang ditayangkan di bioskop. Oleh karena pastinya para pemuda Desa Banjardawa ingin Kabupaten

Pemalang ada bioskop agar Mereka tidak perlu pergi ke Kota tetangga yaitu Kota Tegal atau Kota Pekalongan untuk dapat menikmati hiburan menonton film terbaru.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pemilih pemula yaitu Hasnaul Ghina yang menyebut juga memiliki keinginan agar Kabupaten Pemalang memiliki bioskop dan pusat perbelanjaan modern atau mall. Ia yang juga sangat menyukai belanja di mall mengaku ingin sekali di Pemalang ada tempat belanja modern atau mall. Selain itu, bioskop juga dirasa Gina perlu ada di Kabupaten Pemalang apalagi dirinya yang juga suka menonton film terbaru di bioskop. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu pemilih pemula lainnya yaitu sebagai berikut:

“Saya suka sekali kalau belanja di mall dan suka menonton film di bioskop. Saya selama ini kalau ingin menonton atau belanja di mall harus ke Kota Pekalongan atau Kota Tegal. Jadi ya saya ingin nanti Pemalang ada tempat hiburan seperti itu biar Saya tidak usah jauh kalau mau ke mall dan nonton bioskop” (Wawancara, Hasnaul Gina, Pemilih Pemula, 30 Mei 2023).

Sementara itu, pemilih pemula yang lain yaitu Puput Nur Maulidiyah juga menyebut hal yang hampir sama yaitu terkait adanya tempat hiburan untuk para pemuda. Ia merasa Kabupaten Pemalang perlu adanya pusat perbelanjaan modern atau mall yang didalamnya ada bioskop. Hal tersebut ia menilai karena banyaknya pemuda/i Kabupaten Pemalang yang suka menonton film di bioskop dan harus keluar kota. Menurut Puput meskipun di era sekarang banyak sekali platform yang menayangkan film seperti netflix tetapi film terbaru biasanya ditayangkan di bioskop. Ia berpikir jika ada bioskop di Kabupaten Pemalang bisa saja membuat pendapatan daerah Kabupaten Pemalang ikut meningkat dari pajak bioskop dan mall. Berikut ini penjelasan dari Puput Nur Maulidiyah salah satu narasumber pemilih pemula :

“Saat pilkada kemarin Saya punya semacam harapan bahwa Pemalang punya mall yang ada bioskop nya mas. Begini mas kalau dilihat kan para anak muda suka nonton film kan di bioskop tuh nah Kita kan selama ini kalau mau nonton jauh kan harus ke Tegal atau Pekalongan ya meski sekarang ada platform nonton film seperti netflix tapi kan film baru biasanya tayang di bioskop nah Saya juga mikir kan kalau ada mall dan bioskop di Pemalang lumayan kan buat pendapatan asli daerah Pemalang melalui pajak tersebut” (Wawancara, Puput Nur Maulidiyah, Pemilih Pemula, 30 Mei 2023).

Kabupaten Pemalang sendiri sebenarnya memiliki sebuah pusat perbelanjaan modern atau mall yaitu Yoga Mall. Namun, memang mall tersebut tergolong mall kecil dan dirasa kurang dalam memenuhi keinginan para pemuda. Mall yang tidak ada bioskop membuat masyarakat khususnya bagi pemilih muda berharap agar adanya mall yang didalamnya ada bioskop agar Mereka tidak perlu jauh jika ingin menonton.

Selain itu, tempat hiburan berupa mall dan bioskop cukup banyak juga masyarakat yang memiliki preferensi berupa tempat hiburan berupa wisata alam. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang memiliki sebuah keuntungan geografis. Hal tersebut karena Kabupaten Pemalang memiliki destinasi alam yang cukup komplit. Kabupaten Pemalang memiliki pantai, pegunungan, bukit, hingga banyak memiliki air terjun. Wisata alam yang seperti itulah yang seharusnya bisa dikelola baik oleh Pemerintah Daerah.

Pada saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 bisa menjadikan sebuah momentum untuk dapat melihat kandidat pasangan calon bupati mana yang dinilai dapat merubah dan memajukan wisata alam di Kabupaten Pemalang. Irkham Maulana salah satu pemilih milenial Desa Banjardawa menilai bahwa dirinya mencari kandidat pasangan calon bupati yang bisa memajukan wisata alam di Kabupaten Pemalang. Preferensi politik Irkham Maulana terkait tempat hiburan wisata alam di Kabupaten Pemalang. Ia menyayangkan beberapa wisata alam di Kabupaten Pemalang kurang diurus dan di kelola baik oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ia mengambil contoh wisata alam bukit kukusan dan beberapa destinasi wisata air terjun yang kurang dikelola baik oleh Pemerintah Daerah bahkan wisata bukit kukusan sekarang sudah tutup atau tidak beroperasi kembali. Padahal dahulu saat pertama kali dibuka bukit kukusan sangat populer dengan keindahan dan banyaknya spot foto yang instagaramable.

Destinasi wisata alam bukit kukusan yang saat ini ditutup dinilai karena pemerintah daerah Kabupaten Pemalang kurang serius dalam mengelola. Memang ditutupnya bukit kukusan saat itu karena adanya bencana longsor tetapi seharusnya hal tersebut harus bisa di kelola lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang agar bisa di kembangkan lagi. Irkham Maulana memiliki sebuah harapan saat pilkada yaitu pasangan calon bupati terpilih dapat mengelola wisata alam di Kabupaten Pemalang lebih baik lagi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemilih pemuda:

“Pemalang sebenarnya memiliki sebuah potensi yang besar dalam sektor destinasi wisata. Pemalang memiliki keunggulan letak geografis yang strategis menurut Saya. Pemalang memiliki pantai karena Pemalang berada di kawasan pantai utara atau pantura tetapi Pemalang juga memiliki kawasan atau daerah dataran tinggi karena ada wilayah di Pemalang yang berada di dekat puncak gunung slamet. Banyaknya wisata alam sebenarnya jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan juga untuk masyarakat di dekat wisata tersebut” (Wawancara, Irkham Maulana, Pemilih Muda, 9 Juni 2023).

Keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dalam mengelola wisata alam di Kabupaten Pemalang pastinya diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat sekitar tempat wisata. Majunya wisata pastinya memiliki dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar tempat wisata karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Preferensi politik pemilih Desa Banjardawa terkait tempat hiburan mayoritas dimiliki oleh pemilih pemula dan milenial dimana usia Mereka yang masih muda dan cenderung lebih suka mencari tempat hiburan karena kebanyakan masih lebih senang-senang dalam hidupnya. Hal tersebut yang membuat preferensi politik masyarakat yang terkait tempat hiburan diisi oleh para pemilih muda.

## **B. Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Banyak masyarakat Kabupaten Pemalang umumnya dan khususnya masyarakat Desa Banjardawa yang mengeluhkan bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang banyak yang rusak dan bergelombang. Meskipun jalan di Desa Banjardawa sendiri tergolong bagus dan tidak tergolong rusak parah tetapi banyak dari masyarakat Desa Banjardawa yang melakukan aktivitas di luar desa dan mengalami jalan rusak di Kabupaten Pemalang. Jalan yang rusak di Kabupaten Pemalang umumnya terjadi di desa pelosok Kabupaten Pemalang tetapi ada beberapa jalan yang berada di dekat pusat juga mengalami kerusakan.

Gambar 5 Jalan Rusak yang Ada di Kabupaten Pemalang



Sumber: SinarJateng.com

Masyarakat Desa Banjardawa yang memiliki preferensi politik infrastruktur jalan saat pilkada Kabupaten Pemalang biasanya mereka yang sering melakukan aktivitas di luar Desa Banjardawa. Banyak sekali infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah di Kabupaten Pemalang apalagi di daerah yang jauh dari pusat kota. Hal tersebut yang juga

disampaikan oleh Chaidar Rahman. Salah satu pemilih muda dimana saat pilkada tahun 2020 lalu dirinya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Kota Tegal. Ia yang memiliki banyak teman yang bertempat tinggal di perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang mengaku saat bermain ke tempat rumah temannya jalan di desa temannya sangat memprihatinkan. Masih banyak jalan yang rusak bahkan mungkin dikategorikan sebagai jalan rusak parah karena banyaknya lubang bahkan ada yang bergelombang. Hal tersebut yang membuat Chaidar merasa miris dengan Kabupaten Pemalang karena masih banyaknya jalan yang rusak. Berikut pernyataan Chaidar Rahman terkait jalan rusak yang ada di Kabupaten Pemalang:

“Saat pilkada Kabupaten Pemalang Saya sedikit berharap bahwa kandidat pasangan calon bupati yang terpilih dapat memperbaiki jalan yang rusak. Namun, sebenarnya Saya agak pesimis kepada para politisi tetapi ya kalau ditanya harapan itu si karena Kabupaten Pemalang masih banyak jalan yang rusak parah. Saya kan kuliah di Tegal lalu memiliki banyak teman yang rumahnya di dekat perbatasan Tegal nah itu jalannya masih banyak bergelombang dan menurut Saya cukup berat lah rusaknya” (Wawancara, Chaidar Rahman, Pemilih Muda, 29 Mei 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Irkham Maulana. Selain mencari sosok kandidat yang dapat membangun tempat hiburan khususnya wisata di Kabupaten Pemalang. Irkham Maulana juga mencari kandidat pasangan calon yang dirasa bisa membangun infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Pemalang. Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak pastinya dapat menghambat aktivitas masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya. Jika aktivitas masyarakat Kabupaten Pemalang terhambat maka memiliki dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu Ia mencari kandidat pasangan calon bupati yang dirasa dapat mewujudkan preferensinya. Berikut ini pernyataan dari Irkham Maulana terkait preferensi tempat hiburan:

“Saya mencari pasangan calon bupati yang bisa mewujudkan keinginan saya yaitu pembangunan infrastruktur wisata dan infrastruktur jalan karena itu hal yang penting untuk ekonomi masyarakat. Meskipun Saya tinggal di Desa Banjardawa dan jalan di desa Saya cukup baik tetapi Saya melihat jalan di luar desa saya masih banyak yang rusak. Nah itu sangat disayangkan apalagi ada salah satu jalan menuju tempat wisata yaitu pantai nyamplung sari itu jalannya rusak parah dan pastinya itu sangat merugikan masyarakat” (Wawancara, Irkham Maulana, Pemilih Muda, 9 Juni 2023).

Adanya jalan yang menuju pantai nyamplungsari yang rusak parah dirasa sangat merugikan masyarakat. Jalan atau akses menuju tempat wisata yang rusak membuat wisatawan malas untuk berwisata di pantai tersebut. Hal tersebut yang perlu di benahi oleh kandidat pasangan calon bupati yang terpilih nantinya. Preferensi politik terkait

infrastruktur jalan ini pastinya memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya masyarakat Desa Banjardawa. Meskipun jalan di Desa Banjardawa tergolong baik tetapi aktivitas masyarakat Desa Banjardawa banyak juga yang diluar desa dan sering menjumpai jalan rusak di Kabupaten Pemalang.

Muhammad Yudhsitira Alfath juga mengungkapkan terkait jalan rusak yang ada di Kabupaten Pemalang. Alpad sapaan akrabnya sering kali menjumpai jalan rusak saat dirinya akan bersilaturahmi ke rumah keluarga yang berada di luar Desa Banjardawa. Hal tersebut yang membuat saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 lalu Ia memiliki preferensi infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang agar diperbaiki. ia mengaku bahwa dirinya tidak mengenal begitu dekat setiap pasangan calon bupati. Ia pun sebenarnya mengikuti pilihan orang tua tetapi meski demikian dirinya tetap menilai apakah pilihan orang tua dapat memasuki kriteria preferensi memilihnya atau tidak. Namun, Ia mengaku saat orang tuanya membantu menentukan pilihan pasangan calon bupati dan Ia dijelaskan latar belakangnya Ia merasa bahwa pasangan tersebut termasuk dalam kriteria dan Ia pun memutuskan memilih pasangan tersebut.

“Saat pilkada Kabupaten Pemalang saya memiliki sebuah keinginan bahwa calon bupati yang terpilih bisa membangun infrastruktur jalan agar lebih baik lagi. Saya kalau mau main ke rumah saudara terkadang sering menemui jalan yang rusak dan saya kira itu tergolong parah ya jadi ya Saya ingin waktu itu pasangan calon bupati yang terpilih dapat memperbaiki jalan tersebut. Namun, sebenarnya Saya kan kurang kenal setiap pasangan calon bupati dan Saya meminta tolong kepada kedua orang tua Saya untuk menentukan pilihan. Namun, meski demikian Saya juga melihat apakah pasangan calon yang disarankan dilihat mampu mewujudkan keinginan Saya atau tidak. Nah saat saya lihat latar belakang Saya merasa pasangan calon orang tua Saya mampu menjawab keinginan Saya “ (Wawancara, Muhammad Yudhistira Alfath, Pemilih Muda, 30 Mei 2023).

Preferensi pemilih berupa infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang jelas cukup banyak ditemukan dipilih masyarakat Desa Banjardawa. Jalan memang menjadi sebuah hal yang penting untuk menjadikan sebuah akses aktivitas masyarakat. Para pemilih yang memiliki preferensi politik infrastruktur jalan ialah mayoritas Mereka para pemilih milenial. Pemilih milenial atau generasi milenial ialah generasi yang lahir dari tahun 1978 hingga 2000. Generasi milenial sering disebut juga dengan generasi teknologi. Hal tersebut karena pada generasi milenial kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari teknologi utamanya internet. Pada generasi milenial ini internet sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok atau hal tersebut berarti dalam menjalankan kehidupan atau aktivitasnya generasi milenial tidak bisa lepas dari internet (Dila Novita, 2020).

Preferensi politik berupa pembangunan infrastruktur jalan banyak diutarakan oleh pemilih generasi milenial karena Mereka yang sering melakukan explore daerah yang ada di Kabupaten pemalang. Mereka yang mayoritas masih sekolah dan memiliki teman di berbagai desa yang ada di Kabupaten Pemalang dan membuat Mereka mengerti dan tahu bagaimana kondisi jalan yang ada di desa-desa Kabupaten Pemalang. Jadi tidak heran Mereka cukup banyak yang memiliki preferensi politik berupa infrastruktur jalan.

### **C. Kenaikan Upah Minimum Regional dan Peningkatan Lapangan Kerja**

Kabupaten Pemalang adalah Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki upah minimum regional atau umr yang tergolong kecil di Jawa Tengah. Pada tahun 2020 saat pilkada dilaksanakan umr Kabupaten Pemalang sebesar Rp 1.865.000 (Jateng, 2020). Umr yang dinilai kecil dari kota tetangga yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan yang membuat banyak masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya yang baru lulus sekolah memilih untuk bekerja merantau di kota besar. Umr kecil menjadi sebuah masalah klasik setiap tahunnya. Para masyarakat Kabupaten Pemalang pastinya menginginkan umr Kabupaten Pemalang tinggi dan banyaknya lapangan kerja di Kabupaten Pemalang.

Selain preferensi umr Kabupaten Pemalang banyak juga masyarakat yang memiliki preferensi yang selaras dengan umr yaitunterkait lapangan kerja. Kabupaten Pemalang memang tidak memiliki sebuah kawasan industri. Masyarakat Desa Banjardawa yang memiliki preferensi politik umr dan lapangan kerja banyak dimiliki oleh pemilih milenial atau pemilih generasi X yang memiliki putera atau puteri sedang sekolah dan akan lulus sekolah. Habib salah satu pemilih milenial yang memiliki prefrensi umr merupakan seseorang yang pada saat itu sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Habib menginginkan kandidat pasangan calon bupati terpilih dapat meningkatkan lagi umr Kabupaten Pemalang. Habib menilai mungkin banyaknya masyarakat Desa Banjardawa yang merantau karena umr Pemalang kecil dan sedikitnya lapangan kerja di Kabupaten Pemalang.

“Pemalang umr nya kecil dan lapangan kerjanya sedikit dan itu yang menjadikannya banyak masyarakat Kabupaten Pemalang yang merantau ke kota besar. Oleh karena itu kalau Saya saat pilkada mencari pasangan calon bupati yang bisa membuat umr Kabupaten Pemalang meningkat dan dapat membuka lapangan kerja di Kabupaten Pemalang” (Wawancara, Habiburrohman, Pemilih Muda, 11 Juni 2023).

Dalam menentukan pilihannya saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 Habib melihat latar belakang dan visi misi setiap pasangan calon bupati. Ia mencari pasangan calon bupati yang dirinya rasa sesuai dengan preferensi pemilihannya yaitu pasangan calon bupati yang dapat menaikkan umr dan membuka banyak lapangan kerja. Ia mengaku saat menentukan pilihannya sudah merasa yakin bahwa pilihannya dapat memenuhi preferensinya. Ia melihat dari latar belakang sang pasangan calon bupati pilihannya dan dirasa mampu memenuhi preferensi pilihannya.

Selain Habib, Emi juga memiliki preferensi pilihan yang hampir sama dengan Habib yaitu umr Kabupaten Pemalang yang kecil. Emi merupakan ibu rumah tangga yang suaminya bekerja di luar kota. Emi menginginkan umr Kabupaten Pemalang bisa meningkat lagi karena menurut Emi jika umr Kabupaten Pemalang meningkat itu bisa lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang. Emi saat pilkada Kabupaten Pemalang melihat visi dan misi setiap pasangan calon bupati dan mencocokkan pasangan mana yang visi dan misinya dapat menjawab preferensi pemilihannya. Saat itu Ia mengaku memilih pasangan nomor urut 2 yaitu Agung dan Mansur dimana visi dan misi pasangan tersebut menurut Emi dapat menjadi preferensi pilihannya saat pilkada yaitu terkait umr dan lapangan kerja di Kabupaten Pemalang.

“Saya melihat visi dan misi setiap pasangan calon bupati saat pilkada kemarin Saya mencoba untuk melihat visi dan misi pasangan siapa yang sekiranya dapat mewujudkan keinginan saya terkait umr dan lapangan kerja. Saya sudah menentukan pilihan jauh sebelum hari pemilihan mas karena Saya kenal timses lalu Saya kan diberi tau apa visi dan misinya nah saat Saya tau Saya yakin bahwa pasangan tersebut mampu menjawab keinginan saya terkait umr dan lapangan kerja” (Wawancara, Emi, Pemilih Generasi X, 23 Mei 2023).

Selain preferensi pilihan berupa upah minimu regional preferensi pilihan lainnya yang selaras dengan itu adalah terkait lapangan kerja. Kabupaten Pemalang memang kota yang tidak memiliki kawasan industri. Meski demikian ada beberapa pabrik berdiri di Kabupaten Pemalang tetapi pastinya jumlahnya lebih sedikit dari Kota lain yaitu Tegal dan Pekalongan. Hal tersebut yang membuat masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya masyarakat Desa Banjardawa memilih merantau ke kota besar.

Masyarakat Desa Banjardawa yang memilih untuk merantau keluar kota Pemalang yaitu Mereka yang baru lulus sekolah baik sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Para pemuda yang baru lulus sekolah memutuskan untuk merantau karena sedikitnya lapangan kerja yang ada di Kabupaten Pemalang dan pastinya umr di Kabupaten Pemalang

juga di tahun 2020 masih tergolong kecil. Hal tersebut yang membuat para pemuda memilih untuk pergi merantau keluar kota yang lebih menjanjikan baik secara peluang atau pun pendapatan dari pada harus di Pematang.

Alfath salah satu pemilih milenial yang juga memiliki preferensi pilihan lapangan kerja selain preferensi pilihannya berupa infrastruktur jalan. Ia menilai selain umur yang rendah problematika Kabupaten Pematang adalah sedikitnya lapangan kerja di Kabupaten Pematang. Ia yang juga saat itu masih duduk di perguruan tinggi pastinya mencari lapangan kerja untuk dirinya saat Ia lulus kuliah. Oleh karena itu selain terkait infrastruktur jalan Ia memiliki preferensi pilihan berupa lapangan kerja. Meskipun Ia mengikuti pilihan orang tua tetapi Ia tetap melihat bagaimana latar belakang dan visi dan misi pasangan calon yang disarankan orang tua dan Ia mengaku bahwa pasangan tersebut bisa mewujudkan preferensi pilihannya. Ia melihat pengalaman, latar belakang, serta visi dan misi pasangan tersebut dirasa mampu memenuhi preferensi pilihannya. Oleh karena itu Ia saat itu mantap dalam menentukan pilihannya di pilkada Kabupaten Pematang tahun 2020.

Selain itu, ada Siti Mutmainah yang juga preferensi pilihannya yaitu lapangan kerja. Siti Mutmainah memiliki preferensi tersebut karena Siti Mutmainah merasa miris terhadap Kabupaten Pematang yang lapangan kerjanya sedikit. Siti Mutmainah yang juga memiliki anak masih sekolah di perguruan tinggi memiliki sebuah harapan agar Kabupaten Pematang upah minimum regional atau umur meningkat dan pastinya lapangan kerja semakin banyak di Kabupaten Pematang.

“Saya harap di Kabupaten Pematang umur nya naik lagi ya dan pastinya lapangan kerjanya juga diperbanyak. Saya kan punya anak yang masih sekolah jadi harapan Kita sebagai orang tua ingin anaknya saat lulus bisa kerja di dekat rumah dengan gaji yang tinggi. Oleh karena itu pilkada kemarin Saya mencari pasangan mana yang dirasa bisa membuat preferensi pilihan saya terpenuhi” (Wawancara, Siti Mutmainah, Pemilih Generasi X, 30 Mei 2023).

Siti Mutmainah mencari tau pasangan calon bupati mana yang dapat memenuhi preferensi pilihannya dengan melihat setiap visi dan misi setiap pasangan calon bupati. Siti Mutmainah mengakui sebelum hari pemilihan sudah menentukan akan memilih pasangan calon bupati mana karena melihat visi dan misinya. Beliau mantap dengan pilihannya karena melihat pengalaman pasangan calon bupati pilihannya dan juga melihat visi dan misinya yang sangat cocok untuk menjawab preferensi pilihannya.

“Saya memilih pasangan calon kan sudah jauh hari dari hari pemilihan nah Saya percaya banget sama pilihann saya karena saat Saya mengetahui latar belakang,

pengalaman, serta visi dan misi pasangan calon bupati tersebut Saya rasa mampu memenuhi preferensi pilihan Saya” (Wawancara, Siti Mutmainah, Pemilih Generasi X, 30 Mei 2023).

#### **D. Adanya Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Daerah**

Pemuda merupakan salah satu aset emas yang dimiliki oleh sebuah daerah termasuk dengan Kabupaten Pematang Jaya. Pemuda yang dinilai masih memiliki ide yang lebih kreatif pastinya dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan agar daerah tersebut dapat lebih baik. Namun, sangat disayangkan pemuda di Kabupaten Pematang Jaya dinilai kurang dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut disampaikan oleh Machfudz Alamul Huda yang berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi sekaligus aktif di kepengurusan organisasi daerah yang ada di kampusnya. Machfudz yang saat itu menjadi pengurus organisasi daerah di kampusnya merasa pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sebelumnya kurang peduli terhadap pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Pematang Jaya.

Ia merasa bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melibatkan pemuda minimal yang tergabung dalam organisasi daerah di setiap kampus yang ada di luar kota. Mahasiswa yang masih memiliki idealisme dan pikiran yang kreatif serta tidak adanya kepentingan seharusnya dapat dilibatkan dalam pembangunan daerah karena pastinya akan memikirkan pembangunan daerah yang bagus. Machfudz merasa bahwa pemerintah daerah kurang menggandeng organisasi pemuda dan Ia mengungkapkan minimal pemuda yang tergabung dalam organisasi mahasiswa di kasih ruang untuk diskusi terkait pembangunan daerahnya sendiri.

“Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sebelumnya kurang merangkul para mahasiswa atau pelajar asal Pematang Jaya yang sedang kuliah di luar Pematang Jaya dan tergabung dalam organisasi daerah di kampusnya. Padahal mahasiswa masih memiliki idealisme tinggi dan pastinya pikiran yang kreatif yang dapat membantu pemerintah daerah. Minimal pemerintah daerah bisa berdiskusi bersama dengan pemerintah daerah dalam membangun Pematang Jaya” (Wawancara, Machfudz Alamul Huda, Pemilih Muda, 14 Juni 2023).

Mahasiswa yang masih memiliki idealisme tinggi dan tidak adanya kepentingan pastinya akan lebih totalitas dalam memberikan sebuah ide untuk pembangunan daerahnya. Machfudz memanfaatkan momentum pilkada kemarin untuk mencari pasangan calon yang dinilai dapat lebih dekat dengan pemuda dan nantinya dapat merangkul pemuda dalam pembangunan Pematang Jaya minimal terlibat dalam diskusi sebelum dikeluarkan sebuah kebijakan. Machfudz menjadikan keterlibatan pemuda sebagai preferensinya dalam

memilih pasangan calon bupati di pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Ia mencari pasangan calon bupati dengan melihat bagaimana saat setiap pasangan calon melakukan kampanye apakah dekat dengan pemuda atau tidak. Machfudz mengaku mengikuti salah satu kampanye pasangan calon karena dirinya mendapatkan undangan sebagai pengurus organisasi mahasiswa daerah. Saat Ia mengikuti acara sosialisasi tersebut Ia memutuskan untuk memilih pasangan tersebut karena dinilai dekat dengan pemuda. Machfudz melihat hal tersebut karena dari pasangan calon bupati lainnya hanya pasangan Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat yang melakukan pertemuan dengan para pemuda dan mengadakan diskusi bersama untuk kemajuan Pemalang.

“Saya mengikuti acara diskusi bareng dengan pasangan nomor urut 2 yaitu Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat. Nah dari situ Saya merasa bahwa pasangan tersebut sangat cocok bagi Saya dimana Mereka saat kampanye adakan diskusi bareng pemuda itu artinya menurut Saya sebagai sinyal positif diawal bahwa nantinya pasangat tersebut terpilih akan gandeng pemuda Pemalang” (Wawancara, Machfudz Alamul Huda, Pemilih Muda, 14 Juni 2023).

Awal yang positif dirasa oleh Machfudz pada pasangan tersebut karena saat kampanye menggandeng pemuda dan membuat Ia merasa pasangan tersebut nantinya akan menggandeng pemuda saat jadi. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan pemuda sangat diperlukan karena pemuda yang pastinya memiliki ide kreatif dan inovatif dan itu sangat diperlukan pemerintah. Keterlibatan pemuda semisal dengan sering mengadakan diskusi bersama terkait permasalahan Kabupaten Pemalang dan mencari solusi bersama. Pemerintah Kabupaten Pemalang sebelumnya yang dirasa kurang merangkul pemuda pastinya yang membuat pemuda khususnya di Desa Banjardawa ada yang memiliki preferensi pilihannya terkait keterlibatan pemuda dalam pembangunan.

Selain Machfudz, ada juga pemilih milenial yang memiliki preferensi pilihannya terkait keterlibatan pemuda yaitu Habiburrohman. Habib yang juga mengikuti acara diskusi bersama pasangan calon bupati Mukti Agung dan Mansur Hidayat. Setelah mengikuti acara diskusi bersama Habib semakin yakin dalam menentukan pilihannya kepada pasangan Mukti Agung dan Mansur Hidayat karena pasangan tersebut yang dapat mewujudkan preferensi pilihannya. Selain preferensi keterlibatan pemuda dirinya juga memiliki preferensi pilihan terkait umur dan lapangan kerja di Kabupaten Pemalang. Preferensi pilihan Habib baik yang keterlibatan pemuda dalam pembangunan atau umur serta lapangan kerja menurutnya sangat sesuai dengan latar belakang serta visi dan misi pasangan calon bupati Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat.

“Saya saat pilkada kan memiliki preferensi politik umr, lapangan kerja, dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah nah berdasarkan preferensi pilihan Saya maka Saya memilih pasangan Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat karena ya melihat dari latar belakang, pengalaman, dan visi misi Mereka Saya merasa cocok dengan pasangan tersebut “ (Wawancara, Habiburrohman, Pemilih Muda, 11 Juni 2023).

### **E. Uang dan Partai Politik**

Politik uang menjadi sebuah masalah klasik di Indonesia khususnya saat tahun pemilu berlangsung. Politik uang menurut M.Abdul Kholiq merupakan suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi atau milik partai untuk memengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang dapat diartikan sebuah upaya memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi dalam sebuah proses politik (Lina Ulfa Fitriani, 2019).

Setiap tahun saat terjadi pemilihan atau pemilu baik pemilihan kepala daerah atau pilkada, pilihan prediden, dan pilihan legislatif arau pileg pastinya masalah politik uang menjadu sebuah masalah yang sering ditemui. Penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu atau bawaslu sering kali melakukan sebuah sosialisasi ke masyarakat bahwa politik uang adalah sebuah pelanggaran pemilu. Namun,meski demikian masyarakat masih banyak yang melakukan praktik politik uang di setiap pemilu. Beragam alasan masyarakat khususnya masyarakat Banjardawa yang masih melakukan politik uang. Salah satunya yaitu Ibu Siti Sholehah yang preferensi pilihannya yaitu uang. Ibu Siti akrabnya mengaku bahwa preferensi pilihannya saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 adalah uang. Hal tersebut berarti bahwa Ia memilih pasangan calon berdasarkan uang, pasangan calon bupati mana yang Ia diberikan uang maka pasangan tersebut yang akan dipilih.

Siti memiliki alasan preferensi pilihannya uang karena Siti tidak mengerti politik dan Siti menilai bahwa siapapun pasangan yang jadi itu tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Ia mencari kesempatan pemilu sebagai peluang mendapatkan uang tambahan dari para politisi-politisi yang bertarung di pemilu. Pada saat pilkada pemalang tahun 2020 pun Ia tetap menentukan preferensi pilihan berdasarkan uang. Siti mencari kandidat calon bupati mana yang memberikan dirinya uang maka pasangan tersebutlah yang akan dipilih saat hari pemilihan.

“Saya saat pilkada tahun 2020 lalu memilih pasangan calon bupati yang memberikan saya uang saat kampanye. Ya alasannya karena memang Saya butuh uang apa lagi saat itu masih pandemi pastinya Saya butuh terus juga

siapun calon bupati yang terpilih itu tidak bisa merubah hidup Saya Jad ya saya memilih uang saat pemilu” (Wawancara, Siti Sholehah, Pemilih Generasi X, 30 Mei 2023).

Masih adanya masyarakat seperti Siti yang kurang peduli terhadap politik dan demokrasi di Indonesia yang masih menjadi sebuah PR bagi pemerintah Indonesia. Kesadaran politik dan demokrasi pastinya penting bagi masyarakat agar pemilu yang berlangsung setiap lima tahun betul-betul menyeleksi dan memilih calon pejabat negara yang berkualitas dan berintegritas bukan dari besaran uang yang diberi setiap kandidat politisi yang bertarung. Jika pilkada setiap kandidat pasangan calon bupati harus bersaing dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat maka terkesan bahwa jika ingin mengabdikan harus memiliki modal yang besar. Pastinya kalau ingin menang harus ada modal uang yang besar dan itu berdampak saat pasangan tersebut menang maka bisa saja yang dipikirkan adalah balik modal. Hal tersebut yang membuat kinerja dari pasangan tersebut bisa saja kurang berintegrasi.

Adapun faktor yang memengaruhi politik uang terus dilakukan oleh masyarakat adalah karena lemahnya pengawasan pemilihan. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih tegas dalam menentukan hukuman politik uang agar pengawasan pemilu bisa terkontrol. Jika hukuman politik uang itu kejam maka bisa saja masyarakat tidak akan mempraktikkan politik uang di setiap momentum pemilu. Selain itu, masyarakat juga harus terus diberikan sosialisasi dampak negatif dari politik uang untuk kedepannya dan masyarakat harus diberikan pendidikan politik agar memiliki kesadaran politik yang tinggi.

Selain preferensi uang ada preferensi klasik lainnya yaitu preferensi partai politik. Preferensi partai politik berarti pemilih memilih berdasarkan partai politik bukan berdasarkan visi dan misi atau program kerja. Mereka yang memiliki preferensi pilihannya partai politik biasanya sudah lama menjadi simpatisan partai politik. Mereka tidak menjadi bagian dari pengurus partai atau pun kader partai tetapi Mereka terus mendukung dan memilih partai tersebut di setiap pemilu. Pada pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 yang lalu pun masyarakat Desa Banjardawa ada yang memiliki preferensi pilihan partai politik.

Usri dan Ahmad Toni adalah contoh masyarakat Desa Banjardawa yang memiliki preferensi pilihannya adalah partai politik. Usri mengaku saat pilkada Kabupaten Pemalang mendukung pasangan calon bupati nomor urut 2 yaitu Mukti Agung Wibowo dan Mansur

Hidayat. Usri memilih pasangan tersebut karena pasangan tersebut didukung dan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Usri merupakan pemilih setia PPP dari zaman orde baru atau saat pertama Usri bisa mencoblos. Ada pun latar belakang Usri setia memilih PPP saat pemilu karena dahulu Ia mengikuti pilihan orang tua yang juga sebagai simpatisan PPP. Pada masa orde baru partai politik di Indonesia hanya ada tiga partai politik yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Semenjak mengikuti pilihan keluarga Usri terus istiqamah menjadi simpatisan PPP hingga sekarang. Setiap ada pemilihan umum baik pilpres, pileh, pilgub, atau pilbup Usri akan memilih dan mendukung pasangan calon yang diusung dan didukung oleh PPP.

“Pilkada kemarin Saya memilih Mas Agung dan Mas Mansur karena pasangan tersebut diusung dan didukung oleh PPP. Saya sejak dulu menjadi simpatisan PPP sejak zaman orde baru ya awalnya ikut pilihan keluarga tetapi setelah itu memang merasa PPP partai yang lebih baik dari lainnya. Saya setiap pemilu pasti pilih PPP begitu pula saat pilkada Kabupaten Pemalang lalu Saya cari kandidat pasangan calon bupati yang diusung oleh PPP yaitu pasangan Mas Agung dan Mas Mansur” (Wawancara, Usri, Pemilih Generasi X, 31 Mei 2023).

Usri yang memang telah menjadi simpatisan PPP sejak dahulu pastinya sudah yakin atas pilihannya yang memilih pasangan calon bupati yang diusung oleh PPP. Selain Usri ada juga Ahmad Toni yang memilih pasangan Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat karena pasangan tersebut didukung dan diusung oleh PPP. Ahmad Toni sendiri menjadi simpatisan PPP sudah sejak dahulu yaitu di era orde baru. Pada awalnya Ahmad Toni mengikuti pilihan sang ustadz yang juga menjadi simpatisan PPP di era orde baru. Selanjutnya ternyata Ahmad Toni merasa PPP memang partai politik yang lebih baik dari yang lain karena banyak di dukung oleh ulama dan juga dinilai dapat mensejahterakan kehidupan tokoh agama di desa.

“Saya kemarin pilkada Pemalang jelas memilih pasangan AMAN atau Agung Mansur karena ya pasangan tersebut diusung oleh PPP. Saya yakin kalau pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh PPP adalah pasangan yang baik dan bagus. PPP pastinya tidak sembarangan dalam mengusung dan mendukung pasangan tersebut. Oleh karena itu Saya sudah yakin dan mantap memilih pasangan tersebut” (Wawancara, Ahmad Toni, Pemilih Generasi X, 6 Juni 2023).

Para simpatisan seperti Usri dan Ahmad Toni adalah seseorang yang setia akan selalu memilih pilihannya. Mereka para simpatisan seperti Usri dan Ahmad Toni bukanlah kader atau pengurus partai politik tetapi Mereka akan terus memilih dan mendukung pilihan partai politik yang sudah didukung setiap pemilu. Padahal Mereka pun tidak mendapatkan

keuntungan langsung saat partai politik pilihannya menang tetapi disitu ada kepuasan jiwa saat pilihannya menang.

“Saya kan dari dulu memilih dan mendukung PPP jadi ya sampai kapan pun PPP terus ya memang PPP menang pun kehidupan Saya tidak berubah Saya tetap berjualan gas tetapi jiwa dan hati Saya senang mas rasanya seperti ya senang jagoannya menang begitu mas” (Wawancara, Ahmad Toni, Pemilih Generasi X, 6 Juni 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terkait preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pematang tahun 2020 bahwa preferensi pilihan masyarakat Desa Banjardawa ada berbagai macam preferensi yaitu preferensi tempat hiburan, preferensi infrastruktur jalan, preferensi umur dan lapangan kerja, preferensi keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah, dan preferensi uang dan partai politik.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan teori pilihan rasional maka preferensi politik pilihan masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada dinilai rasional. Hal tersebut karena menurut substansi dasar teori pendekatan pilihan rasional yaitu pertama terkait tindakan manusia yang pada dasarnya adalah sebuah instrumen dimana perilaku tindakan manusia memiliki tujuan dan tujuan tersebut tersusun secara hierarki. Jika dilihat hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada memiliki tujuan dalam bentuk harapan atau preferensi seperti preferensi tempat hiburan, preferensi infrastruktur jalan dan preferensi lainnya. Preferensi tersebut yang menjadi tujuan dasar masyarakat Desa Banjardawa aktif berpartisipasi memilih saat pilkada Kabupaten Pematang tahun 2020. Selanjutnya substansi dasar berupa aktor yang merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungan. Pada pilkada Pematang 2020 lalu masyarakat memiliki dua pilihan yaitu ikut aktif berpartisipasi memilih atau memilih untuk tidak memilih. Masyarakat yang memutuskan memilih saat pilkada karena adanya kepentingan yang dimiliki dan tertuang dalam preferensi pilihannya. Preferensi tersebut menjadi harapan masyarakat Desa Banjardawa dipilkada kepada para calon kepala daerah Kabupaten Pematang.

Substansi dari pilihan rasional terakhir ialah proses-proses sosial berskala besar. Proses skala besar tersebut yaitu berupa pemilihan umum atau pemilu. Proses pilkada memiliki akibat yang sangat besar terhadap kemajuan daerah. Jadi substansi pilihan rasional ini yaitu adanya proses-proses sosial berskala besar yang memiliki akibat atas keputusannya. Masyarakat yang memutuskan untuk aktif berpartisipasi memilih saat pilkada Pematang merupakan sebuah hasil dari kalkulasi dari pilihan lainnya.

## **BAB V**

### **POLA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA BANJARDAWA SAAT PILKADA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020**

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson merupakan kegiatan yang oleh pelakunya sendiri yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan tetapi juga melalui kegiatan orang lain diluar si pelaku untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dibedakan beberapa bentuk yaitu kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, tindakan kekerasan.

Pada pilkada Kabupaten Pemalang masyarakat Desa Banjardawa memiliki partisipasi pemilih yang cukup aktif. Berdasarkan hasil akhir pilkada bahwa partisipasi pemilih masyarakat Desa Banjardawa sebesar 75%. Partisipasi pemilih tersebut dinilai tinggi karena mengingat saat itu pilkada di laksanakan ditengah pandemi covid-19. Pada saat itu secara umum banyak masyarakat yang juga menolak adanya pilkada. Pada tahun 2020 sendiri menjad sebuah sejarah karena pertama kalinta pilkada serentak di selenggarakan sebagian daerah di Indonesia. Kabupaten Pemalang menjadu salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2020.

Partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa pun terbagi menjadi berbagai bentuk partisipasi. Hal tersebut yang menjadi sebuah fokus pembahasan di Bab 5 ini guna untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu terkait pola partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan sebuah pola partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa peneliti membagi partisipasi politik dalam berbagai bentuk yaitu partisipasi pemilih, partisipasi aktif sebagai penyelenggara pemilu, partisipasi aktif sebagai aktivis politik, dan partisipasi pasif atau golongan putih.

Berikut ini hasil penelitian terkait partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 yang dibagi menjadi beberapa bentuk partisipasi politik berdasarkan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.

#### **a. Masyarakat Pemilih**

Masyarakat Desa Banjardawa berdasarkan data dari KPU bahwa partisipasi pemilihnya mencapai 75% atau berarti partisipasi pemilih saat Pilkada dinilai tinggi meskipun saat itu pilkada dilaksanakan ditengah pademi covid-19 serta saat itu juga banyak masyarakat

Indonesia yang menolak dengan diadakannya pilkada serentak tahun 2020. Pada tahun 2020 memang menjadi hari yang bersejarah karena pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan bahwa pada tahun tersebut digelar pilkada serentak di sebagian wilayah di Indonesia.

Salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya. Saat itu Kabupaten Pematang Jaya memiliki tiga pasangan calon bupati yang meramaikan kompetisi pilkada. Partisipasi pemilih masyarakat Desa Banjardawa yang tergolong tinggi karena ada berbagai alasan yang setiap individunya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Banjardawa aktif dalam berpartisipasi memilih. Sekertaris Desa atau sekdes Desa Banjardawa Rambat mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Banjardawa yang tinggi karena kesadaran politik dan sadar akan demokrasi masyarakat Desa Banjardawa sudah tinggi. Hal tersebut karena Pemerintah Desa selalu rutin kampanye ke masyarakat terkait adanya pilkada tahun 2020.

“Pemerintah Desa Banjardawa rutin melakukan kampanye ke warga melalui setiap kepala dusun baik dilakukan langsung ataupun melalui sosial media khususnya di grup WA RW, RT, atau pun PKK. Hal tersebut alhamdulillah cukup membuat masyarakat sadar politik, sadar demokrasi, dan mau datang untuk memberikan suaranya di Pilkada Kabupaten Pematang Jaya” (Wawancara, Rambat, Sekertaris Desa, 5 Juni 2023).

Aktifnya Pemerintah Desa dalam melakukan kampanye atau sosialisasi dinilai berhasil karena mampu membuat masyarakat Desa Banjardawa datang ke tempat pemungutan suara atau tps saat pilkada tahun 2020. Selain itu, masyarakat Desa Banjardawa yang memiliki kepedulian pendidikan membuat masyarakat banyak yang sadar akan demokrasi dan politik. Masyarakat yang mulai mengerti betapa pentingnya memberikan suara saat pemilu terhadap perubahan kehidupan.

Kepala Desa Banjardawa, Sukandar juga menyampaikan hal yang sama dengan pernyataan Sekertaris Desa, Rambat bahwa masyarakat Desa Banjardawa saat ini sudah mulai sadar akan pentingnya memberikan suara saat pilkada. Faktor yang mungkin memengaruhi menurut Bapak Sukandar ialah tingginya pendidikan masyarakat desa. Masyarakat Desa Banjardawa saat ini yang memiliki kesadaran sekolah pastinya sudah memiliki perubahan dalam berpola pikir. Masyarakat jauh lebih dewasa dalam menghadapi sebuah hal salah satunya adalah pilkada. Masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi adanya pilkada Mereka sudah mengerti betapa pentingnya dampak dari pemilu.

“Saya kira masyarakat Desa Banjardawa yang sudah peduli dengan pendidikan dimana banyak orang tua yang sudah menyekolahi anaknya di perguruan tinggi membuat warga sadar politik juga dan mengerti betapa pentingnya pilkada dalam kehidupan dan Kami selaku Pemerintah Desa juga berupaya keras dengan cara melakukan sosialisasi atau kampanye terkait ke masyarakat Desa Banjardawa ” (Wawancara, Sukandar, Kepala Desa, 12 Juni 2023).

Kesadaran politik masyarakat yang tinggi dan aktifnya Pemerintah Desa Banjardawa dalam melakukan kampanye atau sosialisasi terkait pilkada menjadi poin penting yang membuat partisipasi memilih masyarakat Desa Banjardawa tinggi hingga 75%. Pemilih pemula Siti Hajar menyebut dirinya saat itu sangat antusias dalam menyambut pilkada tahun 2020 yang lalu. Ia mengaku antusias karena itu menjadi momen memilih perdananya. Ia mengaku sudah siap dengan pilihannya karena beberapa faktor salah satunya karena ada keluarga yang menjadi tim sukses pasangan calon. Meskipun sang keluarga yang menjadi tim sukses tidak tinggal di Desa Banjardawa tetapi Siti Hajar tetap diberikan informasi oleh sang pamannya yang menjadi tim sukses.

Saat dirinya diberikan informasi oleh Pamannya Dia merasa semakin optimis dan semangat untuk memilih pasangan tersebut. Dia ingin sekali memberikan sebuah sumbangsih untuk kemajuan Pemalang dengan cara memilih pasangan yang Ia pilih. Siti Hajar melihat visi dan misi pasangan calon yang disosialisasi oleh sang Paman yang menjadi tim sukses.

“Pilkada kemarin Saya perdana memilih jadi saya antusias sekali terus kan saudara saya ada yang menjadi tim sukses Saya kan seperti mendapat informasi terkait visi misi calon tersebut dan setelah itu Saya merasa pasangan tersebut sangat bagus dan cocok memimpin Kabupaten Pemalang. Saat itu Saya pilih pasangan nomor urut 02 yaitu pasangan Agung dan Mansur. Paman Saya yang menjadi tim sukses pasangan tersebut dan Saya yang terus diberikan sosialisasi maka Saya semakin bulat memilih pasangan tersebut. Alasan Saya memilih ya itu karena dapat informasi lebih banyak terus Saya rasa pasangan tersebut menurut Saya yang bisa menyelesaikan isu yang berkembang seperti yang Sudah saya bilang” (Wawancara, Siti Hajar, Pemilih Pemula, 31 Mei 2023).

Siti Hajar memilih berpartisipasi aktif menjadi seorang pemilih karena itu menjadi pengalaman pertama dirinya dalam memberikan suara. Meskipun itu menjadi momentum pertama kali, Siti Hajar tidak bingung dalam menentukan pilihannya karena adanya keluarga yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon bupati. Oleh karena itu Siti Hajar kenal pasangan tersebut dan mengetahui apa visi misi dan program dari pasangan tersebut dan dirinya menilai itu sesuai dengan isu yang berkembang dan sesuai aspirasi dirinya.

Siti Hajar hanya menjadi partisipasi aktif memilih karena jika untuk menjadi tim sukses atau penyelenggara pemilu dirinya mengaku belum siap. Ia merasa bahwa dirinya masih belum berani untuk menjadi tim sukses karena Ia kurang mengerti tentang politik. Selain itu, Dia tidak menjadi penyelenggara pemilu karena kurang mendapatkan informasi terkait perekrutan menjadi penyelenggara pemilu.

Para pemilih pemula memang sangat menyambut antusias karena hal tersebut menjadi pengalaman pertama dirinya dalam memilih calon pemimpin daerahnya atau pun para wakil rakyat. Hal tersebut karena para pemilih pastinya tidak ingin meninggalkan momen perdana ikut langsung berpartisipasi dalam mengubah Indonesia lebih baik lagi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Puput dan Gina yang menyebut Mereka saat antusias dalam melaksanakan pemilihan pertamanya. Puput menyebut akhirnya momentum memilih saat pemilu yang di nantinya tiba. Ia yang sejak dulu hanya melihat keramaian pemilu melalui sosial media atau hanya melihat para orang-orang dewasa ramai-ramai datang ke TPS. Oleh karena itu Puput sangat menyambut antusias pilkada karena akhirnya Dia bisa merasakan apa yang dia inginkan. Adapun untuk pasangan calon yang dipilih Dia mengaku mengikuti pilihan kedua orang tua. Puput menyebut kurang mengerti terkait pasangan calon bupati yang bertarung di Pilkada. Namun, meski demikian dirinya tetap antusias dan terkait pilihannya Ia mengikuti apa yang orang tua pilih.

“Saya antusias banget mas milih perdana saat itu meski pun Saya tidak begitu kenal masing-masing calon. Namun, dalam menentukan pilihan Saya ikut pilihan orang tua karena Saya percaya pilihan orang tua baik makanya Saya ikut mas” (Wawancara, Puput Nur Maulidiyah, Pemilih Pemula, 30 Mei 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gina yang juga merupakan seorang pemilih pemula. Ghina mengaku sangat bingung karena Sang Ayah yang berprofesi sebagai TNI dan tidak mencoblos maka Dia dalam menentukan pilihannya melalui sosial media. Melalui sosial media Gina mencari informasi terkait para pasangan calon bupati tetapi Gina mengaku mendapat informasi hanya sedikit dan tidak detail. Namun meski demikian dirinya yakin dengan pilihannya.

Berbeda dengan para pemilih pemula yang masih bingung dalam menggali informasi dan cenderung mengikuti pilihan orang terdekat, maka para pemilih milenial atau generasi x yang sudah memiliki pengalaman dalam pemilu dan rata-rata pemilih milenial sudah tau bagaimana mendapatkan informasi terkait para kandidat. Para pemilih milenial biasanya sudah memiliki sebuah pilihan saat pemilu. Mereka biasanya memilih dengan pilihan

sebelumnya jika menurutnya pilihan sebelumnya bekerja baik. Generasi Y yang sangat dekat dengan teknologi pastinya dengan sangat mudah melihat dan mengontrol pilihan sebelumnya bagaimana kinerjanya melalui sosial media.

Para pemilih milenial Desa Banjardawa menentukan pada sebuah pilihan karena adanya sebuah kepentingan yaitu sebuah isu atau aspirasi yang ada dibenak para pemilih. Ada berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020. Isu yang berkembang tersebut yang menjadi dasar pemilih generasi Y untuk datang ke tps dan memilih pasangan calon bupati. Salah satunya yaitu Machfud Alamul Huda yang sudah menentukan pilihan karena dirinya memiliki sebuah isu atau aspirasi saat pilkada tahun 2020. Ia menyebut saat pilkada ada sebuah isu khususnya bagi para pemilih generasi Y. Adanya isu yang dijadikan sebuah kepentingan Machfudz Alamul Huda untuk berpartisipasi memilih. Ia saat itu mengakui memilih pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat. Adapun Machudz menyebut alasannya karena pasangan calon bupati tersebut yang dirasa mampu menyelesaikan isu yang Ia ingin aspirasikan.

“Saat pilkada Saya kan memiliki sebuah isu yang ingin diaspirasikan yaitu terkait kedekatan pemerintah daerah kepada pemuda. Nah Saya melihat pasangan nomor urut 2 bisa lebih dekat dengan organisasi pemuda gitu. Hal tersebut Saya lihat saat kampanye pasangan tersebut yang dekat dengan komunitas atau organisasi pemuda dari pasangan lain. Jadi saya saat itu memilih pasangan tersebut dengan cukup yakin dan mantap” (Wawancara, Machfudz Alamul Huda, Pemilih Muda, 14 Juni 2023).

Kedekatan pasangan nomor urut 2 yaitu Mukti Agung dan Mansur Hidayat dengan komunitas atau organisasi anak muda dirasa memang sangat memiliki dampak besar bagi pasangan tersebut. Banyaknya pemilih muda atau milenial yang jatuh hati pada pasangan tersebut karena memang pasangan tersebut lebih dekat dengan pemuda daripada pasangan lainnya. Pasangan tersebut pernah mengadakan sebuah diskusi kepada hampir seluruh perwakilan komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Pematang Jaya khususnya organisasi mahasiswa tempat berkumpulnya mahasiswa pematang yang sedang kuliah di kampus luar pematang. Acara tersebut dinilai mampu mendapat simpatisan dari para pemuda atau mahasiswa Pematang seperti halnya dengan Machfudz Alamul Huda dan Habiburroham yang turut hadir dalam acara tersebut.

Namun, tidak semua pemilih generasi milenial memilih pasangan nomor urut 2. Salah satunya yaitu Irkham Maulana yang memutuskan memilih pasangan yang lain. Ia mengaku

memilih pasangan nomor urut 3 yaitu Iskandar Ali Syahbana dan Ahmad Agus Wardana. Adapun alasan Irkham Maulana memilih pasangan tersebut karena Ia ingin Bupati yang baru. Seperti yang Kita ketahui bersama calon bupati nomor urut 1 yaitu Bapak Agus Sukoco adalah ketua DPRD Kabupaten Pemalang dan calon bupati nomor urut 2 adalah Mantan Wakil Bupati Pemalang. Hal tersebut yang membuat Irkham Maulana ingin yang jadi yaitu orang baru di politik birokrasi Pemalang. Ia mengaku tidak puas dengan kinerja Bapak Agus Sukoco saat di legislatif dan Bapak Agung saat menjadi Wakil Bupati.

“Saya ikut memilih dan semangat memilih pasangan baru yaitu nomor urut 3 pasangan Iskandar Ali Syahbana dan Ahamad Agus Wardana karena Saya yakin jika orang baru pasti dapat merubah birokrasi Pemalang. Apalagi Pak Iskandar Ali masig tergolong muda pastinya punya ide gagasan yang kreatif dan keren dalam memajukan Pemalang. Hal tersebut pastinya menurut Saya pasangan Iskandar Ali dan Agus bisa mengatasi isu yang berkembang yang sudah saya sebut” (Wawancara, Irkham Maulana, Pemilih Muda, 9 Juni 2023)

Adanya pasangan baru membuat pilkada Kabupaten Pemalang lebih berwarna dan pastinya ada banyak gagasan baru yang dilemparkan oleh pasangan muda tersebut. Iskandar Ali Syahbana memang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum partai PKB Kabupaten Pemalang tetapi Beliau sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai pejabat politik di Kabupaten Pemalang baik di legislatif atau pun eksekutif. Hal tersebut yang membuat sedikit banyak masyarakat yang menunggu gebrakan baru dari Iskandar Ali Syahbana. Irkham Maulana adalah salah satu masyarakat yang menunggu gebrakan baru Iskandar Ali saat pilkada yang lalu.

Pemilih generasi Y yang cenderung lebih aktif dalam mencari informasi para kandidat pasangan calon bupati meskipun dirinya mungkin sudah memiliki orientasi pilihan. Hal tersebut berbeda dengan pemilih generasi Z yang sepertinya sudah tidak begitu memperhatikan visi atau misi. Banyak pemilih yang sudah menentukan pilihan berdasarkan partai politik atau pun berdasarkan keuntungan apa yang akan dia dapat jika memilih salah satu calon. Salah satunya yaitu Siti Mutmainah yang memilih pasangan calon berdasarkan keuntungan apa yang Ia dapat. Siti Mutmainah yang kesehariannya berprofesi sebagai wirausaha catering Ia memiliki isu terkait harga bahan pokok yang sering meningkat. Terkait hal tersebut Ibu Siti Mutmainah percaya dengan pasangan nomor 1 yaitu pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono. Siti Mutmainah melihat pengalaman Bapak Agus Sukoco yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten pastinya memiliki pengalaman dalam mengendalikan hal tersebut.

“Saat pilkada yang lalu Saya percaya pasangan nomor urut 1 bisa menjawab isu-isu tersebut karena menurut Saya pengalaman Bapak Agus yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD dan berpengalaman di legislatif pasti bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa mengendalikan harga bahan pokok sembako” (Wawancara, Siti Mutmainah, Pemilih Generasi X, 30 Mei 2023).

Berlandaskan sebuah isu dan kepentingan yang akan didapatkan oleh Siti Mutmainah yang menjadi dasar beliau berangkat ke tps dan memilih nomor urut 1. Beliau yakin saat pilihannya menang maka harga sembako dapat dikendalikan dan pastinya bermanfaat untuk beliau yang dalam sehari-harinya memasak untuk catering. Namun, beda halnya dengan Siti Mutmainah, Emi yang memilih pasangan nomor urut 2 dengan alasan karena beliau kenal dengan tim suksesnya dan karena itu dirinya lebih mengerti bagaimana visi misi pasangan nomor urut 2. Jadi isu yang dirinya ingin menyampaikan yaitu isu terkait kenaikan umr dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok pastinya pasangan nomor urut 2 bisa mengatasi. Emi mengingatkan bahwa Mukti Agung yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati pastinya paham dalam mengatasi isu tersebut.

Mukti Agung Wibowo memang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2010-2015 bersama Juanedi. Hal tersebut yang membuat sebagian masyarakat Desa Banjardawa percaya atas pengalaman Agung terahulu dan pastinya akan bisa lebih mudah dalam menyelesaikan isu yang berkembang. Sebenarnya pada pilkada tahun 2020 lalu Agus Sukoco menjadi sebuah penantang berat Mukti Agung karena Agus Sukoco juga sudah dikenal masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya Desa Banjardawa karena dirinya sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Pemalang.

Berbeda dengan pemilih generasi X Siti Mutmainah dan Emi yang memilih pasangan calon bupati dari sebuah *track record* pasangan calon, Siti Sholehah masih memilih berdasarkan keuntungan sesaat seperti halnya politik uang. Ia mengaku bahwa akan memilih pasangan calon bupati jika dirinya mendapatkan amplop. Saat itu dirinya mengaku memilih pasangan karena mendapat amplop dari pasangan calon bupati tersebut. Hal tersebut Ia lakukan karena Ia berpikir siapapun yang jadi tidak bisa merubah banyak hidupnya dan oleh karena itu Ia hanya bisa memanfaatkan momentum pilkada sebagai momentum mendapatkan rezeki.

“Saya berpartisipasi karena ada dorongan mas. Nah saat itu saya dapat amplop dari salah satu pasangan calon bupati yang membuat Saya semangat memilih mas karena menurut saya siapapun yang jadi tidak bisa merubah hidup saya 100% maka dari itu saya hanya mengambil amplopnya. Meski saya tau tadi Saya memiliki sebuah keinginn terhadap kandidat tetapi saya percaya semua baik

mungkin dan saya memilih yang memberikan saya uang” (Wawancara, Siti Sholehah, Pemilih Generasi X, Siti Sholehah).

Politik uang memang menjadi masalah klasik saat pemilu berlangsung. Adanya masyarakat Desa Banjardawa yang berpikiran untuk berpolitik uang ini menjadi sebuah PR banyak pihak khususnya bagi penyelenggara pemilu agar bisa lebih di awasi terkait politik uang. Politik uang memiliki dampak yang buruk karena dapat membuat citra politik buruk seperti bahwa politik mahal karena jika akan masuk politik butuh dana banyak dan seolah-olah suara masyarakat dapat dibeli dengan uang. Padahal demokrasi ialah menuntut agar masyarakat memilih pejabat politik dengan hati nurani atau visi misi gagasan ide para kandidat bukan karena diberi uang atau tidak.

Berbeda dengan yang lain pemilih generasi X Usri dan Ahmad Toni memilih pasangan bupati melihat dari siapa partai yang mengusungnya. Dalam hal ini Usri dan Ahmad Toni merupakan pemilih setia partai persatuan dan pembangunan atau PPP. Hal tersebut yang membuat Usri dan Ahmad Toni memilih pasangan nomor urut 2 yaitu Mukti Agung dan Mansur Hidayat. Adapun alasannya karena pilihan sejak dahulu yaitu memilih PPP karena partai PPP menjadi partai yang berdiri sejak dahulu dan Usri dan Ahmad Toni sudah menjadi pemilih setia PPP.

Adapun Usri memilih menjadi pemilih setia karena dahulu Ia mengikuti suami yang menjadi relawan PPP sejak dahulu. Hal tersebut yang membuat dirinya mengikuti menjadi pemilih setia PPP hingga saat ini.

“Saya sejak dulu sih mendukung PPP awalnya ikut suami karena kebetulan juga jadi semacam relawanya. Dahulu kan partai hanya ada 3 PDIP, PPP, dan Golkar nah karena saya PPP maka saa ikut dan itu sampai sekarang saya tetap dukung PPP” (Wawancara, Usri, Pemilih Generasi X, 31 Mei 2023).

Sementara itu Ahmad Toni sejak dahulu sudah memilih PPP karena dahulu saat Ahmad Toni masih remaja Beliau mengikuti pilihan guru ngajinya. Beliau tetap mendukung PPP dari dahulu saat remaja hingga kini. Perlu diketahui dahulu hampir banyak ulama yang mendukung PPP khususnya ulama yang tidak menjadi perangkat desa atau para ulama yang memiliki keyakinan tangguh untuk memangkan partai islam. Ahmad Toni pun terus konsisten atas pilihannya karena mengikuti guru ngajinya.

“Saya dari dahulu hingga sekarang memilih di pemilu selalu melihat partainya. Calon siapa yang didukung oleh PPP maka saya akan memilikinya. Hal tersebut karena saya mengikuti pilihan guru ngaji saya dahulu saat saya masih remaja. Jadi hingga saat ini saya masih mengikutinya karena saya percaya pilihan guru insya Allah baik” (Wawancara, Ahmad Toni, Pemilih Generasi X, 6 Juni 2023).

Partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa khususnya dalam hal berpartisipasi memilih memiliki sebuah keragaman dalam alasan aktif berpartisipasi aktif memilih dan alasan mengapa memilih pasangan tersebut. Mayoritas dalam aktif berpartisipasi memilih karena sudah banyak yang sadar politik dan sedikit diisi dengan kepentingan seperti setiap individu hampir seluruh memiliki isu yang diaspirasikan ke pasangan calon. Namun, ada juga yang alasan aktif berpartisipasi memilih karena ada dorongan seperti politik uang. Adapun alasan mengapa memilih satu pasangan juga dilandasi berbagai alasan ada yang karena memang melihat latar belakang, ada yang melihat siapa tokoh dibalik pasangan tersebut, ada juga yang melihat partai politik siapa yang mengusung pasangan tersebut, hingga ada yang karena adanya politik uang.

Keragaman pilihan dan alasan setiap individu di pilkada Kabupayem Pemalang tahun 2020 ternyata tidak membuat Mereka saling memengaruhi orang lain. Artinya bagi setiap masyarakat yang sudah menentukan pilihannya tidak akan memengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Hal tersebut karena masyarakat Desa Banjardawa sudah sadar akan demokrasi dimana beda pilihan adalah hal yang wajar jadi selama dirinya bukan lah tim sukses tidak akan memengaruhi orang lain untuk mengikuti pilihannya.

#### **b. Masyarakat sebagai Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggara pemilu adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Penyelenggara Pemilu atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebagai sebuah satu kesatuan yang berfungsi menyelenggarakan sebuah pemilu untuk memilih DPR RI, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta Bupati/Walikota secara langsung oleh rakyat (Humas, 2023). Pada pilkada Kabupaten Pemalang partisipasi masyarakat Desa Banjardawa tidak hanya menjadi pemilih banyak juga masyarakat Desa Banjardawa yang berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dalam tingkat Kabupaten memiliki lembaga dibawahnya seperti KPU ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panwaslu Desa (PKD). Pada pilkada tahun 2020 Kabupaten Pemalang masyarakat Desa Banjardawa cukup banyak yang memilih menjadi seorang penyelenggara pemilu tingkat desa seperti KPPS dan PKD. Ada berbagai alasan masyarakat Desa Banjardawa yang memilih menjadi penyelenggara pemilu saat pilkada Kabupaten Pemalang. Salah satunya yaitu Nayun yang memilih untuk menjadi penyelenggara pemilu yaitu menjadi KPPS pada pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020.

Pada saat itu adalah pengalaman perdana Nayun menjadi seorang anggota KPPS. Ia mengaku mendapat informasi terkait rekrutmen KPPS berasal dari kepala dusunnya. Saat itu ada informasi di grup RT yang disebar oleh kepala dusun. Informasi dari Pemerintah Desa memang dinilai cukup baik dan masif. Saat mendengar informasi tersebut Nayun pun langsung mencoba untuk mendaftar karena Ia ingin memiliki pengalaman menjadi penyelenggara pemilu. Adapun alasan lebih memilih KPPS dari pada penyelenggara pemilu yang lain atau menjadi tim sukses karena Ia merasa minim pengalaman. Oleh karena itu Ia menilai alangkah baiknya belajar yang ringan dulu yaitu menjadi anggota KPPS.

“Saya saat itu memilih aktif menjadi bagian anggota KPPS karena Saya ingin mencari pengalaman di dunia politik. Kalau Saya menjadi Panwas atau bahkan tim sukses Saya rasa Saya belum siap karena minimnya pengetahuan Saya tentang politik. Kalau KPPS kan Saya rasa lebih mudah karena hanya begitu-begitu saja. Kalau menjadi panwas atau tim sukses saya kira perlu pengalaman dan ilmu politik ya. Selain itu menjadi KPPS juga lumayan sih mas mendapat honor dan honor nya juga alhamdulillah buat nambah jajan” (Wawancara, Nayun Anna Azzahra, Anggota KPPS, 23 Mei 2023).

Selain Nayun, ada Tania Putri Novitasari yang memilih menjadi partisipasin aktif sebagai anggota KPPS juga. Tania mendapatkan informasi terkait pendaftaran KPPS dari orang tuanya yang diberikan informasi oleh kepala dusun. Tania memutuskan untuk ikut menjadi KPPS karena ingin mencari pengalaman karena saat itu Ia sedang berkuliah online dan ingin mencari sebuah kesibukan. Ia pun tidak mengaku ada paksaan dari siapapun dalam mendaftar menjadi anggota KPPS. Ia menjelaskan murni ingin mencari pengalaman dan mengisi waktu kosong karena kuliahnya online.

“Aku ikut KPPS dapat informasi dari orang tua dan Aku tertarik si karena saat itu kan kuliah online di rumah jadi Aku cari kegiatan ya menjadi anggota KPPS. Jadi Aku benar-benar tertarik ingin mencoba karena itu perdana Aku mas. Namun, ternyata alhamdulillah ternyata menjadi anggota KPPS ternyata ada honor yang lumayan ya buat nambah uang jajan. Jadi ya beruntung sekali ikut anggota KPPS” (Wawancara, Tania Putri Novitasari, Anggota KPPS, 28 Mei 2023).

Alasan mencari pengalaman adalah alasan mendasar bagi masyarakat Desa Banjardawa yang saat itu perdana menjadi penyelenggara pemilu. Menjadi seorang penyelenggara merupakan bentuk partisipasi aktif yang membantu menyukseskan demokrasi di Indonesia. Masyarakat Desa Banjardawa yang memilih menjadi anggota KPPS pertama kali biasanya masyarakat yang tergolong generasi Y dan biasanya masih melanjutkan sekolah di perguruan tinggi atau baru lulus sekolah.

Beda halnya dengan Nayun dan Tania, Riris dan Shofatun yang saat itu menjadi anggota KPPS untuk sekian kaliannya. Bahkan Riris saat tahun 2020 menjadi Ketua KPPS. Riris memiliki sebuah alasan mengapa dirinya memilih kembali menjadi KPPS karena ingin mengabdikan kepada negara melalui menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Sebelumnya, Riris pernah menjadi anggota KPPS dan saat Pilkada tahun 2020 Riris menjadi ketua KPPS karena pengalamannya sebelumnya. Riris tetap mengambil menjadi KPPS karena ia menilai KPPS cukup fleksibel dari penyelenggara pemilu lainnya seperti PPK, PPS, atau PKD. Riris juga yang bekerja di Kota Tegal pastinya waktunya padat dan menjadi KPPS meski menjabat Ketua ia mengungkapkan itu cukup fleksibel karena KPPS juga waktu kerjanya lebih sedikit dan lebih cepat periode waktunya.

“Saya saat pilkada tahun 2020 kembali memilih untuk menjadi KPPS bahkan menjadi ketua mungkin karena saya di pemilu sebelumnya sudah pernah menjadi anggota KPPS maka dari itu saya di jadikan Ketua. Saya kembali memilih penyelenggara pemilu menjadi KPPS karena itu yang menurut saya lebih fleksibel dan waktu kerjanya lebih singkat dari pada penyelenggara pemilu sebelumnya yaitu PPS dan PPK serta PKD. Saya kerja juga mas di Kota Tegal jadi waktu terbatas makanya saya kembali memilih menjadi KPPS tetapi di pemilu selanjutnya saya ingin karier meningkat mungkin menjadi PPS atau PPK. Tujuannya saya memang ingin membantu menyukseskan pemilu agar lancar mas” (Wawancara, Riris Afifa, KPPS, 2 Juni 2023).

Sementara itu, Shofatun yang juga memilih untuk kembali menjadi KPPS saat pilkada Kabupaten Pemalang beralasan karena dirinya memang mendapat informasi pendaftaran hanya tentang KPPS. Ia mengaku tidak mendapat informasi terkait penyelenggara pemilu lain seperti PPK atau PKD. Saat itu dirinya yang menjadi mahasiswa tingkat akhir pun segera mendaftar KPPS setelah mendapat informasi pembukaan KPPS. Shofatun yang

periode sebelumnya juga pernah menjadi KPPS mengerti bahwa honor KPPS cukup lumayan. Hal tersebut yang juga disebut menjadi salah satu alasannya mendaftar kembali menjadi KPPS.

“Saya kembali mendaftar KPPS karena waktu itu ingin nambah pengalaman lagi tetapi sebenarnya Saya kurang tau informasi terkait penyelenggaraan pemilu lainnya seperti PPK atau PKD. Hal tersebut yang membuat saat mendengar informasi pembukaan pendaftaran KPPS Saya langsung mendaftar mas. Saya yang pemilu sebelumnya pernah jadi KPPS dan tahu honor lumayan ya itu juga salah satu faktor pendorong juga si. Insya Allah Saya ingin di pemilu selanjutnya meningkat ya tidak di KPPS lagi mungkin PPK” (Wawancara, Shofatun, KPPS, 2 Juni 2023).

Salah satu alasan atau faktor pendorong masyarakat Desa Banjardawa memilih aktif berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu sebagai KPPS adalah honor yang di nilai cukup tinggi dan kerja KPPS yang lebih cepat dari penyelenggara pemilu lainnya. Pada saat itu honor yang di dapat oleh KPPS adalah sebesar Rp 500.000 per orang. Honor yang cukup tinggi dan kontrak waktu kerja yang cepat dan jam kerja dinilai lebih fleksibel membuat masyarakat Desa Banjardawa cukup banyak yang minat mendaftar menjadi KPPS.

Selain KPPS masyarakat Desa Banjardawa ada yang berpartisipasi aktif menjadi Panwaslu Desa/Kelurahan atau PKD. Pada setiap momen pemilu yang menjadi PKD setiap desa atau kelurahan hanya ada satu orang. Pada saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 yang menjadi PKD Desa Banjardawa adalah Muhammad Bagus. Muhammad Bagus atau biasa akrab dipanggil Bagus mengaku sudah sejak dahulu menjadi penyelenggara pemilu. Saat pertama Ia pernah menjadi KPPS dalam pemilu tahun 2019 dan saat tahun 2020 Ia mencoba untuk mendaftar PKD dan ternyata dirinya lulus.

Bagus menyatakan bahwa alasan dirinya saat pilkada memilih PKD karena saat itu periode pendaftaran penyelenggara pemilu PKD terlebih dahulu yang membuka. Saat itu dirinya mencoba untuk mendaftar PKD dan ternyata Mas Bagus dinyatakan lulus dan menjadi PKD Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020.

“Saya memang sejak dahulu lebih tertarik menjadi penyelenggara pemilu baik di lembaga KPU atau Bawaslu. Nah saya awal menjadi KPPS saat pemilu tahun 2019 selanjutnya di tahun 2020 Saya melihat pendaftaran PKD terlebih dahulu. Awalnya Saya coba-coba mendaftar eh ternyata alhamdulillah lulus menjadi PKD” (Wawancara, Muhammad Bagus, PKD, 28 Mei 2023).

PKD memiliki sebuah tugas untuk mengawasi jalannya pemilu di tingkat desa. PKD sama seperti halnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tetapi PKD bertugas di wilayah desa atau kelurahan. PKD mengawasi jalannya pemilu sejak sebelum pemilihan, saat pemilihan, hingga pasca pemilihan. PKD harus terus memantau dan berkomunikasi ke Panwascam atau pengawasan di tingkat kecamatan. Adapun masa kerja PKD adalah saat tahap awal pilkada hingga tahap akhir pilkada selesai.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai PKD Muhammad Bagus mengakui bahwa masyarakat Desa Banjardawa saat proses pilkada baik dari masa kampanye, masa hari pemilihan, hingga masa pasca pemilihan dinilai cukup tertib dan aman. Bagus menyebut perbedaan argumen, pilihan, dan pendapat pastinya ada ditengah masyarakat Desa Banjardawa tetapi hal tersebut tidak sampai menimbulkan tindakan kekerasan.

### **c. Masyarakat sebagai Tim Sukses**

Partisipasi aktif masyarakat Desa Banjardawa selanjutnya yaitu ada yang menjadi tim sukses pasangan calon bupati. Setiap pasangan calon bupati pastinya memiliki sebuah tim sukses untuk membantu pasangan tersebut selama masa kampanye. Tim sukses biasanya berisi para anggota partai penugusng atau koalisinya dan para relawan yang mendukung pasangan tersebut.

Pada pilkada Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 lalu Desa Banjardawa masyarakat Desa Banjardawa cukup banyak yang menjadi tim sukses setiap pasangan calon bupati. Adapun alasan masyarakat Desa Banjardawa menjadi tim sukses pasangan calon sangat beragam mulai dari ada yang memang menjadi pengurus partai politik tingkat ranting hingga menjadi relawan karena sudah menjadi pemilih setiap partai politik yang mengusung pasangan tersebut. Masyarakat Desa Banjardawa yang menjadi tim sukses salah satunya yaitu Vidi Kurniawan. Vidi Kurniawan yang saat itu menjadi tim sukses pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu Agus Sukoco dan Eko Priyono dan diusung oleh koalisi partai PDIP, Golkar, dan Nasdem.

Vidi Kurniawan menjadi tim sukses pasangan tersebut karena Ia adalah ketua ranting PDIP Desa Banjardawa. Ia menjabat ketua ranting sejak tahun 2015 atau sejak pilkada tahun 2015. Oleh karena itu dirinya yang menjabat sebagai ketua ranting PDIP Desa Banjardawa Ia menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon bupati nomor urut 1 yang diusung oleh PDIP. Vidi Kurniawan memang sudah lama menjadi kader PDIP karena sudah turun temurun. Vidi Kurniawan menyebut sejak zaman tahun orde baru dirinya sudah

menjadi seorang Soekarnoisme dimana Ia sudah kagum dengan pemikiran-pemikiran Presiden Soekarno. Ia pun memiliki sebuah buku tentang Soekarno dimana itu pemberian dari orang tuanya. Hal tersebut yang membuat dirinya sejak dulu selalu mendukung PDIP disetiap pemilu. Saat ini pun ia menjabat sebagai ketua ranting PDIP Desa Banjardawa karena merasa terpanggil sebagai seorang Soekarnoisme.

“Pastinya saat pilkada Kabupaten Pemalang Saya dukung pasangan PDIP yaitu Bapak Agus Sukoco dan Bapak Eko Priyono. Saya yang juga ketua ranting PDIP memiliki tanggung jawab untuk memenangkan pasangan tersebut. Saya seorang Soekarnoisme pastinya akan tetap mendukung dan memilih PDIP dimana PDIP adalah partainya Soekarno” (Wawancara, Vidi Kurniawan, Tim Sukses dan Ketua Ranting PDIP, 12 Juni 2023).

Vidi Kurniawan pun menyebut bahwa menjadi seorang tim sukses dan ketua ranting PDIP pastinya saat kampanye dirinya telah menyiapkan strategi untuk pasangan calon nomor urut 1. Bapak Vidi Kurniawan menyebut strategi yang dilakukannya yaitu akar rumput. Strategi tersebut dimana ia membentuk sebuah anak ranting. Anak ranting merupakan para relawan PDIP disetiap RW dan bertugas untuk berkampanye disetiap RT yang terdapat di RW tersebut. Dalam membentuk anak ranting Vidi Kurniawan mengaku melakukan komunikasi ke Pemerintah Desa terkait data masyarakat yang Ia kira mau dan mampu bekerjasama menjadi anak ranting. Strategi tersebut diterapkan oleh Vidi Kurniawan dengan harapan kampanye bisa dilakukan lebih tepat sasaran.

“Saat pilkada tahun 2020 lalu Saya menerapkan strategi kampanye dengan cara jemput bola artinya begini Saya bentuk anak ranting di setiap RW. Anak ranting sendiri bisa kader PDIP atau para relawan. Selanjutnya anak ranting bertugas kampanye disetiap RT yang ada di wilayahnya semacam jemput bola begitu mas. Saya membentuk anak ranting itu awalnya ke Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun untuk melihat data masyarakat per dusun nah diistu Saya yang menyeleksi sekiranya siapa yang dirasa mau dan mampu menjadi anak ranting dan ikut berkampanye memenangkan pasangan Agus Sukoco” (Wawancara, Vidi Kurniawan, Tim Sukses dan Ketua Ranting PDIP, 12 Juni 2023).

Tim sukses pasangan bupati nomor urut 1 di Desa Banjardawa memiliki sebuah strategi kampanye jemput bola yang dinilai cukup bisa efektif. Hal tersebut berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 3 yaitu Iskandar Ali Syahbana dan Ahmad Agus Wardhana. Firman Fatoni yang juga menjabat sebagai ketua ranting PKB Desa Banjardawa menyebut bahwa kampanye yang dilakukan tim sukses pasangan nomor urut 3 melalui para tokoh agama. Pasangan nomor urut 3 diusung oleh PKB dan PKS dimana kedua partai tersebut merupakan partai islami. Firman Fatoni menyebut dalam memperkenalkan visi misi Kita para timses meminta tokoh agama untuk memperkenalkan kepada jamaahnya terkait sosok pasangan calon bupati nomor 3 yaitu Bapak Iskandar Ali.

Firman Fatoni saat pilkada Kabupaten Pemalang menjabat ketua ranting PKB Desa Banjardawa dan dirinya menjabat sudah sejak pemilu tahun 2014 yang lalu. Meskipun

Beliau menjabat sebagai Ketua ranting PKB Desa Banjardawa tetapi beliau mengaku tidak begitu memaksa para jamaahnya untuk mengikuti pilihannya. Beliau menyebut saat dirinya sedang bersyiar Beliau tetap menyampaikan dan memperkenalkan Iskandar Ali Syahbana calon bupati sekaligus ketua DPC PKB Kabupaten Pemalang.

“Saya tetap meminta tolong kepada ulama-ulama desa yang menjadi simpatisan PKB untuk membantu kampanye dengan cara mensosialisasikan dan memperkenalkan Bapak Iskandar. Namun, Saya himbau untuk tidak memaksa jamaahnya untuk mengikuti pilihan. Hal tersebut juga saya lakukan ke jamaah Saya karena Kami hanya diberi tugas untuk kampanye dan sosialisasi bukan untuk memaksa jamaah mengikuti pilihan kita” (Wawancara, Firman Fatoni, Tim Sukses dan Ketua Ranting PKB, 9 Juni 2023).

Masyarakat Desa Banjardawa yang menjadi Ketua Ranting sekaligus tim sukses pasangan calon bupati pastinya memiliki tugas dari partai untuk memenangkan pasangan calon bupati yang di usung oleh partai politiknya. Hal tersebut yang dilakukan oleh Vidi Kurniawan dengan partai PDIP nya dan Firman Fatoni dengan partai PKB nya. Para relawan setiap pasangan calon bupati yang ada di Desa Banjardawa pastinya berkoordinasi dengan ranting partai pengusung pasangan calon. Koordinasi bertujuan agar kampanye bisa seragam dan teratur antara kader partai dan para relawan pasangan calon bupati.

Saat melakukan kampanye dalam pilkada Kabupaten Pemalang pastinya ada sebuah kendala. Kendala paling dirasakan yaitu karena adanya pandemi covid-19 dimana saat itu aturan melarang adanya kerumunan massa yang banyak. Oleh karena tim sukses seperti Vidi Kurniawan dan Firman Fatoni harus memikirkan ulang cara berkampanye. Jika Vidi Kurniawan memilih dengan cara jemput bola yaitu dengan membentuk anak ranting di setiap RW dan anak ranting memiliki tugas untuk berkampanye ke rumah-rumah di kawasan RW nya. Sementara Firman Fatoni dengan meminta bantuan tokoh agama yang memiliki jamaah untuk membantu sosialisasikan visi dan misi serta program kerja pasangan calon bupati nomor urut 3 yaitu Iskandar Ali Syahbana dan Ahmad Agus Wardhana.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 terdiri atas partisipasi aktif pemilih, partisipasi aktif menjadi penyelenggara pemilu yaitu anggota kpps dan pkd, dan partisipasi aktif sebagai tim sukses pasangan calon bupati. Tingkat partisipasi pemilih di Desa Banjardawa juga tinggi yaitu sekitar 75% ditengah cukup banyaknya masyarakat yang menolak adanya pilkada serentak di sebagian wilayah di Indonesia.

Hasil penelitian diatas jika dianalisis menggunakan teori partisipasi politik menurut Samuel P.Huntington dan Joan Nelson bahwa pola prstisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa adalah kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan. Pada hasil penelitian yang ada bahwa pola partisipasi pertama ialah kegiatan pemilihan. Pada pola kegiatan pemilihan yang ada di tengah masyarakat Desa Banjardawa adalah masyarakat pemilih dan masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu seperti kpps dan pkd. Kegiatan pemilihan menurut Samuel P.Huntington dan Joan Nelson ialah kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan seperti sumbangan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dan sebagainya. Pada implikasi pola partisipasi kegiatan pemilihan saat pilkada Kabupaten Pemalang di Desa Banjardawa yaitu sebagai masyarakat yang hanya memilih dimana dalam hal ini ada 13 narasumber. Ada berbagai faktor pendorong 13 narasumber yang memutuskan untuk memilih menjadi pemilih saat hari pemilihan. Faktor tersebut yaitu keberadaan tempat hiburan, pembangunan infrastruktur jalan, kenaikan umr dan peningkatan lapangan kerja, adanya keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah, serta uang dan partai politik. Selain masyarakat pemilih yang termasuk pola kegiatan pemilihan yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pemilu. Narasumber yang menjadi penyelenggara pemilu pada penelitian ini terdiri atas 5 narasumber yang terdiri atas 4 menjadi anggota kpps dan 1 menjadi pengawas pemilu tingkat desa atau PKD. Masyarakat yang memutuskan menjadi penyelenggara pemilu juga didasarkan atas beberapa alasan atau faktor pendorong yaitu mencari pengalaman dan mencari uang tambahan menjadi penyelenggara pemilu.

Selanjutnya pola partisipasi yang ada yaitu *lobbying* dan yang termasuk dalam pola partisipasi *lobbying* adalah adanya kegiatan tim sukses yang melakukan *lobbying* terhadap para tokoh agama. Pola partisipais *lobbying* menurut Samuel Huntington adalah kegiatan atau upaya-upaya yang memiliki tujuan memengaruhi keputusan mereka. Hal tersebut dilakukan oleh salah satu tim sukses yaitu Firman Fatoni yang melakukan lobby kepada tokoh agama islam masyarakat Desa Banjardawa untuk menjadi simpatisan dan mensosialisasikan visi dan misi serta program kerja dari pasangan calon yang di dukung oleh Firman Fatoni yaitu pasangan calon nomor urut 03.

Pola partisipasi selanjutnya yaitu kegiatan organisasi dimana pada pilkada Kabupaten Pemalang masyarakat Desa Banjardawa ada yang terlibat menjadi kegiatan organisasi. Samuel P. Huntington menyebut bahwa pola partisipasi dalam bentuk kegiatan organisasi ialah partisipasi yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah

organisasi. Dalam hasil penelitian masyarakat Desa Banjardawa ada yang menjadi tim sukses sekaligus pengurus organisasi partai politik tingkat ranting bahkan menjadi ketua ranting partai politik.

Pola partisipasi yang ada lagi yaitu mencari koneksi. Dalam hal ini kegiatan yang termasuk dalam mencari koneksi yaitu salah satu tim sukses yaitu Vidi Kurniawan melakukan strategi dengan cara berkomunikasi dengan pemerintah desa melalui kepala dusun dimana Vidi Kurniawan mendapatkan data masyarakat dan disitu Ia dapat memilah masyarakat per dusunnya siapa yang dirasa mampu menjadi anak ranting dan ikut berkampanye memenangkan pasangan calon bupati nomor urut 1 yang didukungnya.

Pada pola partisipasi yang terakhir yaitu tindakan kekerasan pada pilkada Kabupaten Pemalang khususnya di Desa Banjardawa tidak terjadi. Hal tersebut karena tindakan kekerasan menurut Samuel P. Huntington ialah sebuah kegiatan yang memengaruhi pengambilan keputusan dengan proses yang menimbulkan kerugian fisik terhadap orang dan harta sekitar. Pada realitanya saat pilkada Kabupaten Pemalang masyarakat Desa Banjardawa tidak ada yang melakukan tindakan tersebut. Tim sukses Vidi Kurniawan menyebut bahwa dalam berkampanye hanya ada perdebatan argumen antar individu tetapi tidak sampai menimbulkan sebuah tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik. Hal yang sama juga disampaikan oleh PKD Desa Banjardawa yaitu Muhammad Bagus yang menyebut selama proses pilkada Kabupaten Pemalang masyarakat Desa Banjardawa dinilai telah dewasa demokrasi karena tidak adanya tindakan kekerasan yang merugikan orang lain.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan studi penelitian yang telah penulis lakukan terkait Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Pemalang : Studi Kasus Di Desa Banjardawa dapat disimpulkan seperti berikut ini:

1. Preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 terdiri dari berbagai macam preferensi. Adapun preferensi pilihan masyarakat Desa Banjardawa yaitu preferensi tempat hiburan, preferensi infrastruktur jalan, infrastrukturn upah minimum regional dan lapangan kerja, preferensi ketertiban pemuda dalam pembangunan daerah, dan preferensi uang dan partai politik. Pada preferensi tempat hiburan banyak sekali dimiliki oleh para pemilih muda yang juga termasuk para pemilih pemula. Selanjutnya preferensi infrastruktur jalan juga banyak dimiliki oleh pemilih muda. Adapun untuk preferensi pilihan upah minimum regional atau umr dan lapangan kerja dimiliki oleh para pemilih muda dan pemilih generasi X. Preferensi keterlibatan pemuda dalam membangun pembangunan daerah pastinya dimiliki oleh pemilih muda dan untuk preferensi pilihan uang dan partai politik dimiliki oleh para pemilih generasi X. Dari hasil penelitian tersebut maka preferensi pilihan masyarakat yang paling dimiliki adalah preferensi umr dan lapangan kerja karena seluruh golongan masyarakat baik pemilih muda atau generasi x memiliki preferensi pilihan tersebut dalam menentukan pilihannya saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020. Preferensi pilihan tersebut jika dianalisis menggunakan teori pilihan rasional maka preferensi pilihan masyarakat Desa Banjardawa rasional karena preferensi pilihan tersebut memenuhi substansi dasar teori pilihan rasional. Hal tersebut karena saat dianalisa menggunakan teori pilihan rasional preferensi pilihan masyarakat Desa Banjardawa yang memilih untuk aktif memilih dinilai rasional karena memenuhi substansi dasar teori pilihan rasional. Substansi dasar pilihan rasional yaitu poertma terkait tindakan manusia yang dinilai menjadi sebuah instrumen yang berusaha untuk mencapai tujuan. Keputusan masyarakat yang aktif memilih saat pilkada pastinya karena adanya tujuan dan tujuan tersebut tertuang dalam preferensi pilihan masyarakat Desa Banjardawa. Preferensi pilihan masyarakat juga menggambarkan

substansi dasar pilihan rasional lainnya yaitu terkait manusia sebagai aktor yang memiliki perilaku perhitungan rasional dimana setiap akan memperhitungkan aksinya yang mana yang dinilai lebih menguntungkan.

2. Pada saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 partisipasi masyarakat Desa Banjardawa memiliki partisipasi memilih yang cukup tinggi yaitu sebesar 75%. Pola partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membentuk sebuah pola atau bentuk yang terdiri atas lima bentuk yaitu kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan. Pada partisipasi politik masyarakat Desa Banjardawa saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020 membentuk pola partisipasi berupa kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi. Kegiatan pemilihan masyarakat meliputi pemilih aktif dan anggota penyelenggara pemilu. Sementara itu kegiatan organisasi meliputi anggota organisasi kepemudaan dan anggota partai politik. Ada berbagai alasan atau faktor pendorong setiap individu berpartisipasi seperti aktif berpartisipasi sebagai memilih karena ingin harapan atau preferensi pilihannya bisa terkabul saat pilihan calon yang dipilih jadi, lalu yang aktif sebagai penyelenggara pun memiliki beragam alasan seperti ingin mencari pengalaman, mengabdikan kepada negara, hingga ingin mencari pendapatan lebih menjadi penyelenggara pemilu. Salah satu partisipasi *lobbying* yaitu adanya tim sukses yang melakukan lobi kepada tokoh agama Islam untuk berkampanye dengan cara mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon kepada jamaahnya. Sementara itu, untuk mencari koneksi juga dilakukan oleh ke tim sukses ke pemerintah desa melalui kepala dusun untuk mendapatkan data masyarakat per dusun di Desa Banjardawa.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih sering melakukan sebuah sosialisasi atau kampanye terkait pentingnya pemilihan umum agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemilu dan lebih melek lagi terhadap politik khususnya saat menjelang pemilihan seperti pilkada. Preferensi politik masyarakat desa secara keseluruhan memang sudah bagus karena preferensi politik masyarakat Desa Banjardawa berdasarkan latar belakang, *track record*, latar belakang, dan visi misi setiap pasangan calon. Namun, masih ada masyarakat politik yang preferensi politiknya berupa uang atau yang berarti bahwa dirinya akan mencoblos pasangan calon jika dirinya mendapatkan

uang dari pasangan tersebut. Hal tersebutlah yang harus diperbaiki lagi agar masyarakat Desa Banjardawa lebih sadar politik dan lebih cerdas dalam memilih pasangan calon bupati atau para wakil rakyat. Hal tersebut juga yang perlu di catat bagi masyarakat yang terlibat atau menjadi tim sukses agar berkampanye yang cerdas tanpa perlu menggunakan uang.

2. Partisipasi pemilihan masyarakat Desa Banjardawa memang sangat bagus karena sebesar 75% masyarakat hadir untuk melakukan pemilihan dan itu menandakan masyarakat Desa Banjardawa cukup sadar politik sadar akan demokrasi. Masyarakat Desa Banjardawa secara jumlah masih banyak yang hanya menjadi partisipasi aktif sebagai pemilih. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat Desa Banjardawa yang sibuk dalam bekerja dan usaha yang membuat jarang terlibat menjadi tim sukses atau relawan. Selanjutnya, masih adanya masyarakat yang memilih menjadi golput karena adanya beberapa alasan. Adapun alasan masyarakat yang memilih golput karena tidak percaya kepada sistem politik, para politisi, dan adanya penolakan diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19. Masyarakat yang memilih golput tersebut harus lebih diberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah suara saat pemilu. Pemahaman dan edukasi tersebut cukup penting agar masyarakat yang masih tidak percaya terhadap sistem politik dapat menerima bagaimana sistem politik bekerja dan memahami bahwa suaranya saat pilkada sangat penting bagi Indonesia. Jika Indonesia ingin berkembang dan maju maka diperlukan pejabat publik yang berkompeten dan itu ada di tangan Kita sebagai masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Asrinaldi, Y. d. (2009). Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang . *Jurnal Demokrasi*.
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3, 10.
- Banjardawa, H. P. (2023). *Banjardawa.id profil desa*. Retrieved from <https://banjardawa.desa.id/demografi/>
- BPS. (2022). *Kecamatan Taman Dalam Angka 2022*. CV.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Prima Grafika.
- Creswell, J. W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian Muliasari Solikha, H. P. (2022). Perbedaan Value Pada Generasi X dan Y di Indonesia. *Jurnal Diversita*.
- Dila Novita, A. F. (2020). Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial : Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019. *MAKNA : Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*.
- Diyana, D. (2022). Analisis Tokoh Politik Indonesia ; Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Dogan, M. (1996). *Political Science and the Other Science*. New York: Oxford University.
- Emi. (2023, Mei 24). Wawancara dengan Pemilih Generasi X. (M. A. Kalasuba, Interviewer)
- Fauzi, F. A. (2020). Komunikasi KPU dalam Menekan Golput di Jember. *Al-Hikmah*.
- Firman, F. (2023, Juni 9). Wawancara dengan Tim Sukses dan Ketua Ranting PKB. (M. A. kalasuba, Interviewer)
- Gantiano, H. E. (2018). Politikus sebagai Komunikator Politik (Komunikasi Politik). *Jurnal Penerangan Agama Hindu*.
- G-News, T. R. (2020). *Siapakah Ahmad Agus Wardana, Cawabup Pemalang Dari PKB?* Pemalang: G-News.id.
- Harsyaf, N. F. (2022). Preferensi Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba. *digilibadmin.unismuh.ac.id*.
- Humas. (2023). *Kampus2 UNCP*. Retrieved from [Kampus2 UNCP Web site: https://tpb.uncp.ac.id/2019/01/lembaga-lembaga-penyelenggara-pemilihan.html](https://tpb.uncp.ac.id/2019/01/lembaga-lembaga-penyelenggara-pemilihan.html)

- Jamaludin. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Jateng, B. (2020). *BPS Provinsi Jawa Tengah UMR Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Retrieved from BPS Provinsi Jawa Tengah Web site: <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/708/2/kebutuhan-hidup-layak-dan-upah-minimum-kabupaten-kota-.html>
- Khalehar, M. A. (2017). Perilaku Memilih Pemilih Pemula Pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Kominfo, H. (2019, Juni 13). *Kominfo*. Retrieved from Kominfo web site: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/19260/270-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-pada-2020/0/berita#:~:text=Dari%20270%20daerah%20yang%20akan,%3B%20dan%209.%20Sulawesi%20Tengah.>
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Integralistik*.
- Lina Ulfa Fitriani, L. W. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif du Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal, 1*.
- Lubis, S. (2007). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik. *Demokrasi, VI*.
- McClosky, H. (1972). *Political Participation*. New York: The Macmillan Company.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- neumann, S. (1963). *Modern Political Parties*. London: The Free Press of Glencoe.
- Novitasari, T. P. (2023, Mei 28). Wawancara dengan Anggota KPPS. (M. A. kalasuba, Interviewer)
- Nugraha, A. F. (2016). Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fiqih Siyasah. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Nurudin. (2010). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pemalang, H. K. (2020). *KPU Kabupaten Pemalang*. Retrieved from <https://kab-pemalang.kpu.go.id/#>
- Prasetya, A. (2018). Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun. *Jurnal Pamator*.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samuel P. Hungtinton, J. M. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, d. N. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 2.
- Sormin, I., Siregar, F. A., & Nasution, d. M. (2020). Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal El - Thawalib*.
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sumitro. (2020). *Cabut Dari Pasangan Agus – Eko, Gerindra Pemalang Resmi Usung Agung – Mansur*. Pemalang: daulat.co.
- Syam, M. A. (2014). Preferensi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah di Majene Dalam Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. *Jurnal Adabiyah*, XIV.
- Uripto. (2020). *H Eko Priyono: "Dibully, Dihujat dan Dibunuh Siap Demi Kemajuan Pemalang"*. Pemalang: Ranah Pesisir.com.
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Yuliananingsih, F. N. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pendidikan Sosial*.

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran Dokumentasi Penelitian

Gambar 6. Wawancara dengan Sukandar selaku Kepala Desa Banjardawa



Gambar 7. Wawancara dengan Rambat selaku Sekertaris Desa



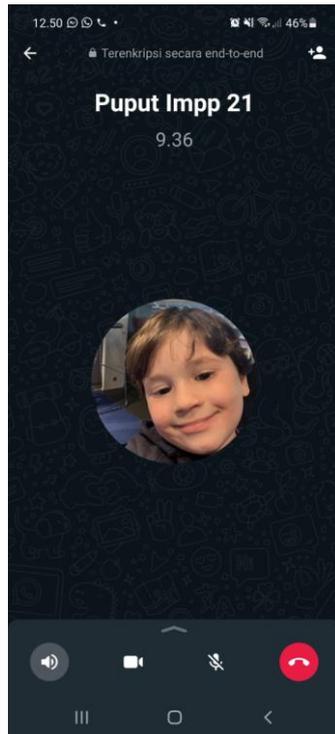
Gambar 8. Wawancara dengan Muhammad Bagus selaku PKD Desa Banjardawa



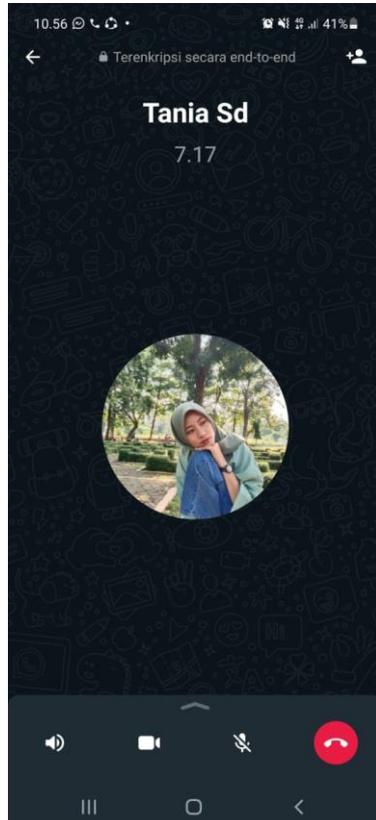
Gambar 9. Wawancara dengan Fatoni Firman selaku Ketua Ranting PKB dan Tim sukses



Gambar 10. Wawancara dengan Puput Nur Maulidia selaku pemilih



Gambar 11. Wawancara dengan Tania Putri Novitasari selaku anggota KPPS



## 2. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Pemerintah Desa Banjardawa

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Harna Kim, 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 75432886; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1267/Un.10.6/K/KM.05.01.05/2023 24 Mei 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Kepala Desa Banjardawa  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon berkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang: Studi Kasus Di Desa Banjardawa*" di tempat/institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Muhammad Ahlan Kalasuba  
NIM : 1906016078  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Pemalang 10 Agustus 2001  
C/Pic-mail : 087765695989/ imunkalasuba@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Rohadi/ Siti Mutmainah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Melati Rt 03 Rw 03, Desa Banjardawa

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Dekan  
Kampus II  
Bagian Akademik  
H.A. Gunawan, S.Ag, M.H

Terbina :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## 3. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara

### A. Masyarakat Desa Banjardawa

#### 1. Masyarakat Hanya Memilih

- Identitas informan
- Apakah Anda ikut meramaikan pemilihan saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020?
- Apa preferensi pilihan Anda saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020?
- Mengapa hal itu menjadi preferensi pilihan Anda saat pilkada Kabupaten Pemalang?
- Apakah dari ketiga pasangan calon bupati ada yang bisa menjawab preferensi pilihan Anda?
- Mengapa Anda memilih aktif berpartisipasi menjadi pemilih saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020?
- Bagaimana Anda mendapatkan informasi dari ketiga pasangan calon bupati?

#### 2. Masyarakat Penyelenggara Pemilu

- Identitas informan
- Saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020, Anda berpartisipasi menjadi apa?
- Mengapa Anda lebih memilih menjadi penyelenggara pemilu saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020?
- Sudah berapa lama Anda menjadi penyelenggara pemilu?

- e. Bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi terkait rekrutmen penyelenggara pemilu?
3. Masyarakat Tim Sukses Pasangan Calon
- a. Identitas informan
  - b. Saat pilkaa Kabupaten Pemalang tahun 2020, Anda berpartisipasi menjadi apa?
  - c. Mengapa Anda memilih menjadi tim sukses salah satu pasangan calon?
  - d. Sudah berapa lama Anda aktif di dunia politik Kabupaten Pemalang?
  - e. Bagaimana strategi Anda dalam berkampanye saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020?
  - f. Apakah ada kendala dalam berkampanye saat pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2020?
  - g. Kendala seperti apa yang Anda temui saat masa pilkada tahun 2020 lalu?
4. Pemerintah Desa Banjardawa
- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam berkampanye ke masyarakat terkait pilkada Kabupaten Pemalang agar masyarakat datang ketps?
  - b. Strategi apa yang dilakukan pemerintah desa sehingga partisipasi pemilih masyarakat Desa Banjardawa tinggi?
  - c. Bagaimana cara pemerintah desa menstabilkan suasana keamanan masyarakat Desa Banjardawa selama masa pilkada Kabupaten Pemalang.

## 17. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

18. Nama : Muhammad Ahlan Kalasuba
19. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 10 Agustus 2001
20. Jenis Kelamin : Laki-laki
21. Agama : Islam
22. Kewarganegaraan : Indonesia
23. Alamat : RT 03, RW 03, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
24. No. Telpon : 087765695989
25. E-mail : [imankalasuba@gmail.com](mailto:imankalasuba@gmail.com)
26. Jenjang Pendidikan Formal
27. SD Negeri 02 Banjardawa
28. SMP Negeri 1 Taman
29. SMA Negeri 1 Pemalang
30. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik
31. Pengalaman Organisasi:
32. Anggota PMII Rayon Fisip UIN Walisongo
33. Koordinator Kajian Aksi dan Strategi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
34. Koordinator Departemen Pendidikan dan Wacana Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang UIN Walisongo
35. Sekertaris Departemen Sosiasl Politik UKM Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo
36. Wakil Ketua Bala Bahasa